

**ANALISIS KOMUNIKASI PUBLIK DALAM KONTEKS BLT :
STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DAN THAILAND**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Dakwah



Oleh :

Lola Anggraeni

NIM : 21521022

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

TAHUN 2025 M / 1447 H

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (IAIN Curup)

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Lola Anggraeni

NIM : 21521022

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : "Analisis Komunikasi Publik dalam Konteks BLT : Studi
Komparasi Antara Indonesia dan Thailand"

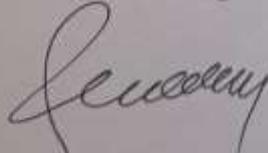
Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

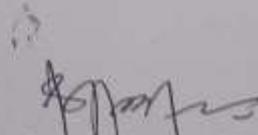
Curup, 12 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Robby Aditya Putra, M.A
NIP. 199212232018011002

Pembimbing II



Pajrun Kamil, M.Kom.I
NIDN. 2115058102

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lola Anggraeni

NIM : 21521022

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Skripsi : "Analisis Komunikasi Publik Dalam Konteks BLT : Studi Komparasi Antara Indonesia dan Thailand"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi, apabila dikemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan dengan seperlunya.

Curup, 02 Juni 2025



Lola Anggraeni

NIM. 21521022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 2.26/In.34/FU/PP.00.9/07/2025

Nama : Lola Anggraeni
NIM : 21521022
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Analisis Komunikasi Publik Dalam Konteks BLT : Studi
Komparasi Antara Indonesia dan Thailand

Telah dimunqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Pukul : 10.30 s/d 12.00 WIB
Tempat : Aula Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Robby Aditya Putra, M.A
NIP. 199212232018011002

Sekretaris,

Pajrun Kamil, M. Kom. I
NIDN. 2115058102

Penguji I,

Savri Yansah, S. Th. L. M. Ag
NIP. 199010082019081001

Penguji II,

Dede Sihabuddin, M.Sos
NIP. 199203102022031003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. Pujiyuddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197501122006041009

MOTTO

“Aku terbangkan harapan menembus langit,

Ku percaya hati ‘kan menuntunku,

Mimpiku ini akan jadi nyata,

Dan bahagia selalu ada”...

-Mimpi (Putri Ariani)-

“Suatu hari, hidup akan amat berat sampai kau merasa ingin mati. Jangan berbaring saja, berjuanglah sekuat tenaga. Katakan pada dirimu kau takkan mati dan harus bertahan bagaimanapun juga”

-When Life Gives You Tangerines”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Komunikasi Publik Dalam Konteks BLT : Studi Komparasi Antara Indonesia dan Thailand.”** Kemudian, tidak lupa pula penulis juga mengucapkan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menghantarkan kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh teknologi seperti sekarang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tentunya terdapat banyak kendala yang penulis alami, namun berkat kekuatan dan keberkahan yang Allah SWT. berikan, akhirnya penulis dapat mengatasi kendala dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa juga penulis sampaikan rasa terima kasih atas bantuan, dorongan, dan bimbingan dari bapak/ibu dosen (umumnya), teman-teman seperjuangan (khususnya) dan semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini. Tidak ada yang bisa penulis ucapkan selain kata terima kasih atas semua bantuannya. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I, selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M. Ag, selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S. E, M. Pd, selaku Wakil Rektor II IAIN Curup

4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag, M. Pd, selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Fakhruddin, S. Ag, M. Pd. I, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup
6. Bapak Dr. Robby Aditya Putra, M. A, selaku Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup
7. Bapak Pajrun Kamil, M. Kom. I, selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Dr. Robby Aditya Putra, M. A, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Pajrun Kamil, M. Kom. I, selaku Dosen Pembimbing II
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, motivasi semangat, dan do'a yang tidak pernah lupa dipanjatkan
10. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Curup yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Dengan penuh kesadaran, tentunya skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala kritik dan saran yang bertujuan membangun guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Juni 2025
Penulis,

Lola Anggraeni
NIM. 21521022

PERSEMBAHAN

Puji syukur serta Alhamdulillah, terima kasih kupanjatkan kepada Allah SWT. atas semua pertolongan, petunjuk, dan kekuatan yang diberikan kepadaku, sehingga aku bisa menyelesaikan sebuah karya sederhana ini yang bernama skripsi. Maka dar itu, ku persembahkan karya ini dengan penuh rasa suka cita kepada :

1. Perempuan hebat bernama Kustiati adalah mamaku. Mama yang teramat sabar, penuh kehangatan, dan teramat tulus menyayangiku. Seluruh hidupku bergantung padanya, setiap langkah kakiku selalu disertai oleh do'anya. Mama yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam merawat, membesarkan, menjadi guru dan mencukupi kebutuhanku. Ma, terima kasih karena sudah menjadi ibuku. Terima kasih atas semua pengorbanan mama untuk kami anak-anakmu.
2. Lelaki hebat yang bernama Damsi adalah ayahku. Ayahku jarang sekali bercanda dengan anak-anaknya, namun perjuangan dan kasih sayangnya tiada siapapun yang bisa menandingi. Ayah yang selalu bekerja keras untuk kami, ayah tidak pernah membiarkan kami kekurangan sedikitpun. Terima kasih yah, karena sudah memberikan pendidikan yang layak untuk kami anak-anakmu.
3. Saudariku Dhea Annisa Kusdariani. Dia satu-satunya saudariku, teman bertengkar semasa kecil. Namun dibalik itu, aku tahu betul bahwa dia begitu menyayangiku sebagai adiknya. Terima kasih atas dukungan dan nasehatnya, sehingga akhirnya aku memiliki keberanian dan memilih untuk melanjutkan pendidikan.

4. Keponakanku yang cantik dan manis, Nasywa Faradisa. Bayi kecil yang begitu menggemaskan hadir dan menghiasi hari-hariku dalam satu tahun terakhir ini. Terima kasih anak manis karena kamu sudah hadir diwaktu yang tepat, menjadi pelipur hati dikala lelah menjalani semester akhir di perkuliahan. Berkat kamu, aku dapat panggilan baru yaitu “bucik”.
5. Seorang laki-laki baik yang bernama Farhan Desriyanto. Meski memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, kamu tetap membersamaiku untuk bertahan dan berjuang bersama terutama dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas warna-warna yang sudah diberikan, mari wujudkan mimpi-mimpi yang lebih besar lagi.
6. Sahabatku dari kecil hingga sekarang dan seterusnya, Monica Selvia Anggraini. Terima kasih atas dukungan yang penuh kepadaku selama ini dan sudah bersedia menjadi pendengar yang baik atas semua ceritaku.
7. Yuriza, Sabni, Inka, Renita, Laili, Cindy, Ayu, Hanifah, dan Heza. Mereka ini teman dekatku, orang-orang baik yang Allah hadirkan untuk memberi warna dalam hidupku. Memang tidak banyak, tapi mereka saja sudah cukup bagiku. Terima kasih atas dukungan kalian semua selama ini.
8. Keluarga besar KPI 2021 dan terkhusus Change Youth 21 yang sudah banyak memberi pengalaman kepadaku dan memberikan keseruan semasa kuliah. Terima kasih telah atas semuanya selama masa perkuliahan ini.
9. Bapak Dr. Robby Aditya Putra, M. A (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Pajrun Kamil, M. Kom. I (Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II). Terima kasih atas dukungan, motivasi, waktu, ilmu, dan

bimbingan yang bapak Robby dan bapak Pajrun berikan kepadaku selama ini.

10. Dosen dan Staf dalam ruang lingkup FUAD, terkhusus prodi KPI. Terima kasih atas semua ilmu dan bantuan yang diberikan semasa perkuliahan ini dari awal hingga akhir.

11. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk menjadi bagian dari kampus ini. Teruslah jaya dan berkibar selalu.

ABSTRAK

Lola Anggraeni NIM. 21521022 “**Analisis Komunikasi Publik dalam Konteks BLT: Studi Komparasi Antara Indonesia dan Thailand.**” Skripsi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Thailand dalam konteks program Bantuan Langsung Tunai (BLT), khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dan *Welfare Card* di Thailand. Fokus utama penelitian ini adalah membandingkan strategi komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat serta kemudahan akses terhadap layanan bantuan sosial di kedua negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi komparasi. Teori yang digunakan meliputi *Public Information Model* dari Grunig & Hunt untuk menganalisis aspek kepercayaan publik, serta *Theory of Service Accessibility* dari Denis McQuail untuk menilai aksesibilitas layanan. Kedua teori ini menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat, faktual, dan dapat dipercaya dari lembaga pemerintah kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam menyalurkan bantuan sosial, terdapat perbedaan dalam strategi komunikasi publik yang digunakan. Indonesia cenderung mengedepankan keterbukaan informasi melalui kanal digital, dan kegiatan sosialisasi yang bersifat langsung untuk mendorong pemahaman masyarakat terhadap PKH. Sementara itu, pemerintah Thailand lebih menitikberatkan pada pendekatan melalui pemanfaatan teknologi kartu kesejahteraan yang terintegrasi dengan sistem data nasional. Kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing dalam upaya membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan transparansi, penguatan komunikasi dua arah, serta perluasan literasi digital masyarakat sebagai strategi lanjutan untuk mendorong partisipatif aktif dan pemerataan akses terhadap program bantuan sosial. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan komunikasi publik yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci : *Komunikasi Publik, Bantuan Langsung Tunai, PKH, Welfare Card*

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Literature.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Teori Komunikasi Publik	20
B. Komunikasi Publik yang Efektif	23
C. Makna Strategi Komunikasi Publik	26
D. Strategi Komunikasi Publik dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat	28
E. Strategi Komunikasi Publik dalam Kemudahan Akses.....	31
F. Program Bantuan Langsung Tunai.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
D. Objek Penelitian	43
E. Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
1. Program Keluarga Harapan (PKH)	51
2. <i>Welfare Card</i> (Thailand)	57
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	64
1. Strategi Komunikasi Publik dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat	64
a. Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Indonesia dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat.....	65
b. Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Thailand dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat.....	76
c. Analisis Perbandingan	88
2. Strategi Komunikasi Publik Terkait Kemudahan Akses	96
a. Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Indonesia Terkait Kemudahan Akses	97
b. Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Thailand Terkait Kemudahan Akses	114
c. Analisis Perbandingan	121
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambar Kartu Keluarga Sejahtera	53
4.2 Gambar <i>Welfare Card</i>	57
4.3 Gambar Artikel Berita Terkait BLT PKH	63
4.4 Gambar Unggahan Facebook Kemensos RI	67
4.5 Gambar Pemberitahuan Berita Hoaks	71
4.6 Gambar Berita Terkait <i>Welfare Card</i>	75
4.7 Gambar Berita Terkait <i>Welfare Card</i>	81
4.8 Gambar Unggahan Facebook Kementerian Keuangan Thailand... ..	83
4.9 Gambar Artikel Terkait KKS.....	96
4.10 Gambar Artikel Penggunaan KKS.....	99
4.11 Gambar Artikel Terkait Pendamping PKH.....	104
4.12 Gambar Aplikasi dan Web Cek Bansos.....	108
4.13 Gambar Tampilan <i>Welfare Card</i>	113
4.14 Gambar Aplikasi Krungthai NEXT.....	116

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu	14
4.1 Kriteria Keluarga Penerima Manfaat.....	51
4.2 Analisis Perbandingan	91
4.3 Analisis Perbandingan	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan sosial masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia, termasuk juga di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini telah menjadi perhatian global, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks regional Asia Tenggara, meskipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam hal distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan dasar antarnegara maupun di dalam negara itu sendiri.¹

Berbagai negara di kawasan Asia Tenggara telah menerapkan beragam kebijakan dan program sosial untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada kelompok masyarakat yang rentan atau berpenghasilan rendah, dengan harapan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.²

¹ Miftah Thoha. (2012). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 21

² Hetifah SJ Sumarto. (2016). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 98

Berangkat dari tujuan adanya program BLT, Islam memiliki pandangan yang selaras berdasarkan QS. Al-Hasyr ayat 7 berikut :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. (QS. Al-Hasyr : 7)³

Berdasarkan ayat di atas, prinsip distribusi kekayaan yang adil sangat ditekankan. Ayat ini menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, tetapi harus didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan adanya BLT, pemerintah negara berupaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

³ QS. Al-Hasyr : 7

Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial dan kepedulian terhadap kaum dhuafa.⁴

Maka dari itu, Indonesia dan Thailand, sebagai dua negara besar di kawasan Asia Tenggara, telah mengimplementasikan program BLT dengan pendekatan dan karakteristik yang khas. Kedua negara ini menarik untuk dijadikan objek studi komparasi karena memiliki beberapa kesamaan sekaligus perbedaan yang signifikan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dan juga program BLT sendiri telah banyak mengalami berbagai evolusi dan penyesuaian, termasuk dalam hal mekanisme penyaluran, kriteria penerima, dan besaran bantuan.

Di Indonesia program BLT telah menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial, terutama sejak krisis ekonomi 1997-1998. Salah satu program BLT yang cukup dikenal di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang menggabungkan bantuan tunai dengan persyaratan tertentu terkait pendidikan dan kesehatan.⁵

Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri ialah program bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. BLT PKH bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kriteria penerima bantuan ini yaitu ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, berusia lanjut, dan juga penyandang

⁴ Robby Aditya Putra, Mochamad Aris Yusuf, and Maulida Fitri. (2023). *Dakwah Communication : An Alternative Way for Children Caused By Broken Home*. Jurnal KOMUNIKA. Vol. 6. No. 1

⁵ Jalaluddin Rakhmat. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 231

disabilitas berat. Nilai bantuan ini berkisar antara Rp900.000 hingga Rp3.000.000 dalam satu tahap pencairan dan tergantung juga pada kategori penerima. Penyaluran bantuan ini dilakukan empat tahap dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.⁶

Kebijakan ini diambil dengan melihat kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduknya yang diukur dengan Indeks Gini⁷ mencapai angka yang mengkhawatirkan yaitu 0,38% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan diseluruh lapisan masyarakat.⁸

Dikuatkan juga dengan data terbaru mengenai kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa pada Maret 2024, persentase penduduk miskin mencapai 9,03%. Hal ini merupakan penurunan dari 9,36% pada Maret 2023, dengan jumlah penduduk miskin diperkirakan sekitar 25,5 juta jiwa. Penurunan sebesar 0,33% ini menunjukkan tren positif dalam pengurangan kemiskinan, melanjutkan penurunan sebelumnya sebesar 0,21% dari September 2022 ke Maret 2023.⁹

⁶ Daftar Kriteria Penerima Terbaru Program PKH 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/daftar-kriteria-penerima-terbaru-program-pkh-2024/>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 10.18 WIB

⁷ Indeks Gini adalah alat statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana distribusi pendapatan di antara penduduk dalam suatu wilayah tidak merata. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata, sedangkan 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang ekstrem, di mana satu individu menguasai seluruh pendapatan.

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Indeks Gini dan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : BPS. Hlm. 25

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Berita Resmi Statistik. No.50/07/Th. XXVII, 1 Juli 2024

Sama dengan Indonesia, Thailand juga mengalami hal serupa, yaitu mengalami ketimpangan ekonomi dimana adanya perbedaan pendapatan yang signifikan antar lapisan masyarakat, yang turut memperburuk akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Walaupun disisi lain Thailand telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan ini tetap menjadi isu utama yang harus dihadapi oleh pemerintah Thailand.¹⁰

Hal ini berdasarkan data yang menyatakan bahwa pada tahun 2024 sekitar 5,4% populasi masyarakat Thailand hidup di bawah garis kemiskinan, dengan mayoritas dari mereka tinggal di daerah pedesaan dan bekerja di sektor agraris. Selain itu, ketimpangan pendapatan tetap menjadi persoalan yang serius sebagaimana yang ditunjukkan oleh koefisien Gini¹¹ sebesar 43,3%, yang mencerminkan Thailand sebagai salah satu negara dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Asia Timur dan Pasifik.¹² Di dukung juga data dari Bank Dunia, bahwa sekitar 10% dari penduduk terkaya di Thailand menguasai lebih dari 40% total pendapatan negara, sementara 20% penduduk termiskin hanya memiliki akses terhadap sekitar 5% pendapatan negara.¹³

Maka dari itu, pemerintah Thailand juga menerapkan berbagai program bantuan sosial seperti BLT PKH di Indonesia dan salah satu program yang paling menonjol adalah “*Welfare Card*” atau kartu

¹⁰ Andri Prasetyo. (2021). *Kesenjangan Sosial di Negara Berkembang : Studi Kasus Thailand*. Jakarta : Penerbit Ilmu Ekonomi. Hlm. 88

¹¹ Koefisien Gini adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi.

¹² World Bank. *Thailand Economic Monitor, Unlucking The Growth Potential Of Secondary Cities*. Publication July 2024

¹³ World Bank. (2022). *Thailand Economic Monitor : The Road to Recovery*. Hlm. 12

kesejahteraan yang memungkinkan penerima bantuan untuk mengakses berbagai layanan dan bantuan, termasuk bantuan tunai untuk kebutuhan sehari-hari. Program ini pertama kali diluncurkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pada tahun 2017. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan akses kepada layanan dasar bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.¹⁴

Pemegang *Welfare Card* yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat penerima akan menerima bantuan. Seperti, mereka yang berpenghasilan tahunan dibawah 30.000 baht (Rp13.765.395,00) maka akan mendapatkan 300 baht (Rp137.620,23) setiap bulannya. Bagi mereka yang berpenghasilan diatas 30.000 – 100.000 baht pertahun hanya akan mendapatkan 200 baht (Rp91.753,10) saja perbulannya.¹⁵

Namun, keberhasilan program BLT tidak hanya bergantung pada formulasi kebijakan dan mekanisme implementasinya saja. Sebuah studi yang dilakukan oleh Annisaulkhairi dan Naufal Muharam Nurdin di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, menemukan bahwa 97,8% keluarga penerima PKH memiliki skor keragaman konsumsi pangan yang tinggi, dan 86% mengakui bahwa PKH meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, masih terdapat 27,8% balita dengan stunting dan 3,3%

¹⁴ Phuwana Sriratanaphin. (2019). *Social Welfare Policies in Thailand : Analysis of the Welfare Card Scheme*. Journal Asian Social Policy. Vol 21. Hlm. 158

¹⁵ Thaiger. “Finance Ministry Unveils 2025 State Welfare Card For Low-Income Boost”.

dengan gizi buruk. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi jangka panjang terhadap dampak PKH terhadap status gizi anak.¹⁶

Begitupun dengan penelitian oleh Israwati, Asti Ayu Febriana, dan Nella Adriani di Desa Sukamaju, Kabupaten Bengkalis, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH belum optimal karena adanya kesalahan dalam pendataan peserta dan penyalahgunaan dana bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek teknis, aspek komunikasi publik memegang peranan penting dalam keberhasilan program.¹⁷

Pada program *Welfare Card* di Thailand, sebuah studi yang dilakukan oleh Wannaphong Durongkaverroj menemukan bahwa program ini tidak berhasil mengurangi kemiskinan moneter dan bahkan menyebabkan penurunan signifikan dalam pengeluaran makanan. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam desain dan implementasi program, termasuk aspek komunikasi publik.¹⁸

Kedua negara ini memang sudah menerapkan program sosial BLT PKH dan *Welfare Card* dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, keberhasilan sebuah program tidak serta-merta berhasil berdasarkan format mekanismenya saja. Melainkan faktor yang sama pentingnya namun seringkali kurang mendapat perhatian, adalah efektivitas dari strategi komunikasi publik dalam menyampaikan informasi tentang

¹⁶ Annisaulkhairi & Nauhfal Muharam Nurdin. (2023). *Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Status Gizi Balita di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota*. Jurnal Kesmas Andalas. Vol.17. No.2. Hlm. 89-96

¹⁷ Israwati, Asti Ayu Febriana, dan Nella Adriani. (2023). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukamaju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Masyarakat Mandiri. Vol.7. No.2. Hlm. 741-752

¹⁸ Wannaphong Durongkaverroj. (2022). *Can Cash Transfers Reduce Poverty and Food Insecurity ? Evidence from the Welfare Card Scheme in Thailand*. Journal of Asian Economics. Vol.82. Article 101508

program tersebut kepada masyarakat. Komunikasi publik yang efektif memegang peran krusial dalam memastikan bahwa informasi tentang program BLT PKH dan *Welfare Card* seperti tujuan, mekanisme, kriteria penerima, dan prosedur pengajuan, dapat tersampaikan dengan jelas dan akurat kepada kelompok sasaran.

Strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh Indonesia dan Thailand dalam konteks BLT memang memiliki perbedaan yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi pemahaman, penerimaan, dan partisipasi masyarakat terhadap program tersebut. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografis, infrastruktur komunikasi, tingkat literasi media, dan budaya komunikasi yang berlaku di masing-masing negara.

Indonesia dengan wilayah geografis yang luas dan populasi yang tersebar di ribuan pulau, memiliki tantangan komunikasi publik yang lebih kompleks. Pemerintah Indonesia harus menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur komunikasi di daerah terpencil, keberagaman bahasa dan budaya, serta tingkat literasi yang bervariasi antar daerah. Strategi komunikasi publik untuk program BLT PKH di Indonesia seringkali melibatkan kombinasi antara media massa (televisi, radio, surat kabar) dengan pendekatan komunikasi interpersonal melalui petugas lapangan dan tokoh masyarakat lokal.¹⁹

Sementara Thailand dengan wilayah yang lebih kecil dan infrastruktur komunikasi yang relatif lebih merata, pasti menghadapi

¹⁹ Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media. Hlm. 134

tantangan yang berbeda pula. Pada awal tahun 2024, terdapat 63,21 juta pengguna internet di Thailand, dengan tingkat penetresi internet mencapai 88,0%. Negara Thailand juga memiliki 49,10 juta pengguna media sosial pada Januari 2024 yang setara dengan 68,3% dari total populasi.²⁰ Hal ini akan membuka peluang untuk strategi komunikasi digital yang lebih intensif. Namun, Thailand juga harus mempertimbangkan kesenjangan digital antara populasi perkotaan dan pedesaan, serta kebutuhan untuk mengkomunikasikan program bantuan sosial dalam konteks sistem politik yang kadang mengalami ketidakstabilan.

Efektivitas strategi komunikasi publik dalam konteks BLT tidak hanya diukur dari sejauh mana informasi tersebar, tetapi juga dari kualitas pemahaman masyarakat terhadap program tersebut. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kejelasan informasi, aksesibilitas, dan kemampuan untuk mengatasi misinformasi atau disinformasi yang mungkin muncul. Selain itu, komunikasi publik yang efektif juga harus mampu membangun kepercayaan publik terhadap program BLT dan institusi yang mengelolanya, sehingga akan meningkatkan partisipasi dan juga dukungan masyarakat.²¹

Analisis komparatif mengenai komunikasi publik dalam konteks BLT antara Indonesia dan Thailand menjadi penting untuk beberapa alasan. *Pertama*, studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik terbaik dan pembelajaran yang dapat diambil

²⁰ <https://datareportal.com/reports/digital-2024-thailand>. Diakses pada 10 Desember 2024, pukul 20.23 WIB

²¹ Zahra Avilya Putri, Evi Priyanti. (2024). *Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan di Kelurahan Karawang Kulon*. Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP). Vol 5. No 2. Hlm. 246

dari kedua negara dalam mengomunikasikan program bantuan sosial. *Kedua*, analisis ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi publik dalam konteks program bantuan sosial di negara berkembang. *Ketiga*, hasil studi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi komunikasi publik yang lebih efektif untuk program-program serupa di masa depan, baik di Indonesia ataupun Thailand dan juga negara-negara berkembang lainnya.²²

Dalam era digital dan globalisasi informasi saat ini, studi komparasi juga relevan untuk memahami bagaimana kedua negara memanfaatkan teknologi komunikasi modern dalam menyebarkan informasi tentang BLT. Hal ini termasuk penggunaan platform media sosial, aplikasi *mobile*, *website* dan sistem pesan singkat untuk menjangkau populasi yang lebih luas serta memberikan informasi yang lebih personal dan tepat waktu.

Selain itu, analisis ini juga dapat menyoroti bagaimana perbedaan konteks sosial, budaya, dan politik antara Indonesia dan Thailand mempengaruhi pendekatan komunikasi publik yang diambil. Misalnya, bagaimana faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kemudahan akses terkait program bantuan sosial dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelaksana program bantuan sosial itu sendiri.

²² Riant Nugroho. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hlm. 123

Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam pendekatan komunikasi publik antara Indonesia dan Thailand, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi komunikasi publik, dan peneliti di bidang kebijakan sosial dan komunikasi. Hasil dari analisis komparasi ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi konkret guna meningkatkan efektivitas strategi komunikasi publik dalam program BLT dan program bantuan sosial lainnya, tidak hanya di Indonesia dan Thailand, tetapi juga di negara-negara berkembang lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait strategi komunikasi publik yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Thailand dalam membangun kepercayaan publik dan kemudahan akses dalam konteks BLT (Bantuan Langsung Tunai). Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul *“Analisis Komunikasi Publik Dalam Konteks BLT : Studi Komparasi Antara Indonesia dan Thailand”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Thailand dalam menyampaikan informasi tentang program BLT PKH dan *Welfare Card* ?

2. Bagaimana strategi komunikasi publik terkait kemudahan akses yang diterapkan pemerintah Indonesia dan Thailand tentang program BLT PKH dan *Welfare Card* ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas dan rancu dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada ruang lingkup analisis komunikasi publik terkait program Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan (BLT PKH) di Indonesia dan program *Welfare Card* di Thailand. Fokus penelitian akan diarahkan pada pelaksanaan program tahun 2024 saja, guna memberikan gambaran terkini mengenai strategi komunikasi yang diterapkan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Thailand dalam menyampaikan informasi tentang program BLT PKH dan *Welfare Card*.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi publik terkait kemudahan akses yang diterapkan pemerintah Indonesia dan Thailand tentang program BLT PKH dan *Welfare Card*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori komunikasi publik dengan menganalisis bagaimana komunikasi dilakukan dalam konteks program bantuan sosial di dua negara yang berbeda. Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai komunikasi publik dan strategi penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dengan membandingkan program BLT PKH di Indonesia dan *Welfare Card* di Thailand, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana konteks sosial, budaya, dan politik mempengaruhi komunikasi publik. Hal ini dapat membantu dalam memahami dinamika komunikasi dalam konteks kebijakan sosial di negara-negara berkembang.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di Indonesia dan Thailand mengenai cara yang lebih efektif untuk menyampaikan informasi tentang program sosial kepada masyarakat. Termasuk juga strategi komunikasi yang dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang program tersebut.

b. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam komunikasi publik antara kedua negara, penelitian ini dapat membantu dalam merancang program-program sosial yang lebih responsif dan sesuai

kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial.

- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program bantuan sosial dan cara mengaksesnya. Informasi yang jelas dan mudah dipahami bisa membantu masyarakat dalam memanfaatkan program-program tersebut secara optimal.
- d. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi non-pemerintah dan lembaga sosial lainnya untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih baik dalam menyampaikan informasi tentang program-program bantuan sosial kepada masyarakat.

F. Kajian Literature

Untuk mendukung penelitian ini, dilakukan kajian literature terhadap penelitian terdahulu yang sebelumnya relevan guna menjadi dasar dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

Berikut peneliti sajikan ringkasan kajian literature yang telah dikumpulkan dengan tema yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Skripsi / Jurnal	Hasil Pembahasan
1.	Vika Yvanka, Aldri	Analisis Komparasi Pemberdayaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di

	Frinaldi, dan Lince Magriasti	Masyarakat Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kota Padang	Kota Padang telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan pendidikan, terutama bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pendamping PKH berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan dukungan kepada keluarga penerima manfaat, yang berdampak positif pada kualitas kesehatan ibu hamil dan anak-anak, serta meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masih ada kendala dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya koordinasi antara pendamping PKH dan masyarakat, serta adanya perubahan regulasi yang mempengaruhi konsistensi program. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka
--	-------------------------------------	---	---

			dalam keberhasilan PKH perlu ditingkatkan. ²³
2.	Erika Dwi Nanda	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Way Dadi, kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini menganalisis efektivitas program berdasarkan indikator yang diusulkan oleh Budiani (2007). Dan menemukan beberapa hal yang penting :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ditemukannya penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga data penerima program dianggap tidak valid. 2. Tingkat partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kegiatan sosialisasi, seperti P2K2, masih rendah yang mengakibatkan

²³ Vika Yvanka, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti. (2023). *Analisis Komparasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kota Padang*. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies. Vol. 7. No. 2

			<p>kurangnya pemahaman tentang program.</p> <p>3. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, program ini telah berhasil memberikan manfaat bagi KPM, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar.</p> <p>4. Proses pemantauan oleh koordinator dan pendamping PKH berjalan dengan baik, yang memungkinkan pengawasan terhadap pelaksanaan program.²⁴</p>
3.	Gelyn Puracan, Sandrine Chelsea Averyl Marinas, Tanabordee Jringtaisong, dan Pattaweeapol Tearphetdee	Traversing Poverty Alleviation Initiatives : A Comparative Analysis of the Welfare Card System in Thailand and Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) in the Philippines	Penelitian ini menganalisis efektivitas program bantuan sosial di Thailand (<i>Welfare Card/WCS</i>) dan di Filipina (<i>Pantawid Pamilyang Pilipino Program/4Ps</i>) dengan menggunakan teori administrasi publik baru. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua program memiliki efek positif jangka

²⁴ Erika Dwi Nanda. (2024). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*. Skripsi di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

			pendek karena membantu meningkatkan kesejahteraan hidup penerima manfaat dengan menyediakan subsidi untuk kebutuhan dasar, dukungan keuangan, dan pendidikan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kedua program tersebut tidak sepenuhnya efektif dalam mengurangi kemiskinan di kedua negara. ²⁵
--	--	--	---

Berdasarkan kajian literature yang telah dikemukakan, peneliti menyimpulkan bahwa strategi komunikasi publik memiliki peran yang signifikan dalam penyampaian informasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program bantuan sosial seperti pada BLT PKH dan *Welfare Card*. Temuan ini memberikan dasar bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Thailand dalam menyampaikan informasi mengenai program bantuan sosial. Penelitian ini berfokus pada bagaimana komunikasi publik yang diterapkan pemerintah kedua negara dapat meningkatkan kepercayaan serta aksesibilitas bagi masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

²⁵ Gelyn Puracan, Sandrine Chelsea Averyl Marinas, Tanabordee Jringtaisong, dan Pattaweeapol Tearphetdee. (2024). *Traversing Poverty Alleviation Initiatives : A Comparative Analysis of the Welfare Card System in Thailand and Pantawid Familyang Pilipino Program (4Ps) in the Philippines*. Graduate Review of Political Science and Public Administration Journal. Vol 3. No 1. Hlm. 21-40

wawasan baru yang bermanfaat bagi pengembangan strategi komunikasi publik yang lebih efektif di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Komunikasi Publik

Komunikasi publik merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, terutama dalam konteks penyampaian informasi tentang program-program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Komunikasi publik menjadi sebuah proses strategis dalam penyampaian pesan dari individu, lembaga, atau pemerintah kepada khalayak luas dengan tujuan membangun pemahaman bersama, membentuk opini publik, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku sosial. Komunikasi publik dalam konteks pemerintahan ialah sebagai proses sistematis penyampaian pesan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat luas, dengan tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi, atau mengubah perilaku publik.²⁶

Menurut Onong Uchjana Effendy, komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang atau lembaga kepada khalayak luas melalui media tertentu yang bersifat terbuka dan berskala besar. Tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan-pesan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, bukan pribadi atau kelompok tertentu saja.²⁷

²⁶ Maria Jose Canel & Karen Sanders. (2010). *Government Communication : Cases and Challenges*. London : Bloomsbury Academic. Hlm. 12

²⁷ Onong Uchjana Effendy. (2003). *Ilmu Komunikasi, Teori, dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 38

Menurut Effendy, komunikasi publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu : *Pertama*, fungsi informatif yang memungkinkan masyarakat memahami program-program yang diluncurkan, termasuk latar belakang, tujuan, mekanisme, serta manfaat yang dapat mereka peroleh. *Kedua*, fungsi persuasif yang bertujuan untuk membentuk atau mengubah persepsi dan perilaku masyarakat agar mendukung pelaksanaan program tersebut. *Ketiga*, komunikasi publik mendorong partisipasi masyarakat melalui ajakan, pelibatan aktif, dan pemberdayaan dalam proses implementasi kebijakan. *Keempat*, komunikasi yang transparan dan konsisten akan memperkuat legitimasi lembaga, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.²⁸

Effendy menekankan bahwa komunikasi publik memiliki beberapa ciri utama, yaitu :²⁹

1. Komunikasikan yang luas dan heterogen, hal ini mencakup masyarakat dari berbagai latar belakang, baik dari segi usia, pendidikan, status sosial, maupun lokasi geografis.
2. Pesan yang bersifat terbuka dan umum, dimana isi pesan yang disampaikan itu ditujukan kepada semua orang tanpa batasan individu, dan tidak mengandung unsur kerahasiaan.
3. Media yang bersifat massa dan terbuka seperti televisi, radio, internet, media sosial, dan baliho atau papan informasi publik.
4. Tujuan yang bersifat sosial dan edukatif, komunikasi publik sudah semestinya hadir untuk mendorong partisipasi, membentuk opini

²⁸ Onong Uchjana Effendy. (2003). *Ilmu Komunikasi, Teori, dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 15

²⁹ *Ibid.* Hlm. 40

publik, menyosialisasikan program, hingga membangun kesadaran yang kolektif.

5. Efek komunikasi yang tidak langsung, hal ini karena sifatnya satu arah, maka respons dari publik pun tidak bisa diamati secara langsung, melainkan melalui perubahan sikap atau perilaku dalam jangka waktu tertentu.

Dikuatkan pendapat dari Rahmawati, bahwa komunikasi publik yang efektif dapat meningkatkan saluran komunikasi yang sesuai dan dengan gaya komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.³⁰ Effendy, menekankan bahwa efektivitas komunikasi publik sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu kejelasan pesan, pemilihan media yang tepat, dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik audiens target.³¹ Tanpa komunikasi publik yang efektif, program sosial seperti BLT akan sulit mencapai sarannya, karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup atau tidak memiliki kepercayaan terhadap program yang ditawarkan.³²

Dalam konteks pemerintahan, komunikasi publik memegang peranan strategis dalam menciptakan hubungan yang terbuka antara negara dan warga negara. Pemerintah sebagai komunikator memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kebijakan, program bantuan sosial, dan pelayanan publik secara transparan, sistematis, dan mudah dipahami

³⁰ Fitri Rahmawati. (2020). *Komunikasi Publik Efektif*. Jakarta : Pustaka Indonesia. Hlm. 112

³¹ Onong Uchjana Effendy. *Op.Cit.* Hlm.15

³² Robby Aditya Putra, et al. (2024). *Training Model Development : Transforming a Conservative Da'i to a Moderate by Leveraging Digital Tools*. Ishlah : Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Vol. 6. No. 1. Hlm. 93-108

oleh masyarakat. Melalui komunikasi publik yang tepat, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat, meminimalkan resistensi terhadap kebijakan, serta meningkatkan efektivitas implementasi program-program sosial.³³

B. Komunikasi Publik yang Efektif

Komunikasi publik yang efektif adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan, keterlibatan, dan keberhasilan implementasi program sosial di masyarakat. Menurut Cutlip, Center, dan Broom, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, diterima secara positif, dan menghasilkan tanggapan atau perubahan perilaku sesuai dengan tujuan yang diharapkan.³⁴

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan (BLT PKH) di Indonesia maupun *Welfare Card* di Thailand, komunikasi publik memegang peranan yang sangat strategis. Keberhasilan program sosial tersebut sangat bergantung sejauh mana informasi mengenai tujuan program, kriteria penerima, prosedur pencairan, serta hak dan kewajiban penerima manfaat dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Tanpa komunikasi yang efektif, berbagai program sosial berisiko mengalami salah sasaran,

³³ *Ibid.* Hlm. 42

³⁴ Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom. (2006). *Effective Public Relations*. 9th ed. New Jersey : Pearson Prentice Hall. Hlm. 8-9

rendahnya partisipasi, hingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.³⁵

Selain itu, komunikasi publik yang efektif tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga memastikan bahwa pesan-pesan kunci dapat diterima baik oleh seluruh kelompok sasaran, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil, memiliki tingkat literasi rendah, atau menghadapi hambatan sosial budaya tertentu.³⁶ Menurut Bank Dunia, efektivitas program bantuan sosial sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyampaikan informasi secara jelas, transparan, serta membangun saluran komunikasi yang memungkinkan terjadinya umpan balik dari masyarakat.³⁷

Beberapa prinsip utama komunikasi publik yang efektif yaitu sebagai berikut :

1. Kejelasan Pesan

Pesan yang disampaikan harus jelas, sederhana, dan bebas dari ambiguitas. Bahasa yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik audiens, menghindari istilah teknis atau jargon yang sulit dipahami oleh masyarakat awam.³⁸

2. Ketepatan Media dan Saluran Komunikasi

Pemilihan media komunikasi yang tepat menjadi faktor penting untuk menjangkau audiens secara efektif. Media massa seperti televisi

³⁵ Maria Jose Canel dan Karen Sanders. (2010). *Government Communication : Cases and Challenges*. London : Bloomsbury Academic. Hlm. 12

³⁶ World Bank. (2012). *Indonesia Social Assistance Public Expenditure Review*. Washington, D.C : World Bank. Hlm. 32

³⁷ World Bank. (2016). *Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia*. Washington, D.C : World Bank Publications. Hlm. 29-31

³⁸ Denis McQuail. (2010). *Mass Communication Theory*. 6th ed. London : Sage Publications. Hlm. 40-41

dan radio cocok untuk menjangkau masyarakat luas, sementara media sosial dan aplikasi mobile efektif untuk generasi muda yang lebih melek digital. Pendekatan tatap muka melalui petugas lapangan atau tokoh masyarakat lokal tetap dibutuhkan di daerah dengan keterbatasan akses teknologi.³⁹

3. Konsistensi dan Transparansi

Komunikasi harus dilakukan secara konsisten untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat. Informasi yang diberikan juga harus transparan, mencakup rincian tentang tujuan program, kriteria penerima, prosedur pendaftaran, besaran bantuan, serta jalur aduan yang tersedia.⁴⁰

4. Responsif terhadap Umpan Balik

Pemerintah atau penyelenggara program harus membuka ruang partisipasi masyarakat melalui mekanisme umpan balik seperti forum diskusi, survei, layanan pengaduan, atau media sosial. Umpan balik ini menjadi dasar untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program.⁴¹

5. Sensitivitas Sosial dan Budaya

Pesan komunikasi harus disesuaikan dengan norma sosial, budaya, serta nilai-nilai lokal masyarakat. Pendekatan yang sensitif

³⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2020). *Pedoman Komunikasi Publik untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta : Kominfo. Hln. 25-30

⁴⁰ Maria Jose Canel dan Karen Sanders. (2010). *Government Communication : Cases and Challenges*. London : Bloomsbury Academic. Hlm. 18-20

⁴¹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media. Hlm. 140-142

secara budaya akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.⁴²

Dalam program bantuan sosial seperti BLT, penerapan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif akan menunjang peningkatan dalam pemahaman, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendorong keberhasilan implementasi program. Dengan komunikasi yang efektif, bukan hanya distribusi bantuan yang berjalan lancar, tetapi juga akan terjadi peningkatan literasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

C. Makna Strategi Komunikasi Publik

Strategi komunikasi publik adalah suatu cara yang digunakan oleh pemerintah atau instansi untuk mencapai tujuannya melalui komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Strategi komunikasi publik merupakan suatu proses yang sistematis dan juga terstruktur guna mencapai tujuan komunikasi yang meliputi analisis situasi, penetapan tujuan, pengembangan strategi, implementasi, dan evaluasi.⁴³

Strategi komunikasi publik digunakan untuk mengkomunikasikan informasi, ide, dan nilai-nilai kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan atau program.⁴⁴ Dalam konteks program Bantuan Langsung Tunai (BLT), strategi komunikasi publik memiliki peran sentral dalam

⁴² Everett M. Rogers. (2003). *Diffusion of Innovations*. 5th ed. New York : Free Press. Hlm. 18-19

⁴³ Onong Uchjana Effendy. (2003). *Ilmu Komunikasi, Teori, dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 210

⁴⁴ Wiryanto. (2005). *Komunikasi Publik : Teori dan Praktik*. Jakarta : Prenada Media Group. Hlm. 145

memastikan bahwa pesan-pesan utama pemerintah, seperti tujuan bantuan, prosedur pendaftaran, dan kriteria penerima, dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Keberhasilan suatu strategi komunikasi sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu kejelasan pesan, pemilihan media yang tepat, dan pemahaman atas karakteristik audiens. Dalam pelaksanaan program BLT, ketiga aspek ini harus dikolaborasikan agar informasi dapat diterima secara luas dan tidak menimbulkan kebingungan atau bahkan penolakan dari masyarakat.⁴⁵

Selain itu, transparansi dan keterbukaan informasi merupakan elemen penting yang mendukung kepercayaan publik. Kepercayaan ini penting karena menjadi pondasi dari keberhasilan program jangka panjang. Jika masyarakat percaya pada niat baik dan akuntabilitas pemerintah, maka kemungkinan partisipasi mereka dalam mendukung dan memanfaatkan program akan jauh lebih tinggi.⁴⁶ Kemudahan akses informasi juga menjadi bagian integral dari strategi komunikasi publik yang baik. Akses informasi mencakup saluran komunikasi yang digunakan (seperti media massa, media sosial, dan pertemuan langsung), serta penggunaan bahasa dan simbol yang sesuai dengan tingkat literasi masyarakat.⁴⁷ Dalam era digital, strategi ini juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas.

⁴⁵ Onong Uchjana Effendy. *Op.Cit.* Hlm.15

⁴⁶ Denis McQuail. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Salemba Humanika. Hlm.

⁴⁷ Suparno. (2020). *Komunikasi dan Masyarakat Digital*. Jakarta : Gramedia. Hlm. 125

Dengan demikian, strategi komunikasi publik dalam konteks BLT bukan hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, melainkan sebagai sarana membangun legitimasi kebijakan, memperkuat relasi sosial antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan keberlanjutan program bantuan sosial.

D. Strategi Komunikasi Publik dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat

Komunikasi publik tak hanya sebagai aktivitas menyampaikan pesan, melainkan bagian penting dari strategi pemerintahan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan sosial. Dalam konteks program Bantuan Langsung Tunai (BLT) strategi komunikasi publik menjadi kunci keberhasilan, terutama dalam menciptakan pemahaman dan dukungan dari masyarakat penerima manfaat.⁴⁸

Kepercayaan merupakan elemen paling dasar dalam komunikasi publik, yang berperan penting dalam membangun hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, khususnya bantuan sosial seperti BLT PKH di Indonesia dan *Welfare Card* di Thailand, sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah mengelola informasi yang berkaitan dengan program tersebut. Menurut Putnam, kepercayaan sosial merupakan produk dari interaksi yang terbuka, partisipatif, dan terus menerus dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks hubungan antara warga dan institusi publik.⁴⁹

⁴⁸ Robby Aditya Putra, Exsan Adde, and Maulida Fitri. (2023). *Media Dakwah Tiktok untuk Generasi Z*. Ath-Thariq : Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol. 7. No. 1. Hlm. 58-71

⁴⁹ Robert D. Putnam. (2000). *Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community*. New York : Simon & Schuster. Hlm. 19

Salah satu teori yang relevan dalam menjelaskan proses ini adalah *Public Information Model*. Teori *Public Information Model* merupakan salah satu dari empat model komunikasi dalam teori hubungan masyarakat (PR) yang dikembangkan oleh James E. Grunig dan Todd Hunt dalam bukunya *Managing Public Relations*. Model ini berada pada posisi kedua dalam skema perkembangan PR modern, setelah model *Press Agency/Publicity* dan Sebelum *Two-Way Asymmetrical* serta *Two-Way Symmetrical Model*.⁵⁰

Public Information Model menekankan pada penyebaran informasi secara satu arah (*one-way communication*) dari organisasi (dalam konteks ini pemerintah) kepada publik. Tujuannya bukan untuk membujuk atau memanipulasi, melainkan untuk memberikan informasi yang benar, akurat, dan faktual, tanpa adanya distorsi maupun propaganda. Model ini sangat sesuai untuk organisasi yang membutuhkan legitimasi publik melalui transparansi dan kredibilitas komunikasi, seperti pemerintah dalam bantuan sosial.⁵¹

Menurut Grunig dan Hunt, dalam *Public Information Model*, komunikasi dilakukan oleh juru bicara resmi yang bertugas menyampaikan fakta kepada publik. Organisasi bertindak sebagai “penerbit informasi” yang tidak bergantung pada umpan balik langsung dari audiens, tetapi tetap bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berguna bagi masyarakat.⁵²

⁵⁰ James E. Grunig & Todd Hunt. (1984). *Managing Public Relations*. New York : Holt, Rinehart and Winston. Hlm. 21

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 21

⁵² *Ibid.* Hlm. 22

Dalam konteks kebijakan publik dan program sosial (dalam hal ini BLT PKH dan *Welfare Card*), model ini menekankan pada beberapa indikator penting yang akan digunakan untuk menganalisis strategi komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat, yaitu :

1. Transparansi Informasi

Pemerintah bertanggung jawab menyampaikan informasi mengenai program secara terbuka, meliputi tujuan, kriteria, prosedur, hingga evaluasi program. Informasi harus tersedia melalui berbagai saluran komunikasi resmi, bisa dari situs web kementerian, berita lokal, media sosial, atau bahkan aplikasi digital.⁵³

2. Kredibilitas Sumber dan Penyampai Informasi

Public Information Model menekankan bahwa informasi harus berasal dari sumber terpercaya (otoritas pemerintah atau institusi resmi), dan disampaikan oleh komunikator yang kompeten, seperti pejabat atau juru bicara yang paham substansi program.⁵⁴

3. Aksesibilitas Informasi

Masyarakat harus dapat mengakses informasi secara mudah dan setara. Dalam era digital, ini mencakup ketersediaan informasi dalam format daring dan luring, serta dalam bahasa atau bentuk yang sesuai dengan tingkat literasi publik di masing-masing wilayah.⁵⁵

4. Kontinuitas dan Konsistensi Informasi

⁵³ Maria Jose Canel dan Karen Sanders. (2010). *Government Communication : Cases and Challenges*. London : Bloomsbury Academic. Hlm. 57

⁵⁴ Rhenald Kasali. (2003). *Manajemen Public Relations : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : UI Press. Hlm. 96

⁵⁵ Dian Aryani. (2021). *Model Komunikasi Pemerintah dalam Meningkatkan Trust Masyarakat di Era Digital*. Jurnal Komunikasi Pemerintahan. Vol. 6. No. 2. Hlm. 154

Pemerintah harus menyampaikan informasi secara konsisten dari waktu ke waktu agar tidak menimbulkan kebingungan. Penyampaian informasi yang berubah-ubah atau tidak rutin akan melemahkan kepercayaan publik.⁵⁶

5. Kejujuran dan Akurasi Data

Tidak ada ruang untuk manipulasi. Setiap data atau informasi yang disampaikan kepada publik harus sesuai dengan realitas di lapangan, dan apabila terjadi perubahan kebijakan, masyarakat harus segera diberi tahu secara terbuka.⁵⁷

Berdasarkan indikator di atas, teori *Public Information Model* dapat digunakan sebagai kerangka analisis perbandingan strategi komunikasi publik antara Indonesia dan Thailand. Model ini relevan dalam menganalisis bagaimana strategi komunikasi publik pemerintah Indonesia dan Thailand dalam program bantuan sosial dapat membentuk persepsi masyarakat. Kepercayaan publik bukanlah hasil dari sebuah retorika, melainkan dari adanya keterbukaan informasi, kredibel, dan konsisten sebagaimana diusung dalam kerangka *Public Information Model*.

E. Strategi Komunikasi Publik dalam Kemudahan Akses

Kemudahan akses merupakan aspek penting dalam komunikasi publik karena mempengaruhi keterjangkauan informasi yang diberikan kepada masyarakat luas. Menurut Suparno, kemudahan akses adalah salah

⁵⁶ Zahra Avilya Putri dan Evi Priyanti. (2024). *Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan. Vol. 5. No. 2. Hlm. 246

⁵⁷ Onong Uchjana Effendy. (2003). *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 210

satu komponen utama dalam mewujudkan komunikasi yang efektif dan partisipatif. Komunikasi publik yang baik harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di era digital ini, dimana media elektronik menjadi media utama dalam penyampaian informasi.⁵⁸

Dalam penyelenggaraan program bantuan sosial seperti BLT PKH di Indonesia dan *Welfare Card* di Thailand, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya bergantung pada seberapa luas informasi disebar. Yang tak kalah penting adalah masyarakat benar-benar bisa mengakses layanan tersebut secara nyata dan tanpa hambatan. Hal inilah yang dibahas dalam *Theory of Service Accessibility* yang dikembangkan oleh Denis McQuail dalam bukunya "*Mass Communication Theory*".

McQuail menekankan bahwa dalam konteks komunikasi publik, terutama dalam hal layanan terhadap publik, fokus utama bukan hanya menyampaikan pesan, melainkan juga memastikan bahwa publik dapat menerima dan menggunakan layanan dengan mudah dan layak.⁵⁹ Dengan kata lain, komunikasi publik tidak bisa dikatakan berhasil jika masyarakat mengetahui adanya program, tetapi tetap kesulitan mengakses bantuannya.

McQuail menyusun empat aspek utama dalam konsep aksesibilitas layanan (*service accessibility*) yang harus menjadi perhatian dalam komunikasi publik, yaitu :⁶⁰

1. *Availability* (Ketersediaan)

⁵⁸ Suparno. (2020). *Komunikasi dan Masyarakat Digital*. Jakarta : Gramedia. Hlm. 125

⁵⁹ Denis McQuail. (2010). *Mass Communication Theory*. 6th ed. London : SAGE Publications. Hlm. 435-450

⁶⁰ *Ibid*. Hlm. 448-449

Pemerintah harus memastikan bahwa layanan sosial (seperti program BLT PKH dan *Welfare Card*) tersedia merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan marginal. Dalam konteks PKH dan *Welfare Card*, hal ini mencakup pendirian jaringan distribusi bantuan seperti kantor pos, agen bank, atau toko mitra di wilayah-wilayah dengan populasi miskin.

2. *Accessibility* (Kemudahan akses fisik dan prosedural)

Layanan atau bantuan harus mudah diakses secara fisik, termasuk oleh kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, atau masyarakat pedesaan. Aksesibilitas juga mencakup kesederhanaan prosedur pendaftaran dan pencairan bantuan, serta keterbukaan terhadap dukungan langsung dari pemerintah.

3. *Affordability* (Keterjangkauan ekonomi)

Proses mengakses layanan tidak boleh membebani penerima bantuan, baik dalam bentuk biaya transportasi, dokumen tambahan, atau praktik korupsi seperti pemungutan liar. Hal ini penting dalam memastikan program tidak menciptakan *hidden cost* (biaya tersembunyi) bagi masyarakat miskin.

4. *Acceptability* (Penerimaan sosial dan budaya)

Bantuan dan layanan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya lokal penerima bantuan, serta mempertimbangkan keberagaman bahasa dan norma masyarakat setempat.

Dengan memenuhi keempat aspek ini, komunikasi publik tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga mengarahkan masyarakat pada

kemampuan nyata untuk menggunakan layanan dan merasakan manfaatnya secara langsung. Hal ini sangat sejalan dengan pengembangan teori oleh McQuail, bahwa komunikasi publik terutama terkait layanan dalam bantuan sosial tidak boleh hanya fokus pada “memberi tahu” tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses dan menggunakan layanan tersebut secara langsung dan bermakna. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan program pemerintah ditentukan sejauh mana masyarakat merasa dihubungkan dengan layanan tersebut, bukan hanya diberi tahu tentangnya.⁶¹

Hal ini diperkuat oleh pandangan lain dalam studi layanan publik. Menurut Caroline Fisher dan Glen Fuller, dalam kajiannya tentang *Public Service Communication*, akses terhadap bantuan atau layanan menjadi inti dari keadilan sosial.⁶² Mereka menjelaskan bahwa komunikasi publik yang efektif harus berpihak pada kelompok rentan, dan dirancang untuk menghilangkan hambatan sistemik yang mungkin menghalangi mereka dalam mengakses bantuan sosial.

Lebih lanjut, Marius Dragomir dalam *Public Service in the Digital Age*, menegaskan bahwa aksesibilitas layanan menjadi tolak ukur utama dalam mengembangkan kepercayaan publik terhadap negara. Program bantuan yang informatif namun sulit diakses akan gagal secara sosial,

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 435-438

⁶² Caroline Fisher & Glen Fuller. (2020). *Public Service Media and Inclusive Communication*. Media International Australia. Vol. 177. No. 1. Hlm. 20-38

karena komunikasi harus memfasilitasi hubungan langsung antara negara dan warganya.⁶³

Dengan demikian, *Theory of Service Accessibility* dari McQuail relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah menyusun dan mengimplementasikan strategi komunikasi publik dalam program bantuan sosial. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan bantuan, tetapi juga dapat mengakses dan memanfaatkannya tanpa hambatan.

F. Program Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan finansial secara langsung kepada masyarakat, khususnya kepada kalangan yang berada dalam kondisi rentan dan kurang mampu. Kementerian Sosial RI menyatakan bahwa tujuan utama dari BLT adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, terutama pada saat terjadi krisis atau keadaan darurat.⁶⁴

Fokus utama dari Program BLT adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang tergolong miskin dan rentan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-

⁶³ Marius Dragomir. (2021). *Public Service Media in the Digital Age*. CUE Press. Hlm. 66-72

⁶⁴ Kementerian Sosial RI. (2020). *Laporan Tahunan Program Bantuan Langsung Tunai*. Jakarta : Kementerian Sosial RI. Hlm. 15

hari.⁶⁵ Selain itu, BLT juga berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang sering kali menjadi hambatan bagi keluarga yang kurang mampu.

1. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial pertama di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2007 oleh Kementerian Sosial RI. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan antar generasi dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia di atas 60 tahun, atau penyandang disabilitas berat. PKH didesain untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, dengan mengadopsi konsep *conditional cash transfer* (CCT) yang sebelumnya berhasil diterapkan di negara-negara seperti Brasil dan Meksiko.⁶⁶

Pelaksanaan PKH dimulai dengan proses seleksi penerima manfaat yang berbasis pada data terpadu dari Kementerian Sosial, mencakup kelompok rumah tangga yang berada di lapisan bawah tingkat kesejahteraan.⁶⁷ Bantuan ini kemudian disalurkan melalui sistem elektronik menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang memungkinkan penerima manfaat menarik bantuan di bank mitra.⁶⁸

⁶⁵ Ahmad Suharto. (2019). *Analisis Program Bantuan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Andi. Hlm. 22

⁶⁶ Edi Suharto. (2018). *Development of Social Welfare in Indonesia : The Rise of Conditional Cash Transfer*. Routledge Handbook of Sustainable Development in Asia. Hlm. 15

⁶⁷ Asep Suryahadi, Amriyani Yumna, Uus Ruswandi Raya. (2010). *Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Program In Indonesia*. SMERU Research Institute. Hlm. 34

⁶⁸ World Bank. (2016). *Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia*. World Bank Publications. Hlm. 29

Sebagai bagian dari kewajiban, penerima manfaat diharuskan memenuhi beberapa syarat, seperti memastikan anak-anak mereka hadir di sekolah minimal 85% dari waktu belajar, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk ibu hamil dan balita, serta memberikan perhatian khusus kepada anggota keluarga yang lanjut usia atau memiliki disabilitas berat.⁶⁹

Hasil dari program ini menunjukkan dampak yang signifikan. Tercatat adanya peningkatan kehadiran anak-anak dari keluarga miskin di sekolah dasar sebesar 12%. Selain itu, program ini mendorong masyarakat untuk lebih sering mengakses layanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan balita.⁷⁰ Bank Dunia juga mencatat bahwa PKH berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan hingga 1,2% per tahun, sekaligus mendorong inklusi keuangan melalui pengenalan layanan perbankan kepada kelompok miskin.⁷¹

Pendampingan sosial yang dilakukan oleh pendamping PKH turut menjadi salah satu elemen penting dalam memberdayakan masyarakat melalui edukasi mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan hidup sehat.⁷² Namun, pelaksanaan PKH menghadapi beberapa tantangan, seperti hambatan geografis di wilayah terpencil yang menyulitkan distribusi bantuan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan program, serta kecenderungan beberapa penerima

⁶⁹ Agoeng Noegroho dan Tri Nugroho Adi. (2024). *The Role of Companion Communication in the Cognitive Achievement of Family Members of the Indonesian Conditional Cash Transfer Program*. Pakistan Journal of Life and Social Sciences. Hlm. 4712

⁷⁰ Edi Suharto. (2018). *Op.Cit.* Hlm. 25

⁷¹ Cecile Holmemo, Pablo Acosta, dan Rodrigo J Palacios. (2020). *Investing in People : Social Protection for Indonesia's 2045 Vision*. ResearchGate. Hlm. 35

⁷² Maria Prima Soejachmoen. (2016). *Financial Inclusion in Indonesia : Moving Towards a Digital Payment System*. Spinger. Hlm. 12

manfaat untuk bergantung pada bantuan tanpa berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi.⁷³

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah diharuskan untuk memperkuat strategi komunikasi publik guna memastikan informasi terkait program dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, penggunaan teknologi digital dapat membantu dalam memonitor kepatuhan penerima manfaat, sementara program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan atau akses modal usaha, dapat mendorong kemandirian penerima manfaat.⁷⁴

2. *Welfare Card*

Welfare Card di Thailand merupakan kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini mulai diterapkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Keuangan Thailand sebagai bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial. Fokusnya adalah memberikan bantuan yang terarah, transparan, dan berbasis teknologi kepada penerima manfaat.⁷⁵

Program ini dirancang untuk memberikan subsidi berbasis kebutuhan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan utama *Welfare Card* adalah meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi

⁷³ Asep Suryadi, Asep Suryahadi, Amriyani Yumna, Uus Ruswandi Raya. (2010). *Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Program In Indonesia*. SMERU Research Institute. Hlm. 39

⁷⁴ Edi Suharto. (2018). *Op.Cit*. Hlm. 30

⁷⁵ JD London. (2018). *Welfare Clientelism in Thailand*. Dalam *Welfare and Inequality in Marketizing East Asia*. Springer. Hlm. 75-80

beban biaya hidup sehari-hari, dan memperluas akses mereka terhadap layanan dasar seperti pangan, transportasi, dan utilitas rumah tangga.⁷⁶

Welfare Card di Thailand memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya sebagai salah satu program bantuan sosial yang efektif. Pertama, transparansi tinggi menjadi salah satu daya tarik utama dari program ini. Dengan menggunakan teknologi berbasis chip elektronik, setiap transaksi penerima manfaat dicatat secara *real-time*, sehingga meminimalkan risiko korupsi atau penyalahgunaan dana.⁷⁷

Kedua, kartu ini meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan dasar seperti subsidi pangan, diskon transportasi dan bantuan tagihan utilitas rumah tangga. Fasilitas ini membantu penerima manfaat mengurangi beban biaya hidup secara signifikan.⁷⁸ Selain itu, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Sebagian besar toko mitra yang menerima transaksi dari *Welfare Card* adalah usaha kecil yang beroperasi di tingkat komunitas. Hal ini tidak hanya memberikan akses mudah bagi masyarakat tetapi juga mendukung roda perekonomian lokal.⁷⁹

Namun demikian, program ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah ketergantungan pada teknologi. Banyak penerima manfaat, terutama mereka yang lanjut usia atau tidak

⁷⁶ Cristopher Beaton, L Lontoh, & M Wa-Poi. (2017). *Social Assistance and Subsidy Reforms in Thailand*. ResearchGate. Hlm. 123-130

⁷⁷ JD London. (2018). *Op.Cit.* 75-80

⁷⁸ C Beaton, dkk. (2020). *Op.Cit.* Hlm. 140-145

⁷⁹ *Ibid.* Hlm. 123-130

memiliki literasi digital yang memadai, menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan kartu ini secara optimal.⁸⁰

Selain itu, keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil menjadi kendala lain, karena tidak semua daerah memiliki toko atau fasilitas dengan sistem *Welfare Card*. Masalah validasi data yang lambat juga sering menjadi perhatian, karena data yang tidak diperbarui menyebabkan beberapa penerima manfaat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan justru tidak terdaftar.⁸¹

Kedua program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat miskin. Namun demikian, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara efektif dan merata. Komunikasi publik berperan penting dalam memastikan bahwa informasi mengenai syarat, prosedur, dan tujuan program bantuan tersampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya penerima manfaat yang umumnya memiliki keterbatasan dalam akses informasi.⁸²

Selain itu, komunikasi publik juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyampaian informasi yang transparan dan terbuka dapat meminimalisir isu negatif seperti politisasi bantuan atau

⁸⁰ M Van Diermen.(2018). *Digital Divide and Welfare Access in Thailand*. Adelaide University. Hlm. 120-130

⁸¹ *Ibid*. Hlm. 50-60

⁸² Muhammad Nasution. (2013). *Manajemen Komunikasi Publik*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 87

distribusi yang tidak adil.⁸³ Oleh karena itu, komunikasi publik yang dirancang secara strategis menjadi bagian integral dari keberhasilan program-program bantuan sosial termasuk BLT PKH di Indonesia dan *Welfare Card* di Thailand.

⁸³ Rachmat Dwi Kurniawan. (2021). *Komunikasi Pemerintah dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik. Vol. 9. No. 1. Hlm. 14-15

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti objek secara ilmiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan memanfaatkan berbagai sumber data. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengembangkan teori atau memahami permasalahan yang kompleks dalam konteks sosial tertentu.⁸⁴

Dalam penelitian yang akan dilakukan, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena komunikasi publik dalam konteks BLT di Indonesia (PKH) dan Thailand (*Welfare Card*) secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi berdasarkan data tekstual dan naratif yang relevan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi komparasi, yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam fenomena komunikasi publik dalam konteks BLT di dua negara berbeda, yaitu Indonesia (PKH) dan Thailand (*Welfare Card*). Menurut Surakhmad, studi komparasi adalah pendekatan deskriptif yang berupaya menganalisis

⁸⁴ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 9

hubungan sebab akibat dengan membandingkan faktor-faktor dalam situasi tertentu.⁸⁵

Penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Thailand dalam program BLT, untuk menemukan kesamaan dan juga perbedaan dalam mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Studi komparasi digunakan karena metode ini mampu memberikan analisis mendalam terhadap objek penelitian melalui data primer dan sekunder.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian melalui kajian pustaka, analisis data primer dan sekunder, serta sumber-sumber terpercaya. Oleh karena itu, lokasi penelitian dapat difokuskan pada sumber informasi terkait kebijakan dan implementasi Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan (BLT PKH) di Indonesia dan program *Welfare Card* di Thailand. Penelitian awal dilakukan pada bulan Januari 2025.

D. Objek Penelitian

Objek yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah konteks BLT PKH dan *Welfare Card* studi komparasi antara Indonesia dan Thailand.

E. Sumber Data

Sumber data adalah referensi atau acuan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh

⁸⁵ Winarno Surakhmad.(1994). *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung : Tarsito. Hlm. 143

langsung dari objek penelitian. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari pihak lain, seperti dokumen, laporan, dan publikasi. Menurut Sugiyono, sumber data adalah elemen penting dalam penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi melalui metode tertentu.⁸⁶

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dengan observasi secara digital, peneliti dapat mengamati fenomena yang terjadi melalui platform digital.

Untuk program BLT PKH yang ada di Indonesia peneliti akan menggunakan data yang bersumber dari situs resmi Kementerian Sosial RI (<https://kemensos.go.id/>), aplikasi mobile dan akun resmi media sosialnya. Begitupun program *Welfare Card* yang ada di Thailand, peneliti akan mengunjungi situs resmi dari Kementerian Keuangan Thailand (<https://mof.go.th/>), Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (www.m-society.go.th/), aplikasi mobile dan juga akun resmi media sosialnya.

Peneliti menggunakan situs resmi, aplikasi mobile dan akun resmi media sosial sebagai data primer karena mereka sumber terpercaya yang mewakili instansi pemerintah, sehingga datanya valid dan dapat diandalkan. Selain itu, informasi yang ada pada situs resmi, aplikasi mobile dan akun resmi media sosial mencerminkan

⁸⁶ Sugiyono. *Op. Cit.* Hlm. 308

komunikasi publik pemerintah secara langsung, relevan untuk menganalisis pola komunikasi program sosial.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah ada sebelumnya dan menjadi data pendukung dari data primer. Sumber data sekunder mencakup laporan media massa, jurnal atau artikel, dan buku yang relevan. Data-data tersebut diperoleh dari studi pustaka tanpa melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan.⁸⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik observasi dan teknik dokumentasi. Kedua teknik ini dipilih untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dalam penelitian.

1. Teknik Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan strategi komunikasi publik yang diterapkan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia dan Thailand. Meskipun tidak dilakukan secara langsung di lapangan, peneliti memanfaatkan berbagai media komunikasi publik yang ada, seperti laporan atau *website* resmi, artikel atau jurnal ilmiah, media sosial, dan siaran lokal yang berisi informasi tentang pelaksanaan BLT di kedua negara.

⁸⁷Lexy J Moleong. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 46

Sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono, observasi tidak selalu harus dilakukan secara langsung, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara mengamati berbagai sumber informasi yang tersedia di sumber-sumber tertulis atau digital yang berkaitan dengan topik penelitian.⁸⁸ Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan berbagai laporan yang diterbitkan oleh pemerintah kedua negara, *website* resmi, media sosial, siaran lokal, buku, jurnal atau artikel ilmiah untuk mengidentifikasi pola komunikasi publik terkait pelaksanaan BLT.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang relevan, seperti kebijakan pemerintah, laporan resmi, media sosial, artikel berita, serta materi-materi yang mengulas pelaksanaan BLT di Indonesia dan Thailand. Data-data ini akan memberikan gambaran mengenai cara kedua negara menyampaikan informasi kepada publik tentang program BLT, serta bagaimana strategi komunikasi tersebut diterima dan diinterpretasikan oleh masyarakat.

Menurut Arikunto, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang relevan dan dapat mendukung analisis dalam penelitian.⁸⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan kebijakan BLT dan komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Thailand. Tentunya dokumentasi yang peneliti maksud ialah berupa

⁸⁸ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 148

⁸⁹ Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 183

gambar yang menjadi bahan bukti fisik dari berbagai sumber informasi yang relevan terhadap konteks penelitian.

Secara keseluruhan, penggunaan teknik observasi dan dokumentasi dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang luas mengenai komunikasi publik dalam konteks BLT yang sesuai dengan tujuan untuk melihat dan menganalisis perbandingan strategi komunikasi publik antara Indonesia dan Thailand.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengorganisir, mengelompokkan, dan menafsirkan data yang telah terkumpul selama penelitian. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab masalah penelitian dan menggambarkan temuan secara jelas dan objektif. Dalam analisis data, peneliti akan mengolah informasi yang diperoleh untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang tersembunyi dalam data, sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan lebih baik.⁹⁰

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemilahan, atau pengelompokan data yang terkumpul dalam penelitian, yang bertujuan untuk menekankan informasi penting dan relevan terhadap tujuan

⁹⁰ Sugiyono. *Op.Cit.* Hlm.246

penelitian.⁹¹ Dalam konteks penelitian ini, yang membandingkan strategi komunikasi publik terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia dan Thailand, reduksi data dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti tidak perlu mengumpulkan data langsung melalui observasi atau wawancara, melainkan bisa menganalisis data primer dan data sekunder yang sudah tersedia yang tentunya berasal dari sumber terpercaya.

2. Display Data

Display data atau penyajian data adalah proses pengorganisasian dan penyajian data yang telah dianalisis dalam bentuk yang mudah dipahami, baik secara visual maupun tekstual. Tujuannya adalah untuk menyajikan hasil analisis dalam format yang jelas dan sistematis agar pembaca dapat memahami informasi yang terkandung dalam data tersebut dengan lebih mudah.

Menurut Sugiyono, penyajian data dapat berupa tabel, gambar, atau uraian yang dirancang sedemikian rupa untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai hasil analisis data yang telah dilakukan. Proses ini sangat penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan hasil penelitiannya dengan cara yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.⁹²

⁹¹ Deddy Mulyana. (2000). *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 87

⁹² Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hlm.245

Sesuai dengan apa yang akan diteliti nanti, peneliti akan memanfaatkan data yang sudah ada, baik dalam bentuk laporan, dokumen, artikel, maupun hasil survei yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah, organisasi internasional, atau lembaga penelitian lainnya. Data yang diperlukan bisa berupa laporan terkait program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia dan Thailand, analisis kebijakan, serta publikasi dari badan-badan pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang membahas strategi komunikasi publik terhadap program. Dengan demikian, peneliti dapat mengkaji lebih dalam data yang sudah didapatkan sesuai dengan metode yang ditetapkan guna menindaklanjuti untuk nantinya menuju kepada permasalahan yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam konteks penelitian merujuk pada proses menyimpulkan hasil analisis data yang telah diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Sugiyono, penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menguji kecocokan temuan dengan data yang ada, dan membuat penafsiran yang tepat berdasarkan konteks penelitian. Hal ini bertujuan agar kesimpulan yang dihasilkan akurat dan dapat diterima secara ilmiah. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif biasanya mengacu pada pemahaman yang mendalam terhadap data, tanpa adanya generalisasi yang berlebihan.⁹³

⁹³ *Ibid.* Hlm.105

Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan tetap didasarkan pada analisis data yang diperoleh dari proses pengumpulan data sebelumnya, yang disajikan secara sederhana dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.⁹⁴ Hal ini memiliki tujuan untuk menemukan persamaan dan juga perbedaan terkait permasalahan terkait, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Pada umumnya, tahap ini disajikan sebagai sebuah bentuk inti sari dari hasil pembahasan yang sudah peneliti lakukan, lalu disajikan secara singkat untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil akhir dari penelitian secara jelas.

⁹⁴ Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Gabungan*. Jakarta : Kencana. Hlm. 149

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan melalui mekanisme bantuan langsung tunai bersyarat atau *conditional cash transfer*. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 oleh Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu.⁹⁵

BLT PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 tahun 2018. Peraturan ini ditetapkan guna mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat dengan maksud untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga yang miskin dan rentan. Penyaluran bantuan ini merupakan satu langkah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang di alami masyarakat.⁹⁶

Tujuan utama dari PKH adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan memperbaiki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan

⁹⁵ Edi Suharto. (2018). *Development of Social Welfare in Indonesia : The Rise of Conditional Cash Transfer*. Routledge Handbook of Sustainable Development in Asia. Hlm. 15

⁹⁶ Kementerian Sosial RI. (2019). *Petunjuk Teknis : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 03/LJS/01/2019 Tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019*. Hlm. 6

antar generasi. Model layanan seperti ini diadaptasi dari program serupa yang sukses diterapkan di Brasil dengan nama “Bolsa Familia” dan di Meksiko melalui program “Oportunidades”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suharto, pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.⁹⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk memberikan manfaat kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria khusus. Data penerima manfaat diambil dari basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kini telah beralih ke DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Sosial) sejak Maret 2025 yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sistem DTKS memastikan bahwa bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.⁹⁸ Berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Sosial, besaran bantuan yang diterima oleh keluarga miskin bervariasi, mulai dari Rp900.000 hingga Rp3.000.000 per tahap pencairan, tergantung pada kategori penerima manfaat.⁹⁹

Berikut peneliti sajikan tabel yang berisi kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jumlah besaran bantuan yang diterima agar memudahkan pembaca dalam memahaminya :

⁹⁷ *Ibid.* Hlm. 15

⁹⁸ Asep Suryahadi, Amriyani Yumna, Uus Ruswandi Raya. *Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Program In Indonesia*. SMERU Research Insitute. Hlm. 34

⁹⁹ Kementerian Sosial RI. (2020). *Laporan Tahunan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta : Kementerian Sosial RI. Hlm. 25

Tabel 4.1

Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

No.	Kategori KPM	Indeks/Tahun (Rp)	Indeks/4 Bulan (Rp)
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2.	Anak Usia Dini	3.000.000	750.000
3.	Anak Sekolah Dasar (SD)	900.000	225.000
4.	Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.500.000	375.000
5.	Anak Sekolah Menengah Atas (SMA)	2.000.000	500.000
6.	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000
7.	Lanjut Usia 70+	2.400.000	600.000

Sumber : Kementerian Sosial RI

Tahapan pendaftaran untuk menjadi penerima BLT PKH diawali dengan pengajuan oleh calon penerima kepada pemerintah desa setempat. Dalam proses ini, calon penerima membawa dokumen berupa KTP dan Kartu Keluarga sebagai syarat administratif. Pihak desa kemudian mengusulkan data calon penerima kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).¹⁰⁰ Setelah pengajuan diterima, Dinas Sosial melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap data

¹⁰⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Jakarta : Kemensos RI

yang masuk. Proses ini mencakup penilaian kondisi sosial, ekonomi, dan demografi calon penerima bantuan.¹⁰¹ Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa calon penerima memenuhi kriteria, data tersebut akan dikirim ke Kementerian Sosial untuk proses penetapan. Kementerian Sosial menetapkan penerima berdasarkan kuota bantuan yang tersedia serta kesesuaian dengan kebijakan pusat.¹⁰²

Setelah ditetapkan secara resmi, mekanisme penyaluran BLT PKH dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan rekening bank penerima. Pencairan bantuan ini dilakukan di kantor pos terdekat atau melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, atau BTN. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses penyaluran bantuan tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.¹⁰³ Penyaluran bantuan dilakukan dalam tiga atau empat tahap setiap tahunnya, yakni pada Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Jadwal pencairan yang teratur membantu penerima manfaat mengatur pengelolaan keuangan mereka untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁰⁴ Berikut peneliti berikan tampilan dari KKS.¹⁰⁵

¹⁰¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Panduan Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta : Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

¹⁰² Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. (2022). *Pedoman Umum Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)*. Jakarta : Kemensos RI

¹⁰³ World Bank. (2016). *Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia*. World Bank Publications. Hlm. 29

¹⁰⁴ Asep Suryahadi. dkk. *Review of Government 's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Program in Indonesia*. SMERU Research Institute. Hlm. 34

¹⁰⁵ <https://www.peguyangankangindenpasarkota.go.id/artikel/syarat-dan-cara-daftar-kartu-keluarga-sejahtera-kks>. Diakses pada 11 Januari 2025

Gambar 4.1

Kartu Keluarga Sejahtera



Sumber foto : peguyangankangin.denpasarkota.go.id

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu identitas penerima manfaat yang dikeluarkan oleh bank penyalur yang tergabung dalam Himbara.¹⁰⁶ Menurut Suryahadi, penggunaan KKS juga mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat miskin, karena penerima manfaat mulai terbiasa menggunakan layanan pemerintah untuk kebutuhan finansial mereka.

Pelaksanaan PKH melibatkan pendamping sosial yang bertugas mendampingi keluarga penerima manfaat dalam memenuhi persyaratan program. Pendamping ini memberikan edukasi terkait pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pemanfaatan layanan sosial lainnya.¹⁰⁷ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Holmemo, keberadaan pendamping sosial merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan program PKH karena membantu meningkatkan

¹⁰⁶ Kementerian Sosial RI. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2023*. Jakarta : Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Hlm. 15

¹⁰⁷ Agoeng Noegroho dan Tri Nugroho Adi. (2024). *The Role of Companion Communication in the Cognitive Achievement of Family Members of the Indonesian Conditional Cash Transfer Program*. Pakistan Journal of Life and Social Sciences. Hlm. 4712

pemahaman masyarakat terhadap program.¹⁰⁸ Selain itu, pendamping sosial juga berperan dalam memantau kepatuhan penerima manfaat terhadap kewajiban yang telah ditetapkan, seperti memastikan kehadiran anak di sekolah dan ibu hamil menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala.¹⁰⁹

BLT PKH juga melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan untuk memastikan integrasi layanan sosial. Anak-anak dari keluarga penerima manfaat didorong untuk memanfaatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), sementara ibu hamil diarahkan untuk mengakses layanan kesehatan yang tersedia di Puskesmas. Menurut penelitian Suharto, pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.¹¹⁰

Komunikasi publik juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan BLT PKH. Pemerintah menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyebarkan informasi tentang program ini, termasuk media massa, media sosial, dan pendekatan interpersonal melalui pendamping sosial.¹¹¹ Menurut Effendy, komunikasi publik yang efektif memerlukan kejelasan pesan, pemilihan media yang

¹⁰⁸ Cecila Holmemo, Pablo Acosta, Rodrigo J. Palacios. (2020). *Investing in People : Social Protection for Indonesia's 2045 Vision*. ResearchGate. Hlm. 35

¹⁰⁹ *Ibid.* Hlm.35

¹¹⁰ Edi Suharto. *Development of Social Welfare in Indonesia*. Hlm. 25

¹¹¹ Denis McQuail. (2010). *Mass Communication Theory*, 6th ed. London : Sage Publications. Hlm. 123

tepat, serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik audiens.¹¹² Dalam konteks geografis Indonesia yang luas dan beragam, kombinasi strategi komunikasi tersebut membantu menjangkau masyarakat miskin di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil.

Dalam mekanisme yang terstruktur dan dukungan dari berbagai sektor, BLT PKH telah menjadi salah satu program bantuan sosial paling signifikan di Indonesia. Keberadaan program ini tidak hanya membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga mendukung tujuan pembangunan sosial yang lebih luas. Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan BLT PKH dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperkuat sistem pengawasan guna mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹¹³

2. *Welfare Card Thailand*

Welfare Card Thailand merupakan salah satu kebijakan sosial yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Hingga tahun 2024, program ini telah mengalami berbagai pembaruan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung masyarakat rentan.¹¹⁴

¹¹² Onong Uchjana Effendy. (2003). *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 15

¹¹³ Maria Prima Soejachmoen. (2016). *Financial Inclusion in Indonesia : Moving Towards a Digital Payment System*. Springer. Hlm. 12

¹¹⁴ Phuwana Sriratanaphin. *Social Welfare Policies in Thailand : Analysis of the Welfare Card Scheme*. Journal of Asian Social Policy. Vol. 21. Hlm. 158

Tingginya tingkat ketimpangan ekonomi di Thailand tercermin dari nilai Koefisien Gini sebesar 43,3% yang menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata.¹¹⁵ Data dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa 10% penduduk terkaya menguasai lebih dari 40% pendapatan nasional, sedangkan 20% penduduk termiskin hanya memperoleh 5% dari pendapatan tersebut.¹¹⁶ Selain itu, pada tahun 2024, sebanyak 5,4% populasi Thailand hidup di bawah kemiskinan. Mayoritas mereka tinggal di daerah pedesaan yang bergantung pada sektor agraris, dengan akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.¹¹⁷

Welfare Card hadir dan memiliki fungsi serta tujuan bukan hanya sekadar alat pembayaran, melainkan sistem multifungsi untuk berbagai layanan kesejahteraan, seperti :

a. Subsidi Pangan

Setiap penerima manfaat dapat membeli barang kebutuhan pokok di toko mitra pemerintah menggunakan dana yang diberikan pada kartu. Subsidi ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, dan gula tetap terjangkau.¹¹⁸

¹¹⁵ Andri Prasetyo. (2021). *Kesenjangan Sosial di Negara Berkembang : Studi Kasus Thailand*. Jakarta : Penerbit Ilmu Ekonomi. Hlm. 88

¹¹⁶ World Bank. (2024). *Thailand Economic Monitor, Unlocking the Growth Potential of Secondary Cities*. Bank Dunia. Hlm. 12

¹¹⁷ World Bank. (2022). *The Road to Recovery in Thailand*. Bank Dunia. Hlm. 40

¹¹⁸ Cristopher Beaton, L Lontoh, dan M Wai-Poi. (2017). *Social Assistance and Subsidy Reforms in Thailand*. ResearchGate. Hlm. 123-130

b. Diskon Transportasi

Pemegang kartu mendapat diskon untuk transportasi umum, seperti bus, kereta api, dan kapal feri. Hal ini membantu masyarakat miskin mengurangi biaya mobilitas sehari-hari.¹¹⁹

c. Subsidi Utilitas Rumah Tangga

Welfare Card juga memberikan bantuan langsung untuk tagihan listrik dan air. Tujuannya adalah meringankan beban biaya hidup rumah tangga miskin.¹²⁰

d. Bantuan Tambahan

Pemerintah menyediakan tambahan dana untuk kebutuhan khusus, seperti pembayaran biaya kesehatan atau pendidikan, bagi pemegang kartu yang memenuhi kriteria tambahan.¹²¹

Gambar 4.2

Welfare Card



Sumber foto : bangkokpost.com

Pemerintah Thailand, melalui Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya, menetapkan sejumlah kriteria ketat agar

¹¹⁹ M Van Diermen. (2018). *Welfare in Transition : The Political Economy of Social Protection Reform in Thailand*. Adelaide University. Hlm. 50-60

¹²⁰ World Bank. (2020). *Targeting Poor and Vulnerable Households in Thailand*. World Bank Report. Hlm.10-15

¹²¹ Cristopher Beaton, L Lontoh, dan M Wai-Poi. (2017). *Op.Cit.* 123-130

penerima manfaat tepat sasaran seperti yang ada di Indonesia. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendaftar, antara lain :

a. Kewarganegaraan Thailand

Pendaftar harus memiliki status sebagai warga negara Thailand yang sah secara hukum. Hal ini dibuktikan dengan kartu identitas nasional yang masih berlaku.

b. Usia Minimal 18 Tahun

Program ini hanya dapat diikuti oleh individu yang telah mencapai usia dewasa secara hukum, yakni 18 tahun ke atas.

c. Batasan Pendapatan

Pendapatan tahunan tidak boleh melebihi 100.000 Baht. Kriteria ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa bantuan hanya diterima oleh mereka yang benar-benar berada dalam kategori ekonomi rendah.¹²² Jumlah bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat juga bervariasi sesuai dengan tingkat pendapatan yakni :¹²³

1. Pendapatan di bawah 30.000 Baht/tahun akan mendapatkan 300 Baht/bulan.
2. Pendapatan 30.000-100.000 Baht/tahun akan mendapatkan 200 Baht/bulan.

d. Batasan Aset

Selain pendapatan, pemerintah juga memperhitungkan kepemilikan aset terdaftar, seperti :

¹²² Thai Health Promotion Foundation. (2018). *The Thai Welfare Card : Is it Really Inclusive Growth ?*. Hlm. 59-60. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025 dari https://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/ThaiHealth2018/eng2018_18.pdf

¹²³ *Op.Cit.* Hlm. 75-80

1. Simpanan di bank tidak melebihi 100.000 Baht
 2. Tidak memiliki properti atau kendaraan mewah
 3. Tidak memiliki obligasi, saham, atau instrumen keuangan lainnya yang nilainya signifikan.
- e. Kepemilikan Rumah dan Kendaraan

Jika pendaftar memiliki tanah atau rumah, nilainya harus dalam batas wajar yang ditentukan. Kendaraan pribadi yang dimiliki, seperti mobil atau sepeda motor, juga menjadi bagian dari penilaian aset.

Ketentuan ini bertujuan untuk menyeleksi dengan cermat siapa yang berhak menerima bantuan, sehingga program tidak salah sasaran dan dapat menekan ketimpangan sosial secara lebih efektif.¹²⁴

Proses pendaftaran sebagai penerima *Welfare Card* terdiri dari beberapa tahapan sistematis yang dirancang untuk menjamin akurasi data serta transparansi. Berikut tahapan yang dijalankan :

a. Pengumuman Masa Pendaftaran

Pemerintah secara resmi mengumumkan periode pendaftaran melalui media massa, situs kementerian, dan kantor distrik. Umumnya, pendaftaran dibuka setahun sekali atau mengikuti kebijakan fiskal pemerintah.¹²⁵

¹²⁴ Office of National Economic and Social Development Council. (2018). *Thailand's State Welfare Card Project : Framework and Conditions*. Hlm. 18.

¹²⁵ Kebijakan fiskal ialah suatu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah melalui pengaturan pendapatan (seperti pajak) dan pengeluaran negara (belanja publik) untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Dalam konteks program Welfare Card, kebijakan ini penting dalam menentukan

b. Pengumpulan dan Penyampaian Dokumen

Pendaftar wajib menyiapkan dokumen berikut :

1. Kartu identitas nasional (ID Card)
2. Bukti alamat domisili, seperti tagihan air atau listrik
3. Surat keterangan pendapatan dari lembaga resmi atau atasan kerja
4. Informasi rekening bank dan pernyataan aset.

c. Tempat dan Cara Pendaftaran

1. Secara langsung (offline) : Melalui Bank Krungthai, kantor distrik, atau pos pemerintah yang ditunjuk
2. Secara daring (online) : Melalui platform pendaftaran resmi yang disediakan Kementerian Keuangan. Opsi ini berlaku pada gelombang tertentu dan bertujuan untuk menjangkau masyarakat perkotaan yang memiliki akses internet.¹²⁶

d. Proses Verifikasi

1. Data yang masuk akan diverifikasi oleh tim lintas lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, dan Bank Krungthai.
2. Verifikasi mencakup pencocokan data kependudukan, catatan perbankan, dan aset yang dimiliki.

alokasi anggaran untuk subsidi sosial serta menetapkan batasan kuota dan waktu pendaftaran. Mankiw, N. Gregory. (2015). *Principles of Economics*. Edisi ke 7. Stamford : Cengage Learning. Hlm. 730

¹²⁶ Ministry of Finance Thailand. (2022). *Welfare Card Registration Handbook*. Hlm. 12

3. Pendaftar yang lolos verifikasi akan menerima pemberitahuan resmi dan kartu akan dicetak serta dikirim ke alamat yang terdaftar.

Verifikasi ini bersifat ketat untuk mencegah praktik kecurangan, dan waktu pemrosesan dapat berlangsung antara dua minggu hingga satu bulan, tergantung jumlah pendaftar dan kelengkapan dokumen yang diserahkan.¹²⁷

Sebagai langkah inovatif, *Welfare Card* menggunakan teknologi berbasis chip elektrik yang mencatat semua transaksi penerima manfaat secara real-time. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk memantau penggunaan subsidi secara akurat, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Selain itu, data yang dikumpulkan melalui sistem ini digunakan untuk mengevaluasi program dan membuat kebijakan berdasarkan bukti yang valid.¹²⁸

Komunikasi publik berperan penting dalam keberhasilan implementasi program *Welfare Card*. Pemerintah Thailand menggunakan berbagai media untuk menyebarkan informasi tentang manfaat program ini, seperti televisi pemerintah dan siaran lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi tentang

¹²⁷ UNICEF Thailand. (2022). *Formative Evaluation of the State Welfare Card Policy in Thailand*. hlm. 11-12

¹²⁸ Christopher Beaton, L Lontoh, M Wai-Poi. (2020). *Social Welfare Policies in Southeast Asia*. ResearchGate. Hlm. 140-145

kartu ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.¹²⁹

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi Komunikasi Publik dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan faktor krusial dalam keberhasilan program bantuan sosial. Strategi komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat memegang peranan vital dalam mendukung keberhasilan implementasi program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dan *Welfare Card* di Thailand. Dalam konteks ini, komunikasi publik berperan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan, mekanisme, manfaat, serta hak dan kewajiban dalam program sosial tersebut. Pemahaman yang baik akan mendorong penerimaan yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi dari penerima manfaat.

Kepercayaan publik tidak hanya dibentuk melalui hasil kebijakan semata, tetapi juga melalui bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan secara terbuka, jujur, dan tepat sasaran. Salah satu pendekatan yang relevan dalam hal ini adalah *Public Information Model* yang dikemukakan oleh James E. Grunig dan Todd Hunt. Model ini menekankan komunikasi satu arah dari organisasi kepada

¹²⁹ Bunyaporn Phoothong, Anuch Nampinyo, & Wiriya Boonmalert. (2023). *Creation Of Marketing Strategies For Government Welfare Shops That Affects Purchasing Decisions In Pathum Thani Province, Thailand*. International Academic Multidisciplinary Research Conference In Seoul

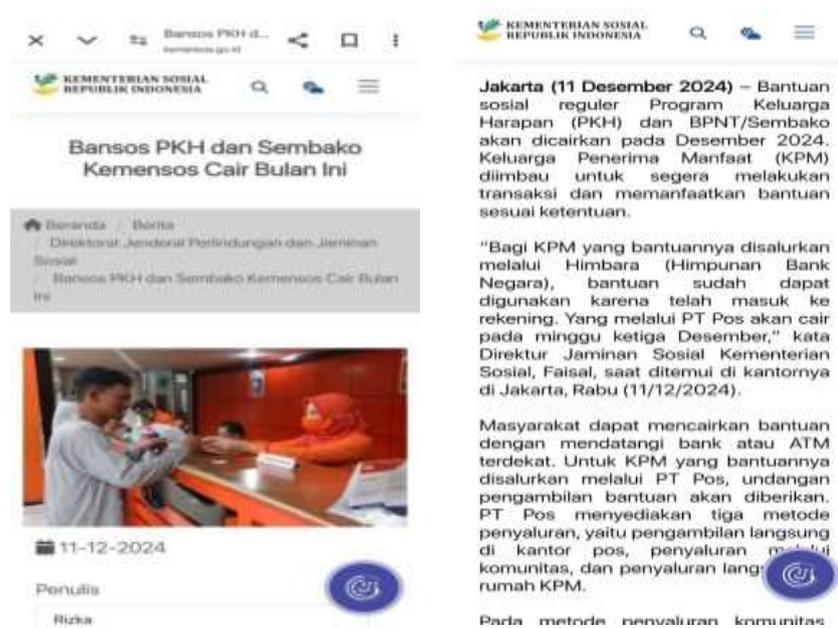
publik dengan tujuan utama memberikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa adanya manipulasi.¹³⁰

a. Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Indonesia dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian dari temuan mengenai strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan (BLT PKH). Penelitian ini mengacu pada teori *Public Information Model* dari Grunig dan Hunt, yang menekankan pentingnya komunikasi satu arah yang bersifat informatif dan akurat dalam membentuk opini publik.

Gambar 4.3

Artikel berita terkait BLT PKH



¹³⁰ James E. Grunig dan Todd Hunt. (1984). *Managing Public Relations*. New York : Holt, Rinehart and Winston. Hlm. 22-23

pada tanggal 11 Desember 2024.¹³¹ Ditemukan bahwa pemerintah menerapkan strategi komunikasi satu arah yang bersifat informatif dan transparan. Informasi disampaikan secara luas melalui media daring resmi, yang menjelaskan waktu pencairan, jalur distribusi bantuan, besaran dana yang diterima, serta cara verifikasi penerima melalui situs resmi Kemensos. Penyampaian informasi ini menjadi dasar utama dalam membangun kepercayaan publik, karena menunjukkan bahwa pemerintah bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan terhadap bantuan yang akan diberikan.

Salah satu poin penting yang peneliti lihat dalam berita ini yaitu pemanfaatan media digital dan tidak lupa dalam berita disebut juga situs web *cekbansos.kemensos.go.id*. Hal ini sangat memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Informasi yang diberikan juga tidak hanya menyangkut teknis, tetapi juga dilengkapi dengan imbauan moral dari pihak Kementerian Sosial, agar bantuan digunakan secara bijak dan tidak disalahgunakan untuk pembelian barang yang tidak produktif, seperti rokok. Meskipun komunikasi ini dilakukan secara satu arah, pesan-pesan ini menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab sosial pemerintah dalam membentuk perilaku publik yang rasional dalam penggunaan bantuan.

¹³¹ <https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-perlindungan-dan-jaminan-sosial/bansos-pkh-dan-sembako-kemensos-cair-bulan-ini>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2025

Pendekatan ini sesuai dengan teori *Public Information Model* dari Grunig dan Hunt, di mana lembaga publik yang dalam hal ini Kementerian Sosial menyampaikan informasi secara faktual kepada masyarakat tanpa unsur manipulasi atau persuasi langsung. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemahaman publik yang lebih baik terhadap program yang dijalankan. Dalam hal ini, Kemensos RI tidak hanya menyebarluaskan informasi, tetapi juga membangun kredibilitas melalui konsistensi pesan dan aksesibilitas informasi yang tinggi. Hal ini berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan kebijakan yang diterapkan.

Peneliti juga mendapati adanya segmentasi pesan yang jelas dalam berita di atas. Seperti informasi mengenai besaran bantuan dibedakan menurut kategori penerima, yaitu ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lansia. Hal ini mencerminkan kepekaan pemerintah dalam menyampaikan pesan yang relevan sesuai kebutuhan audiensnya. Dengan memberikan informasi yang terperinci dan spesifik, pemerintah tidak hanya menunjukkan transparansi, tetapi juga meningkatkan pemahaman publik akan keadilan dalam bentuk besaran distribusi bantuan.

Selain itu, transparansi dalam proses pencairan yang melibatkan bank milik negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah

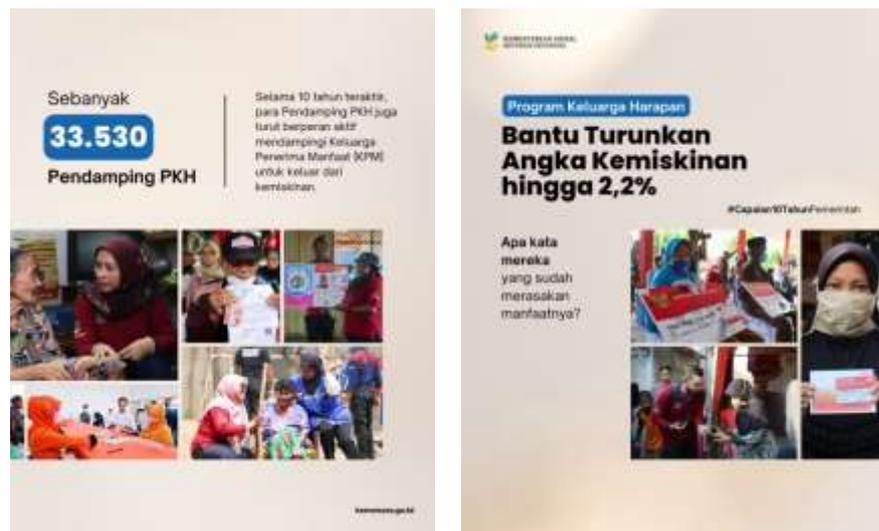
terpencil. Informasi tentang metode pencairan, mulai dari penyaluran melalui komunitas hingga layanan langsung ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas, menjadi bentuk konkret dari komunikasi publik yang responsif terhadap konteks sosial dan geografis Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam hal membangun kepercayaan publik, pemerintah juga memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk *screenshot* :

Gambar 4.4

Unggahan Facebook Kemensos RI





Sumber foto : Facebook resmi Kemensos RI

Berdasarkan data yang ada pada gambar 4.4 di atas, yang merupakan unggahan dari Facebook resmi Kementerian Sosial RI pada tanggal 15 Oktober 2024, terlihat bahwa pemerintah aktif melakukan penyebaran informasi melalui media sosial untuk menjangkau khalayak luas. Unggahan tersebut menekankan keberhasilan program PKH dalam menurunkan angka kemiskinan secara nasional, memperlihatkan data sebesar 2,2% dan narasi

berupa testimoni dari penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia, seperti Raja Ampat dan Bunaken. Strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan saluran digital tidak hanya untuk menyampaikan program-program sosial, tetapi juga untuk membangun narasi keberhasilan yang dapat memengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap program BLT PKH.¹³²

Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah melalui konten visual, infografis, dan narasi ini merupakan bentuk konkret dari penerapan pendekatan *Public Information Model*. Pemerintah bertindak sebagai sumber informasi yang kredibel dengan tujuan meningkatkan pemahaman publik tentang kebijakan sosial yang sedang dijalankan. Dalam konteks ini, kepercayaan dibangun melalui tiga poin utama, yaitu transparansi, representasi data yang akurat, dan penyampaian kisah nyata dari lapangan. Hal ini tampak dalam pernyataan penerima manfaat seperti, “Puji Tuhan lewat bantuan, anak-anak bisa sekolah ke tempat yang mereka belum pernah lihat sebelumnya” (Herlina, KPM Raja Ampat) dan “Anak saya bisa kuliah. Kita juga diberi pengetahuan tentang mengelola uang dan perbaikan gizi” (Erna, KPM Bunaken).

Pernyataan-pernyataan ini bukan hanya sekadar testimoni, tetapi juga menjadi alat komunikasi yang memperkuat pengakuan program serta memperlihatkan dampak positif yang nyata dari

¹³² Akun Facebook resmi Kementerian Sosial RI.

keikutsertaan program sosial pemerintah. Ini merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan publik, karena publik tidak hanya melihat angka dan statistik, tetapi juga melihat wajah-wajah dan cerita nyata dari mereka yang terdampak secara positif oleh program tersebut.

Selain menyampaikan dampak langsung dari program, terlihat juga pemerintah menyoroti dan menampilkan aspek struktural dari pelaksanaan program, seperti keterlibatan 33.530 pendamping PKH dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hal ini memberikan gambaran kepada publik bahwa program ini dijalankan secara sistematis dan terstruktur, dengan dukungan dari tenaga pendamping di lapangan yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menampilkan peran pendamping dalam konten visual ini, Kementerian Sosial RI secara tidak langsung membentuk citra program yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas.

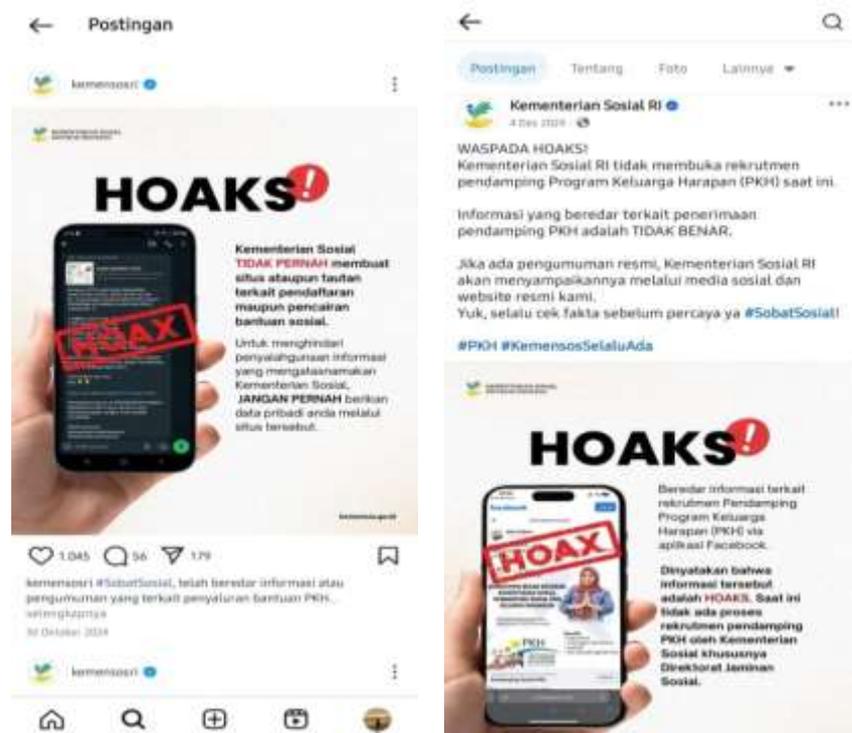
Dalam perspektif *Public Information Model*, pendekatan semacam ini memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam konteks program pemerintah yang membutuhkan kepercayaan publik untuk mendukung keberhasilannya. Komunikasi ini bersifat informatif dan berbasis data, sehingga dapat meminimalkan potensi disinformasi dan memperkuat akuntabilitas institusional. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat penyampaian semata, tetapi juga berperan dalam membentuk

persepsi publik bahwa pemerintah hadir dan bertanggung jawab dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Strategi komunikasi publik yang ditunjukkan dalam unggahan tersebut juga menunjukkan sinergi antara isi pesan dan media penyampaiannya. Dengan memanfaatkan media sosial menggambarkan adanya adaptasi pemerintah terhadap pola komunikasi informasi masyarakat yang semakin digital. Hal ini penting untuk dicatat karena keterbukaan informasi tidak lagi hanya cukup melalui media konvensional (seperti Televisi dan Radio), tetapi juga harus disalurkan melalui platform yang mudah diakses dan bersifat interaktif secara visual.

Gambar 4.5

Pemberitahuan Berita Hoaks



Sumber foto : Instagram dan Facebook resmi Kemensos RI

Berdasarkan pengumpulan data melalui media sosial resmi Kementerian Sosial RI, terdapat dua unggahan yang peneliti jadikan objek analisis. *Pertama*, unggahan pada akun Instagram @kemensosri tanggal 30 Oktober 2024 yang menanggapi penyebaran pesan hoaks di WhatsApp mengenai tautan pendaftaran bantuan PKH tahap 3. Dalam unggahan tersebut, Kementerian Sosial RI dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak pernah membuat situs atau tautan pendaftaran bantuan, dan mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi ke situs yang tidak resmi. Disertakan pula tangkapan layar konten hoaks dengan cap merah “HOAKS” sebagai bentuk visualisasi klarifikasi.¹³³

Kedua, unggahan pada akun Facebook resmi Kementerian Sosial RI tanggal 04 Desember 2024, membantah adanya proses rekrutmen pendamping PKH yang beredar melalui Facebook. Dalam unggahan tersebut, Kementerian Sosial RI menyatakan bahwa informasi terkait rekrutmen tersebut adalah tidak benar, dan menjelaskan bahwa pengumuman resmi hanya akan disampaikan melalui media sosial dan situs web resmi pemerintah. Visualisasi yang digunakan pun serupa, yakni gambar hoaks yang ditandai secara tegas, memberikan penekanan visual agar masyarakat lebih waspada.¹³⁴

¹³³ Akun resmi Instagram Kementerian Sosial RI @kemensosri

¹³⁴ Akun resmi Facebook Kementerian Sosial RI

Penerapan pendekatan *Public Information Model* dari Grunig dan Hunt oleh Kementerian Sosial RI terlihat jelas melalui langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam menangani isu hoaks. *Pertama*, strategi komunikasi yang digunakan berorientasi pada keterbukaan informasi. Pemerintah secara aktif memproduksi konten klarifikasi dalam bentuk visual dan teks untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penyampaian informasi ini tidak hanya menasar aspek substansi, tetapi juga memperhatikan bentuk dan kanal komunikasi yang relevan dengan target audiens, yaitu melalui platform digital seperti Instagram dan Facebook yang memang sering digunakan oleh masyarakat luas.

Kedua, Kementerian Sosial RI tidak sekadar membantah informasi hoaks, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga preventif. Dengan memasukkan elemen literasi digital dalam pesan komunikasinya, pemerintah turut membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan informasi digital.

Ketiga, strategi komunikasi publik ini juga memperlihatkan responsivitas pemerintah terhadap dinamika informasi yang cepat menyebar di era digital. Dalam waktu yang relatif singkat setelah hoaks menyebar, pemerintah langsung merespons dengan

memberikan klarifikasi resmi. Ketepatan waktu ini sangat penting dalam mempertahankan kepercayaan publik dan mencegah meluasnya disinformasi yang dapat merusak reputasi institusi maupun program bantuan yang sedang dijalankan. Selain itu, penggunaan bahasa yang tegas namun komunikatif juga menjadi bagian dari strategi komunikasi publik. Pemerintah memilih pendekatan komunikatif yang dekat dengan masyarakat, seperti menggunakan ajakan (Jangan pernah berikan data pribadi Anda !) dan tagar seperti #BersatuLawanHoaks dan #SobatSosial yang mendorong keterlibatan dan kepercayaan publik.

b. Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Thailand dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian sekaligus membahas temuan mengenai bagaimana strategi komunikasi publik pemerintah Thailand dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program *Welfare Card*. Analisis dalam hal ini didasarkan pada pendekatan teori *Public Information Model* dari Grunig dan Hunt yang menekankan pentingnya penyampaian informasi secara satu arah, transparan, dan akurat dari pemerintah kepada masyarakat.

Pembahasan akan peneliti sajikan dengan mengaitkan data dari sumber terpercaya dengan teori komunikasi publik. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana bentuk komunikasi yang

dilakukan oleh pemerintah mampu menciptakan persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program yang diterapkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi komunikasi publik dalam konteks kebijakan sosial dalam hal ini *Welfare Card* di Thailand.

Gambar 4.6

Berita Terkait *Welfare Card*

what do you want?...

MSDHS Ministry of Social Development and Human Security

ข่าวภารกิจ

หน้าหลัก / ข่าวสาร / ข่าวภารกิจ

วราวุธ รรมว.พม. ย้ำคนพิการ เช็คลิทธิรับเงินหมื่น-แก้อັบตรให้ถูกต้อง ก่อน 3 ธ.ค. 67

ณัฐชา พันธุ์อุบล / 29/10/2567 / 1711 / 0

วันที่ 29 ตุลาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลได้เพิ่มเงิน 10,000 บาท ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ ไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา สำหรับคนพิการที่มี

สวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ ไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา สำหรับคนพิการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 โดยคนพิการที่มีสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 2,219,489 ราย กรณีที่กรมบัญชีกลางจ่ายเงินให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ไม่สำเร็จในครั้งแรก (วันที่ 25 ธ.ค. 67) ดำเนินการจ่ายเงินซ้ำ (Retry) ครั้งที่ 1 รอบวันที่ 21 ตุลาคม 2567 โดยให้ดำเนินการแก้ไขบัตรประจำตัวคนพิการให้ถูกต้องภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2567 , ครั้งที่ 2 รอบวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ให้ดำเนินการแก้ไขบัตรประจำตัวคนพิการให้ถูกต้องภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 และครั้งที่ 3 รอบวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ให้ดำเนินการแก้ไขบัตรประจำตัวคนพิการให้ถูกต้องภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2567

หากคนพิการที่เงินยังไม่เข้าบัญชี สาเหตุเกิดจาก คนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุหรือ ข้อมูลในบัตรไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ (บัตรเก่าชำรุด/สมุดประจำตัวคนพิการ) หรือให้ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัด)

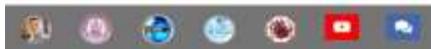
2.คนพิการที่มีสิทธิตามคุณสมบัติตามกำหนดแต่ไม่มีข้อมูลการรับเบี้ยความพิการ โดยสถานเช่น ไม่มีช่องทางการจ่ายเงิน โดยให้เปิดบัญชีพร้อมเหยื่อผูกกับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 หรือยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

2. คนพิการที่มีสิทธิตามคุณสมบัติตามกำหนดแต่ไม่มีข้อมูลการรับเบี้ยความพิการ โดยสถานเซ็นไม่มีช่องทางกาจ่ายเงิน โดยให้เปิดบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 หรือยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิลำเนาสามทะเบียนบ้านภายใน 28 พฤศจิกายน 2567 และกรณีคนพิการที่เคยรับเบี้ยความพิการเป็นเงินสด โดยให้ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาเพื่อขอรับเงินในโครงการฯ เป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม ขอเป็นย่ำว่า ให้เร่งดำเนินการแก้ไขบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2567 เพื่อรักษาสิทธิโครงการฯ

ขอให้คนพิการตรวจสอบสิทธิของตนเองเบื้องต้นได้ง่ายๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วกรอกเลขบัตรประจำตัวคนพิการ และกดตรวจสอบ หรือคลิก <https://govwelfare.dep.go.th/>

นอกจากนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300
- ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ
- Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2270 6400
- ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2109 2345
- ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (ทุกวัน 24 ชั่วโมง) โทรศัพท์หมายเลข 0 2109 2345 กด 1 กด 5



MSDHS Ministry of Social Development and Human Security

Berita Misi

Halaman beranda / pesan / Berita Misi

Varawut, Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, menghimbau para penyandang disabilitas untuk memeriksa kelayakan mereka untuk menerima 10.000 baht dan memperbaiki kartu mereka sebelum 3 Desember 2024.

Natida Phanchuaphet / 29/10/2024 / tahun 1675 / Cetak halaman ini / angka 0

Pada tanggal 29 Oktober 2024, di Gedung Pemerintah, Bapak Varawut Silpa-archa, Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (MSDHS), memberikan wawancara kepada pers sebelum rapat kabinet bahwa pemerintah telah mulai mentransfer 10.000 baht dalam proyek stimulus ekonomi untuk tahun 2024 melalui pemegang kartu kesejahteraan negara dan penyandang disabilitas. Pada tanggal 25 September 2024, bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk mengikuti proyek ini, mereka harus merupakan penyandang disabilitas yang memiliki kartu identitas penyandang disabilitas paling lambat tanggal 31 Agustus 2024. Total penyandang disabilitas yang memenuhi syarat adalah 2.219.489 orang. Dalam hal Departemen Pengawas Umum membayar uang kepada orang cacat yang memenuhi syarat. Apabila tidak berhasil pada percobaan pertama (25 Sep 2024), maka lakukan pembayaran (Ulangi) pertama kali pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan cara memperbaiki kartu identitas disabilitas paling lambat tanggal 10 Oktober 2024, kedua kali pada tanggal 21 November 2024 dengan cara memperbaiki kartu identitas disabilitas paling lambat tanggal 12 November 2024, dan ketiga kali pada tanggal 19 Desember

2024 dengan cara memperbaiki kartu identitas disabilitas paling lambat tanggal 3 Desember 2024.

Jika penyandang cacat belum menerima uang ke rekeningnya Penyebabnya adalah karena:

1. Penyandang disabilitas yang kartu identitas disabilitasnya telah kedaluwarsa atau yang informasi pada kartunya tidak lengkap atau salah. Dengan melakukan pembedulan data hingga lengkap (Kartu lama atau rusak/Buku Identitas Penyandang Disabilitas) atau memperbarui Kartu Identitas Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Penyandang Disabilitas mana pun di seluruh Indonesia. (Kantor Pengembangan Sosial dan Keamanan Manusia Provinsi yang bertempat di aula provinsi)

2. Penyandang disabilitas yang mempunyai hak sesuai kualifikasi yang ditentukan tetapi tidak mempunyai informasi tentang penerimaan tunjangan disabilitas. Berdasarkan status tidak ada saluran pembayaran dengan membuka akun PromptPay yang ditautkan dengan nomor ID nasional Anda paling lambat 16 Desember 2024 atau mengajukan permintaan untuk menerima tunjangan disabilitas Di organisasi administratif setempat di alamat terdaftar

dalam waktu 28 November 2024 dan dalam kasus penyandang disabilitas yang sebelumnya menerima tunjangan disabilitas dalam bentuk tunai Dengan menghubungi organisasi pemerintah setempat tempat Anda terdaftar untuk menerima uang proyek dalam bentuk tunai. Namun, ditegaskan agar Anda mempercepat proses perubahan kartu identitas penyandang disabilitas paling lambat tanggal 3 Desember 2024 untuk mempertahankan hak proyek.

Memungkinkan penyandang disabilitas untuk dengan mudah memeriksa hak awal mereka Cukup pindai kode QR Kemudian masukkan nomor kartu identitas penyandang disabilitas dan tekan periksa atau klik <https://govwelfare.dep.go.th/>

Selain itu, Anda dapat menanyakan lebih detail di

- Hotline Pusat Bantuan Sosial, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, hubungi 1300.
- Pusat Layanan Disabilitas Nasional
- Call Center, Departemen Pengawas Keuangan, nomor telepon 0 2270 6400
- Nomor Telepon Pusat Layanan Pelanggan Kartu Kesejahteraan Pemerintah 0 2109 2345
- Pusat Layanan Pelanggan Kartu

Kesejahteraan Pemerintah Melalui sistem respons otomatis (24 jam sehari), hubungi 0 2109 2345, tekan 1, lalu 5.

#BurmaBerita #Burma #SRS #esshelpm
#1300 #WarawutListensAndDoesIt
#PMO puas dengan semua umur di MOMO.
#Satu-satunya orang Burma #Penyandang cacat #Sepuluh ribu baht



Sumber foto : website resmi MSDHS

Program *Welfare Card* merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan sosial pemerintah Thailand yang ditujukan untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Melalui pemberitaan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand (*ministry of sosial development and human security*) yang dipublikasi pada 29 Oktober 2024, peneliti mendapati berita yang berisi informasi bahwa pemerintah telah mentransfer 10.000 bhat kepada penerima *Welfare Card* dan penyandang disabilitas tahun 2024. Informasi ini untuk menghimbau para pemegang kartu kesejahteraan dan penyandang disabilitas agar memeriksa kelayakan mereka menerima bantuan tersebut dan memperbaiki kartu identitas tersebut sebelum 3 Desember 2024.¹³⁵ Dari hal ini, terlihat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga secara aktif membangun persepsi publik melalui komunikasi yang terbuka dan transparan.

Strategi komunikasi ini sesuai dengan pendekatan *Public Information Model* yang dikembangkan oleh Grunig dan Hunt. Dalam konteks ini, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia bertindak sebagai komunikator yang menyampaikan informasi kebijakan secara langsung kepada masyarakat melalui website resminya, yaitu *Ministry of Social Development and Human Security* (MSDHS) yang dapat diakses di

¹³⁵ <http://www.m-society.go.th/home.php> . Diakses pada 23 Mei 2025

<https://www.m-society.go.th/home.php> , yang memiliki kredibilitas tinggi dan juga jangkauan yang luas.

Langkah untuk mengkaji ulang kelayakan penerima manfaat dan menghimbau penerima merupakan bentuk strategi komunikasi publik yang strategis. Pemerintah Thailand secara sadar menginformasikan kepada masyarakat bahwa mereka akan menyalurkan 10.000 bath kepada pemegang kartu kesejahteraan dan penyandang disabilitas serta menghimbau untuk segera memeriksa kelayakan kartu guna memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Penyampaian informasi ini bukan sekadar pengumuman bersifat administratif, melainkan bagian dari upaya membentuk opini publik bahwa pemerintah memiliki mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap pelaksanaan kebijakan sosialnya.

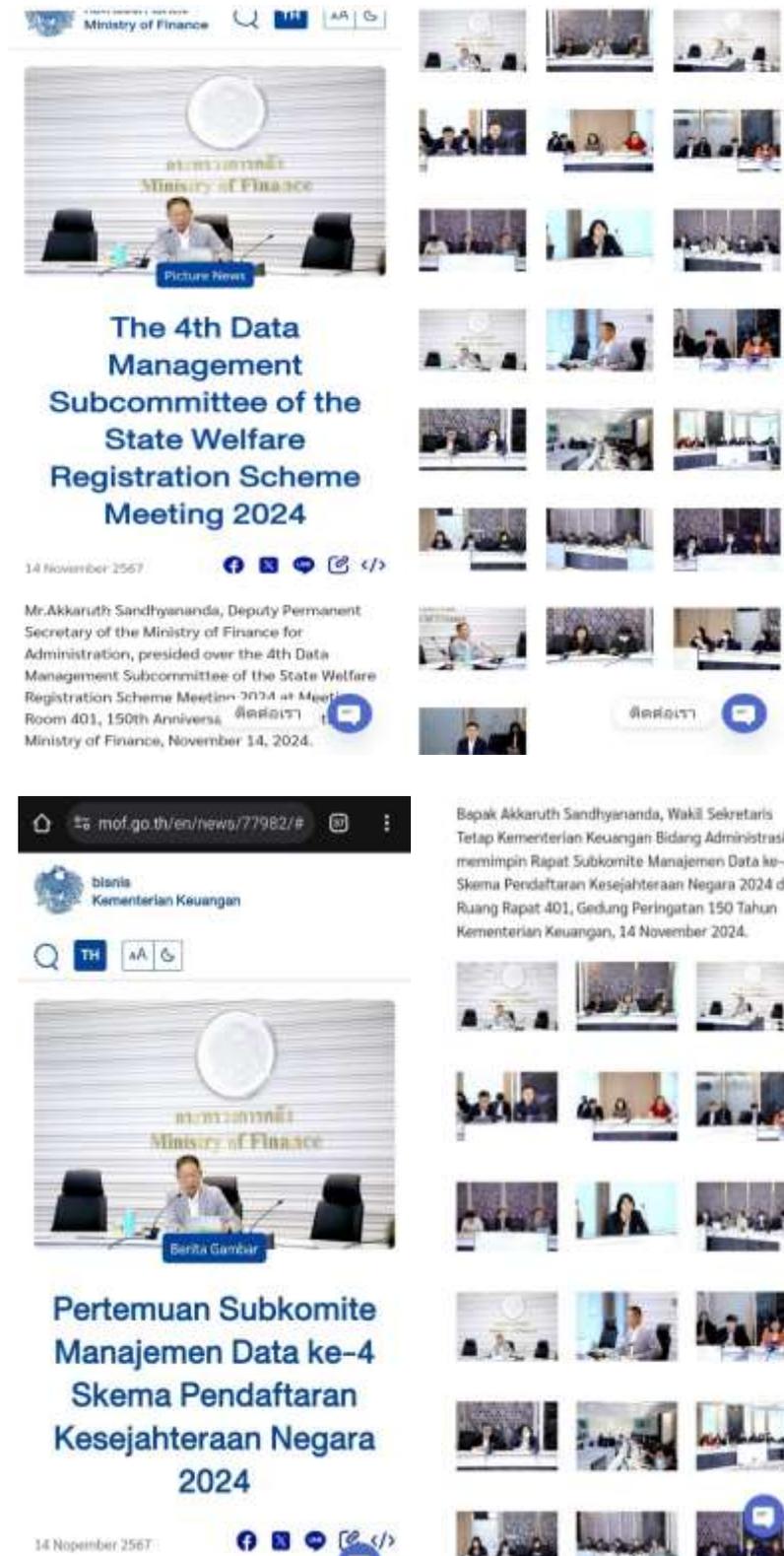
Selain itu, strategi ini juga berfungsi untuk merespons potensi ketidakpercayaan publik terhadap akurasi penyaluran bantuan. Dengan melakukan himbauan dan penyaluran sebesar 10.000 bath kepada penyandang disabilitas, pemerintah menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas. Hal ini berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat, karena pemerintah tidak menutup-nutupi persoalan dan justru terbuka terhadap perbaikan sistem. Penyampaian informasi ini juga memperkuat keberadaan pemerintah dalam melaksanakan program kesejahteraan, karena publik diajak untuk memahami bahwa ada

proses rasional dan terukur dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan.

Model komunikasi publik ini juga menekankan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya harus secara substansi, tetapi juga harus dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami oleh publik. Dalam hal ini, artikel dari website resmi Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand di atas menyajikan berita dengan gaya penulisan yang informatif dan netral, sehingga memudahkan masyarakat untuk menangkap pesan utama dari pemerintah. Media berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi, yang selaras dalam teori *Public Information Model*.

Program bantuan di Thailand pada proses pendaftaran penerima *Welfare Card* atau kartu kesejahteraan di sampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan sedangkan untuk proses seleksi dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia. Berikut peneliti sajikan gambar yang menunjukkan bahwa Kementrian Keuangan sedang melakukan pertemuan untuk melakukan skema pendaftaran Kartu Kesejahteraan (*Welfare Card*) 2024 sebagai berikut :

Gambar 4.7
Berita Terkait *Welfare Card*



Sumber foto : website resmi Kementerian Keuangan Thailand

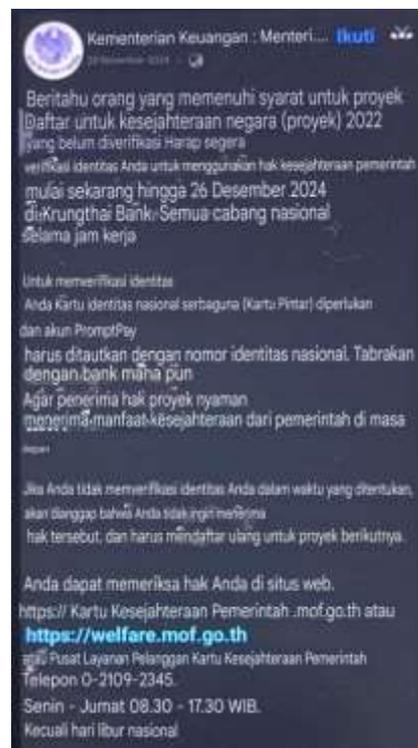
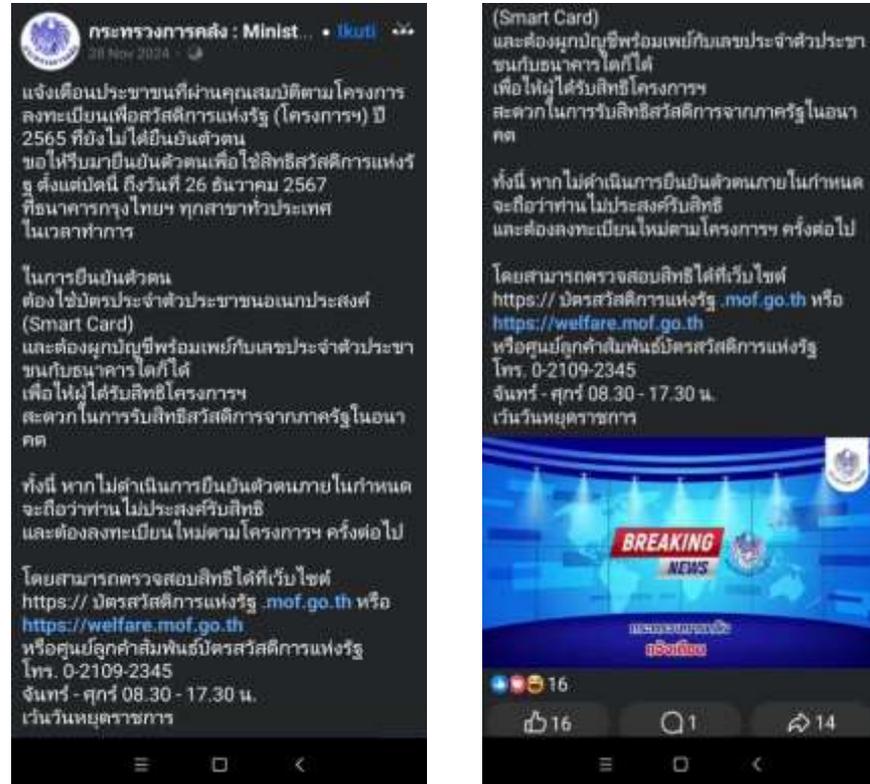
Berdasarkan berita resmi yang diterbitkan pada tanggal 14 November 2024 oleh Website resmi Kementerian Keuangan di atas, peneliti menemukan upaya Kementerian Keuangan Thailand menyampaikan informasi bahwa mereka sedang melakukan pertemuan subkomite guna untuk manajemen data skema pendaftaran kartu kesejahteraan negara Thailand 2024.¹³⁶ Dipimpin langsung oleh Wakil Sekretaris Tetap Kementerian Keuangan Bidang Administrasi, rapat Subkomite Manajemen Data ke-4 skema pendaftaran Kartu Kesejahteraan Negara Thailand 2024 dapat dilihat dari gambar di atas berlangsung dengan lancar dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat negara Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah secara terbuka dalam mengambil kebijakan yang baik dalam menjalankan program bantuan sosial kepada masyarakat.

Selain itu pemerintah negara Thailand juga menyampaikan sebuah informasi mengenai *Welfare Card* melalui media sosial Facebook resmi milik Kementrian Keuangan Thailand. Gambar akan peneliti sajikan sebagai berikut :

¹³⁶ <https://mof.go.th/en/news/77982>. Diakses pada 23 Mei 2025

Gambar 4.8

Unggahan Facebook Resmi Kementerian Keuangan Thailand



Sumber foto : akun Facebook resmi Kementerian Keuangan Thailand

Berdasarkan unggahan yang dipublikasikan melalui akun resmi Facebook Kementerian Keuangan Thailand pada 28 November 2024, peneliti melihat bagaimana upaya pemerintah menyampaikan pemberitahuan penting kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat dalam program *Welfare Card* tahun 2022/2565 namun belum melakukan verifikasi identitas.¹³⁷ Dalam unggahan Facebook ini, memuat informasi seperti batas waktu verifikasi (26 Desember 2024/2567), lokasi verifikasi (seluruh cabang Bank Krungthai), dokumen yang dibutuhkan (kartu identitas dan nomor rekening bank), serta konsekuensi jika tidak mengikuti proses tersebut, yaitu dianggap tidak bersedia menerima bantuan dan harus mendaftar ulang di periode berikutnya.

Strategi komunikasi publik yang ditampilkan dalam unggahan ini mencerminkan prinsip utama dari pendekatan *Public Information Model*, yaitu penyampaian informasi yang benar dan transparan tanpa upaya membujuk atau mempengaruhi opini masyarakat. Dalam pendekatan ini, pemerintah bertindak sebagai sumber informasi yang kredibel, dan masyarakat sebagai penerima informasi. Salah satu aspek penting dalam strategi ini adalah adanya penggunaan media sosial sebagai saluran penyebaran informasi. Dengan memanfaatkan platform Facebook, pemerintah menunjukkan pemahaman terhadap perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak mengakses berita

¹³⁷ Akun resmi Facebook Kementerian Keuangan Thailand

melalui media digital. Hal ini memperlihatkan adanya adaptasi komunikasi publik terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus memperluas jangkauan audiens secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, dengan gaya visual dalam unggahan tersebut juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyampaikan informasi. Penggunaan format *breaking news* sebagai awal pembuka dan latar belakang video yang diunggah tersebut menjadi ciri khas berita resmi yang memberikan kesan bahwa pesan ini penting, mendesak, dan perlu segera disikapi oleh masyarakat. Elemen seperti ini memperkuat citra institusi pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menyalurkan informasi secara profesional.

Tak hanya itu, dalam unggahan tersebut pemerintah juga memberikan akses lanjutan bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan dan konsultasi. Terdapat informasi mengenai situs web serta nomor call center yang dapat dihubungi pada hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model komunikasi yang digunakan bersifat satu arah, pemerintah tetap menyediakan fasilitas pendukung yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi tambahan apabila diperlukan. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan informasi benar-benar sampai pada semua lapisan masyarakat.

Melalui pendekatan komunikasi yang terbuka, informatif, dan terstruktur ini, pemerintah Thailand berusaha membangun kepercayaan masyarakat terhadap program *Welfare Card*. Masyarakat diberi pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh bantuan. Dengan kata lain, kepercayaan tidak dibangun melalui persuasi, melainkan melalui kejelasan informasi dan keandalan institusi sebagai penyampai pesan.

c. Analisis Perbandingan

Dalam konteks komunikasi publik, pendekatan *Public Information Model* dari Grunig & Hunt menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat, faktual, dan satu arah dari lembaga atau institusi kepada masyarakat untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Model ini tidak bertujuan untuk memanipulasi publik, melainkan untuk mengedukasi melalui transparansi, kejelasan pesan, dan juga konsistensi dalam komunikasi.¹³⁸

Dengan demikian, analisis studi komparatif yang peneliti sajikan ini digunakan untuk melihat strategi komunikasi publik antara pemerintah Indonesia dan Thailand dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program BLT PKH dan *Welfare Card* berdasarkan lima indikator utama dalam *Public Information Model*, yaitu transparansi informasi, kredibilitas sumber informasi,

¹³⁸James E. Grunig & Todd Hunt. (1984). *Managing Public Relations*. New York : Holt, Rinehart and Winston. Hlm. 21

aksesibilitas informasi, kontinuitas dan konsistensi informasi, serta kejujuran dan akurasi data.

1. Transparansi Informasi

Pemerintah Indonesia menyampaikan informasi program BLT PKH melalui situs resmi Kementerian Sosial RI, media sosial, serta adanya keterlibatan pendamping PKH di berbagai wilayah. Penyampaian informasi ini dilakukan secara terbuka, berulang, dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri dan Hartono yang menyatakan bahwa transparansi informasi dalam program PKH Indonesia berdampak positif terhadap perspektif publik terhadap integritas publik, terutama ketika informasi disampaikan oleh kanal resmi secara berulang dan mudah dipahami.¹³⁹

Berbeda halnya dengan Indonesia, pemerintah Thailand lebih menggunakan teknologi digital, mulai dari melalui institusi resmi pemerintah (Kementerian Keuangan dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia), hingga media sosial dalam menyampaikan informasi secara sistematis mengenai program *Welfare Card*. Hal ini sejalan dengan penelitian Rattanawong, Saelim, dan Jirasatienpong yang menyebutkan bahwa keterbukaan informasi digital melalui sistem *Welfare Card* berkontribusi secara signifikan

¹³⁹ Dinda Ayu Putri dan Yudhistira Hartono. (2023). *Multi-channel Communication Strategy in Social Assistance Programs : A Study on PKH in Indonesia*. Jurnal Komunikasi dan Masyarakat. Vol. 9. No. 2. Hlm. 101-115.

terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat Thailand terhadap sistem perlindungan dan sosial di negaranya.¹⁴⁰

2. Kredibilitas Sumber dan Penyampai Informasi

Di Indonesia, penyampai informasi (komunikator) yang utama adalah Kementerian Sosial RI dan para pendamping PKH yang telah dilatih untuk memberikan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan di Thailand, informasi tentang program *Welfare Card* disampaikan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan dan Keamanan Manusia, dan menggandeng lembaga keuangan negara (Krungthai Bank) yang dipercaya untuk menyampaikan dan menyalurkan bantuan.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Muhammad Danish Khan, Siti Nor Balkish Zakaria, dan Muhammad Saeed, yang menegaskan bahwa keberadaan sumber informasi yang berasal dari institusi pemerintah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan sosial.¹⁴¹

3. Aksesibilitas Informasi

Pemerintah Indonesia menyediakan informasi melalui pendekatan yang beragam, mulai dari media daring seperti media sosial, dan juga luring seperti kegiatan penyuluhan oleh

¹⁴⁰ Pimsiri Rattawong, Tinnapat Saelim & Thanaporn Jirasatienpong. (2023). *Digital Governance and Trust in Welfare Systems : Evidance from Thailand*. Asian Journal of Public Affairs. Vol. 25. No. 1. Hlm. 45-62

¹⁴¹ Mohammad Danish Khan, Siti Nor Balkish Zakaria, dan Muhammad Saeed. (2021). *Institutional Communication and Public Trust in Welfare Programs*. Journal of Public Sector Communication. Vol. 5. No. 1. Hlm. 45-60

pendamping PKH untuk menjangkau masyarakat dengan karakteristik yang beragam. Begitupun dengan Thailand, pemerintah Thailand juga menggunakan pendekatan melalui kanal digital seperti situs resmi pemerintah, dan media sosial. Namun bedanya, pemerintah Thailand tidak menggunakan sistem komunitas seperti Indonesia dengan adanya keberadaan pendamping PKH, akan tetapi lebih bersifat digital.

Dalam hal ini, selaras dengan penelitian dari Raza dan Goyal yang menyatakan bahwa penggunaan saluran digital yang terintegrasi dalam pelayanan/kebijakan sosial mampu meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah melalui kemudahan akses informasi dan ketepatan informasi.¹⁴²

4. Kontinuitas dan Konsistensi Informasi

Pemerintah Indonesia menyampaikan informasi program BLT PKH secara berkala mengikuti jadwal tahunan penyaluran atau pencairan bantuan (empat kali dalam setahun). Disisi lain, pemerintah Thailand juga melakukan pembaruan data informasi mengenai *Welfare Card* secara konsisten melalui media daring atau saluran digital dan pengumuman kepada publik secara elektronik.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Faqih dan Komariah yang membuktikan bahwa konsistensi penyampaian informasi

¹⁴² Hafiz Raza dan Priya Goyal. (2022). *E-Government Platforms and Citizens' Trust in Social Assistance*. International Journal of E-Government Studies. Vol. 4. No. 3. Hlm. 87-103

ini menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.¹⁴³

5. Kejujuran dan Akurasi Data

Di Indonesia, informasi mengenai program BLT PKH mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data basis penerima, yang telah mengalami penyempurnaan dan diverifikasi secara berkala. Sedangkan di Thailand, informasi terkait program *Welfare Card* dikelola menggunakan sistem terintegrasi yang berbasis elektronik atau digital untuk nantinya disampaikan kepada penerima manfaat.

Sejalan dengan penelitian oleh Rahul Singh, Siriphong Limsombunchai, dan K.P. Chan, yang menyatakan bahwa kejujuran dan akurasi data dalam informasi akan mendorong kepercayaan masyarakat.¹⁴⁴

Untuk lebih cepat dan mudah dalam memahami analisis perbandingan di atas, peneliti juga menyajikannya dalam bentuk tabel yang lebih ringkas guna melihat perbandingan strategi komunikasi publik antara kedua negara, yaitu sebagai berikut :

¹⁴³ Ahmad Faqih dan Nining Komariah. (2021). *Peran Konsistensi Informasi dalam Program Bantuan Sosial Pemerintah*. Indonesian Journal of Government Communication. Vol. 6. No. 2. Hlm. 142-153

¹⁴⁴ Rahul Singh, Siriphong Limsombunchai, dan K.P. Chan. (2023). *Digital Data Systems and Equity in Sosial Welfare : Evidance from Thailand*. Southeast Asia Public Administration Review. Vol. 7. No. 1. Hlm. 73-88

Tabel 4.2

Analisis Perbandingan

No.	Indikator Perbandingan	Indonesia (BLT PKH)	Thailand (Welfare Card)
1.	Transparansi Informasi	Informasi disampaikan melalui situs Kementerian Sosial RI, media sosial, dan petugas lapangan (pendamping PKH)	Informasi disampaikan melalui lembaga Kementerian Keuangan Thailand, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, dan media sosial
2.	Kredibilitas Sumber dan Penyampai Informasi	Informasi berasal dari Kementerian Sosial RI dan pendamping PKH yang berinteraksi langsung.	Informasi berasal dari Kementerian Keuangan Thailand dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia secara

			digital dan sistematis.
3.	Aksesibilitas Informasi	Akses informasi disediakan melalui berbagai media, baik daring (seperti situs web pemerintah, dan media sosial) ataupun luring (pendamping PKH).	Diakses melalui sistem informasi elektronik, media digital atau media sosial, dan pemberitahuan resmi.
4.	Kontinuitas dan Konsistensi Informasi	Informasi disampaikan secara berkala sesuai jadwal pencairan bantuan.	Informasi diperbarui secara periodik melalui sistem digital dan media pemerintah sesuai tahapan bantuan.
5.	Kejujuran dan Akurasi Data	Berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).	Berdasarkan sistem data yang terintegrasi dan verifikasi tahunan yang dikelola

			secara digital.
--	--	--	-----------------

Sumber tabel : Diolah berdasarkan hasil penelitian

Berdasarkan hasil dari analisis terhadap strategi komunikasi publik dalam konteks BLT PKH di Indonesia dan *Welfare Card* di Thailand, peneliti menyimpulkan bahwa kedua negara menerapkan pendekatan komunikasi yang menekankan pada transparansi, keakuratan, dan keterjangkauan informasi kepada masyarakat. Melalui prinsip-prinsip *Public Information Model*, strategi komunikasi publik di kedua negara dirancang untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan menyampaikan informasi program secara terbuka, bersumber dari institusi resmi yang kredibel, dan disampaikan secara konsisten melalui berbagai saluran media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Di Indonesia, pemerintah menggunakan pendekatan interpersonal yang diperkuat dengan adanya media digital, sedangkan Thailand memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi elektronik untuk menyampaikan informasi secara *real-time*. Keduanya menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik yang dirancang sesuai dengan mengedepankan kejelasan pesan, konsistensi, dan keakuratan data mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial.

Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap program BLT di kedua negara tidak semata dibangun melalui kebijakan distribusi bantuan, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi publik yang dilakukan pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa strategi komunikasi publik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan sosial.

2. Strategi Komunikasi Publik Terkait Kemudahan Akses

Kemudahan akses dapat dimaknai sebagai sejauh mana suatu layanan, informasi, atau fasilitas dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa hambatan berarti, baik secara fisik, ekonomi, prosedural, maupun sosial dan budaya. Dalam konteks program bantuan sosial, kemudahan akses mencakup ketersediaan layanan secara merata di berbagai wilayah, kemudahan prosedur dalam proses pencairan bantuan, dan keterjangkauan biaya serta penerimaan oleh masyarakat.

Untuk menganalisis aspek ini secara mendalam, peneliti menggunakan *Theory of Service Accessibility* yang dikemukakan oleh Denis McQuail. Menurutnya, komunikasi publik dalam layanan sosial tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat benar-benar dapat mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut secara efektif dan adil. Ia menguraikan empat indikator utama dalam konsep aksesibilitas layanan, yaitu *Availability* (ketersediaan), *Accessibility* (kemudahan akses fisik dan

prosedural), *Affordibility* (keterjangkauan ekonomi), dan *Acceptability* (penerimaan sosial dan budaya).¹⁴⁵

a. Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Indonesia Terkait Kemudahan Akses

Sebelum menguraikan hasil temuan mengenai strategi komunikasi publik pemerintah Indonesia dalam kemudahan akses terhadap program BLT PKH, perlu ditegaskan terlebih dahulu kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis. Dalam hal ini, *Theory of Service Accessibility* dari Denis McQuail menjadi acuan utama untuk memahami bagaimana akses terhadap layanan publik, termasuk bantuan sosial, harus diwujudkan. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari tersebarnya informasi, tetapi juga sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan secara nyata.¹⁴⁶ Teori ini dipilih untuk melihat sejauh mana upaya komunikasi publik pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam kerangka distribusi kebijakan sosial.

¹⁴⁵ Denis McQuail. (2010). *Mass Communication Theory*. 6th ed. London : SAGE Publications. Hlm. 435-450

¹⁴⁶ *Ibid*

Gambar 4.9

Artikel Terkait Kartu Keluarga Sejahtera

The image shows a mobile browser view of a news article from the Indonesian Ministry of Social Justice and Empowerment (Kemensos). The article title is "Mensos Instruksikan Gerakan KPM Pegang KKS Sendiri". The author is identified as "Nik Inayati". The article date is "04-06-2020". A photograph shows a man in a white shirt sitting at a conference table. The article text discusses the instruction for KPM (Beneficiaries of the Family Welfare Card) to hold their own KKS (Family Welfare Card) to reduce the risk of misuse. It also mentions that this is part of a broader effort to encourage KPM to take responsibility for their own social assistance and to be more aware and proactive in their transactions.

kemensos.go.id

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Mensos Instruksikan Gerakan KPM Pegang KKS Sendiri

Beranda / Berita / Menteri Sosial
Mensos Instruksikan Gerakan KPM Pegang KKS Sendiri

04-06-2020

Penulis
Nik Inayati

JAKARTA (3 Juni 2020) - Menteri Sosial Juliani P. Batubara menginstruksikan Gerakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Sendiri. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara daring, Rabu, 3 Juni 2020.

"Berdasarkan informasi yang saya terima, masih ada KKS yang tidak dipegang langsung oleh KPM PKH. Saya minta kepada Koordinator PKH di lapangan untuk memastikan KKS benar-benar bisa dipegang sendiri oleh KPM untuk mengurangi resiko penyalahgunaan," kata Mensos Ari.

Selain itu, lanjut Mensos, Gerakan KPM Pegang KKS Sendiri dimaksudkan agar KPM mandiri dalam pengambilan bantuan sosial tunai serta meningkatkan kesadaran dan kemauan KPM untuk lebih aktif bertransaksi menggunakan

Selain itu, lanjut Mensos, Gerakan KPM Pegang KKS Sendiri dimaksudkan agar KPM mandiri dalam pengambilan bantuan sosial tunai serta meningkatkan kesadaran dan kemauan KPM untuk berlatih bertransaksi menggunakan KKS.

Sejak tahun 2016 Presiden Joko Widodo meluncurkan kebijakan penyaluran bantuan sosial secara terintegrasi melalui satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS bekerjasama dengan Bank Himpunan Negara (Himbara) yaitu BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Pada bulan Juni 2020, sejumlah Rp2,4 triliun bantuan sosial PKH disalurkan kepada 10 juta KPM melalui Bank Himbara.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, bab II Sosialisasi dan Edukasi, huruf f menyatakan bahwa penggunaan/penarikan rekening bantuan sosial PKH termasuk rekening tabungan/kartu, maksimal transaksi, aktivasi, penggantian PIN (Personal

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, bab II Sosialisasi dan Edukasi, huruf f menyatakan bahwa penggunaan/penarikan rekening bantuan sosial PKH termasuk jenis tabungan/kartu, maksimal transaksi, aktivasi, penggantian PIN (Personal Identification Number) dan fasilitas lainnya dilaksanakan sendiri oleh KPM.

"Karenanya saya minta kepada Koordinator Regional dan Koordinator Wilayah agar meningkatkan pengawasan hingga ke level pendamping. Tidak perlu birokrasi berbelit-belit. Tujuan terpenting adalah seluruh bantuan sosial tepat sasaran," kata bapak dua anak ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan Rakornas PKH secara daring ini bertujuan untuk membahas isu terkini tentang SDM PKH, meningkatkan keterampilan dan sikap, serta membahas pelaksanaan Bantuan

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan Rakornas PKH secara daring ini bertujuan untuk membahas isu terkini tentang kinerja SDM PKH, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan pembahasan pelaksanaan Bantuan Sosial PKH setiap bulan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Rakornas ini dihadiri 166 orang peserta yang terdiri dari 34 Kepala Dinas Sosial Sosial Provinsi, 6 Koordinator Regional, 78 Koordinator Wilayah, 22 Pejabat Struktural Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, dan 23 Koordinator Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Kenormalan Baru Penyaluran Bansos PKH

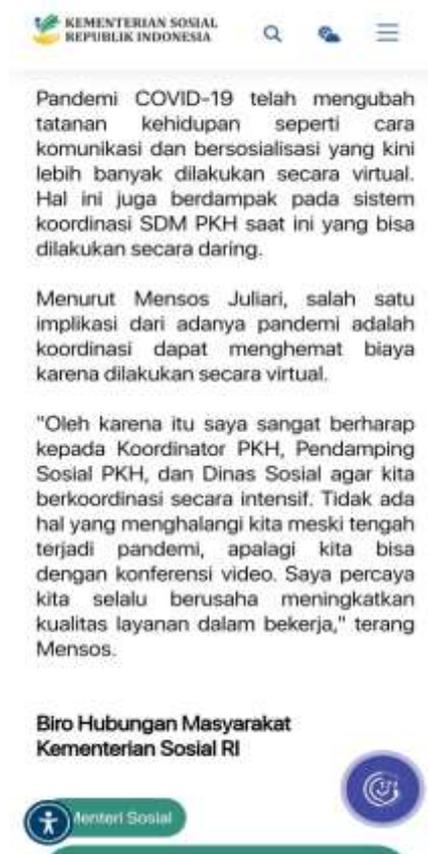
Pada kesempatan yang sama, Mensos Ari mengimbau kepada SDM PKH untuk mengawal penyaluran bantuan sosial PKH di lapangan agar memperhatikan protokol kesehatan sesuai anjuran Presiden Joko Widodo.

Protokol kesehatan yang dianjurkan ketika penyaluran bansos PKH di

Protokol kesehatan yang dianjurkan ketika penyaluran bansos PKH di antaranya keluar rumah dalam kondisi sehat dan memakai masker; menghindari kerumunan; tidak bersalaman dan jaga jarak dengan orang lain minimal satu meter; tidak menyentuh wajah (mata, hidung, dan mulut); cuci tangan pakai sabun/hand sanitizer setelah bertransaksi ambil uang di ATM ataupun mesin EDC belanja di e-Warong; segera pulang setelah ambil bansos; serta segera mandi ganti pakaian dan langsung dicuci ketika sampai di rumah.

"Selain itu yang juga penting adalah memastikan uang bansos hanya untuk membeli kebutuhan pokok, makanan bergizi dan keperluan sekolah anak," pungkasnya.

Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan seperti cara komunikasi dan bersosialisasi yang kini lebih banyak dilakukan secara virtual. Hal ini juga berdampak pada koordinasi SDM PKH saat ini yang dilakukan secara daring.



Sumber foto : website Kemensos RI

KKS adalah kartu identitas bagi penerima manfaat yang dikeluarkan oleh bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. KKS berfungsi sebagai rekening tabungan sekaligus kartu ATM yang digunakan untuk mencairkan dana bantuan sosial, termasuk BLT PKH.¹⁴⁷ Berdasarkan informasi dari website resmi Kementerian Sosial RI di atas, pemerintah menginstruksikan gerakan KPM pegang KKS sendiri yang dipublikasikan pada 04 Juni 2020.¹⁴⁸ Kebijakan ini telah dilakukan oleh penerima manfaat

¹⁴⁷ Kementerian Sosial. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2023*. Jakarta : Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Hlm. 15

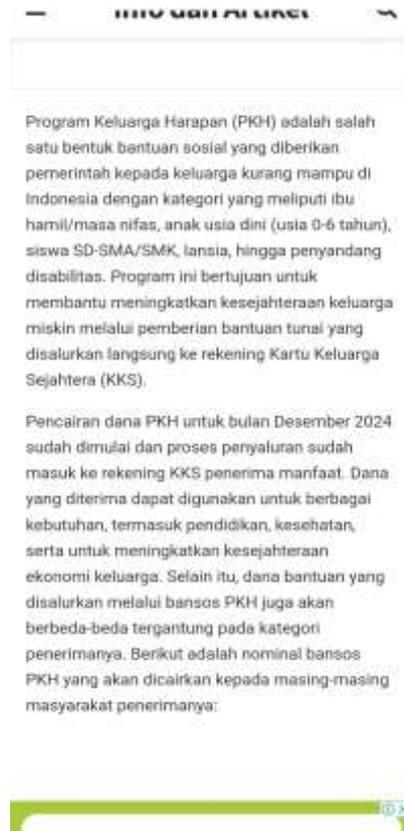
¹⁴⁸ <https://kemensos.go.id/>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2025

hingga saat ini, sehingga memudahkan akses mereka dalam menggunakan KKS untuk pencairan bantuan sosial terutama PKH. Didukung juga dengan artikel yang dipublikasikan oleh laman resmi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai berikut :

4.10

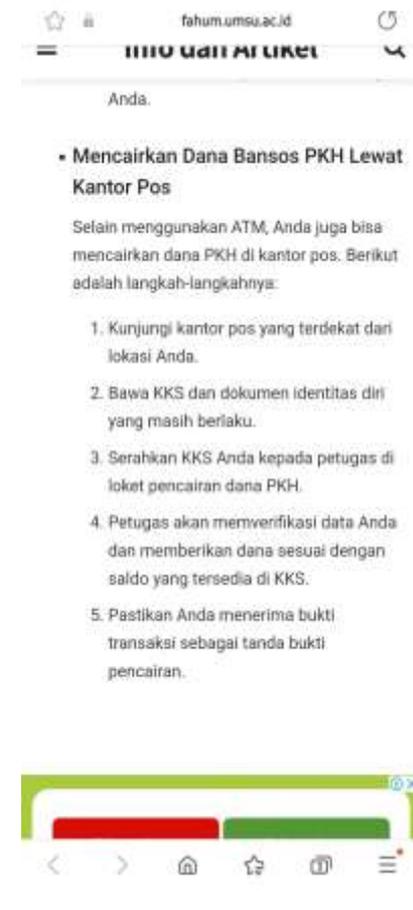
Artikel Penggunaan KKS

The image displays two screenshots of a mobile news article from the website fahum.umsu.ac.id. The article is titled "Dana PKH Desember 2024 Masuk ke Rekening KKS, Ini Panduan Cara Mencairkannya" (PKH December 2024 Funds Enter KKS Account, Here's a Guide on How to Withdraw Them). The author is Maksun Rangkuti, and the article was published on December 24, 2024. The article content explains that the Program Keluarga Harapan (PKH) is a government program providing direct cash assistance to poor families in Indonesia. In December 2024, PKH funds are distributed through the Family Sejahtera Card (KKS). For recipients, this is an opportunity to utilize the funds to improve their quality of life. The article includes an image of two KKS cards and a "Buat profil sekarang" (Create profile now) button.



Nominal Dana Bansos PKH Desember 2024

1. Ibu hamil dan masa nifas:
Rp.750.000 per tahap atau
Rp.3.000.000 per tahun.
2. Balita (usia 0-6 tahun): Rp.750.000 per tahap atau Rp.3.000.000 per tahun.
3. Siswa SD: Rp.225.000 per tahap atau Rp.900.000 per tahun.
4. Siswa SMP: Rp.375.000 per tahap atau Rp.1.500.000 per tahun.
5. Siswa SMA: Rp.500.000 per tahap atau Rp.2.000.000 per tahun.
6. Lansia (70 tahun ke atas):
Rp.600.000 per tahap atau
Rp.2.400.000 per tahun.
7. Penyandang disabilitas berat:
Rp.600.000 per tahap atau
Rp.2.400.000 per tahun



Syarat dan Ketentuan Pencairan Dana Bansos PKH

Agar proses pencairan berjalan lancar, pastikan Anda memenuhi beberapa syarat dan ketentuan berikut:

1. Pastikan data di KKS Anda sesuai dengan data yang terdaftar di sistem PKH.
2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) harus dalam kondisi baik dan tidak rusak.
3. Pastikan Anda memiliki dokumen identitas yang sah (KTP, KK) saat melakukan pencairan dana.
4. Periksa jadwal pencairan yang telah ditentukan, karena pencairan dana biasanya dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan skema pencairan dari pemerintah.



Sumber foto : Fahum UMSU

Berdasarkan unggahan informasi pada laman resmi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) terkait penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dipublikasikan pada 24 Desember 2024.¹⁴⁹ Peneliti menemukan bahwasannya bantuan tersebut disalurkan melalui mekanisme rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Melalui pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mencerminkan pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori *Service Accessibility* dari Denis McQuail. Teori ini menekankan bahwa suatu layanan publik harus memperhatikan empat aspek utama yang sudah dijelaskan sebelumnya.

¹⁴⁹ <https://fahum.umsu.ac.id/blog/dana-pkh-desember-2024-masuk-ke-rekening-kks-ini-panduan-cara-mencairkannya/>. Diakses pada 07 Maret 2025

Pertama, aspek *availability* atau ketersediaan informasi dan layanan. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI telah mengupayakan penyebarluasan informasi secara masif mengenai penyaluran dana bantuan. Ketersediaan informasi dengan media yang beragam seperti situs resmi kementerian, media sosial, hingga informasi dari sebuah institusi pendidikan juga menjadi langkah dalam penyebarluasannya. Isi informasi pada artikel di atas tidak hanya mencakup jadwal pencairan, tetapi juga nominal bantuan dan kategori penerima. Selain itu, tersedia pula panduan teknis mengenai cara pencairan bantuan melalui KKS yang dapat diakses publik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan informasi yang cukup dan tersedia secara luas agar mudah ditemukan oleh penerima manfaat.

Kedua, pada aspek *accessibility* atau kemudahan akses terhadap layanan. Dalam artikel yang dianalisis, peneliti menemukan bahwa pemerintah memberikan berbagai alternatif dalam proses pencairan dana bantuan. Penerima manfaat dapat mencairkan dan PKH melalui mesin ATM yang mendukung KKS (seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) atau melalui Kantor Pos terdekat. Penyediaan lebih dari satu kanal pencairan ini penting untuk menjangkau kelompok yang memiliki keterbatasan akses geografis, teknologi, maupun pemahaman digital. Disamping itu, informasi yang disampaikan juga disusun dengan bahasa yang sederhana dan disertai petunjuk langkah demi langkah, sehingga

dapat dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Ketiga, dalam aspek *affordability* atau keterjangkauan, strategi komunikasi publik pemerintah terlihat dalam upaya menyederhanakan proses pencairan bantuan PKH tanpa menimbulkan biaya atau beban tambahan secara teknis bagi penerima. Dalam artikel yang dianalisis, dijelaskan bahwa pencairan dana PKH dapat dilakukan secara langsung melalui mesin ATM menggunakan KKS, atau dengan membawa KKS ke Kantor Pos bagi yang tidak memiliki akses perbankan. Panduan pencairan juga menekankan bahwa masyarakat cukup membawa KKS dan identitas diri tanpa persyaratan administrasi yang rumit.

Keempat, dari aspek *acceptability* atau penerimaan sosial, strategi komunikasi publik pemerintah turut terlihat dari penyampaian informasi yang bersifat teknis dan solutif. Dalam artikel tersebut, masyarakat diberikan panduan rinci mengenai cara mencairkan bantuan melalui ATM dan Kantor Pos, termasuk tata cara memasukkan kartu, memilih menu bantuan sosial, dan menarik tunai. Informasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memahami proses, tetapi juga menciptakan rasa aman dan percaya karena mereka tahu langkah apa yang harus dilakukan. Menampilkan penyampaian informasi dengan gaya yang mudah dimengerti, pemanfaatan KKS secara umum diterima baik oleh masyarakat.

Selain penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), berikut peneliti sajikan artikel terkait pendamping PKH yang juga menjadi jalan dalam kemudahan akses penerima manfaat dalam program PKH :

Gambar 4.11

Artikel Terkait Pendamping PKH



DEDIKASI PENDAMPING PKH: MENJEMBATANI AKSES BANTUAN SOSIAL

 Raji Harahap

 Jumat, 01 November 2024  09:11 AM

 Kegiatan  0 Comment  479 views



Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Keberhasilan program ini tak lepas dari peran penting para pendamping PKH yang berdedikasi tinggi di lapangan. Mereka menjadi jembatan antara pemerintah dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima. Dua kisah berikut ini menggambarkan dedikasi dan peran krusial para pendamping PKH di Kecamatan Air Joman dan Aek Ledong.

Di Kecamatan Air Joman, Ayu Lestari, seorang pendamping PKH, menunjukkan komitmennya dalam membantu KPM. Ia tak hanya sekedar menyalurkan bantuan, tetapi juga aktif mendampingi KPM dalam mengatasi berbagai kendala yang mereka hadapi. Salah satu contohnya adalah pendampingan yang dilakukan Ayu kepada KPM yang mengalami kehilangan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan (BUTAB). Kehilangan dokumen penting ini tentu menjadi hambatan besar bagi KPM dalam mengakses bantuan sosial yang menjadi hak mereka.

Ayu Lestari dengan sigap mendampingi KPM tersebut menuju Unit BRI Air Joman untuk mengurus penggantian KKS dan BUTAB yang hilang. Proses ini mungkin tampak sederhana, namun bagi KPM yang kurang memahami prosedur administrasi dan terkendala literasi digital, proses ini bisa menjadi sangat rumit dan melelahkan. Dengan kehadiran Ayu, KPM merasa lebih percaya diri dan terbantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendampingan ini bukan hanya sekedar

Pendampingan ini bukan hanya sekedar membantu mengurus administrasi, tetapi juga memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi KPM. Kehadiran Ayu memastikan bahwa KPM dapat kembali mendapatkan hak bantuannya, sehingga keberlangsungan bantuan sosial untuk masa depan mereka tetap terjamin. Aksi Ayu Lestari ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama.

Sementara itu, di Kecamatan Aek Ledong, kisah serupa namun dengan tantangan berbeda dihadapi oleh Supiyan, seorang pendamping PKH lainnya. Ia mendampingi seorang KPM yang mengalami kerusakan parah pada KKS-mya. Kerusakan ini menyebabkan mesin ATM dan EDC tidak dapat membaca data KKS, sehingga KPM tersebut terhambat dalam mengambil bantuan sosialnya selama beberapa bulan. Bayangkan betapa sulitnya bagi KPM tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa akses terhadap bantuan yang telah menjadi haknya.

Supiyan, dengan penuh kesabaran dan ketelitian, mendampingi KPM tersebut untuk mengurus penggantian KKS baru. Proses penggantian KKS ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam melengkapi berbagai persyaratan administrasi. Supiyan memastikan semua dokumen terpenuhi dengan benar dan proses penggantian berjalan lancar. Berkat bantuan Supiyan, KPM tersebut akhirnya dapat mengambil semua bantuan sosial yang tertunda selama beberapa bulan. Kisah Supiyan ini menunjukkan betapa pentingnya peran pendamping PKH dalam mengatasi kendala teknis yang dapat menghambat akses KPM terhadap bantuan sosial. Ia tidak hanya membantu menyelesaikan masalah administrasi,

terhadap bantuan sosial, ia tidak hanya membantu menyelesaikan masalah administrasi, tetapi juga memberikan solusi praktis dan memastikan KPM mendapatkan haknya secara penuh.

Kedua kisah ini menggambarkan betapa pentingnya peran pendamping PKH dalam menjamin keberhasilan Program Keluarga Harapan. Mereka bukan hanya sebagai penghubung antara pemerintah dan KPM, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan sahabat bagi KPM. Dedikasi dan kerja keras mereka patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi kita semua untuk senantiasa membantu sesama dan berkontribusi bagi masyarakat. Semoga kisah Ayu Lestari dan Supiyan ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Program PKH tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada dedikasi dan kerja keras para pendamping PKH di lapangan.

Sumber : Sekretariat PKH Kec. Air Joman dan Aek Ledong

← Previous Post

Next Post →

Sumber foto : website resmi Kemensos RI

Dalam upaya memudahkan akses bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat (KPM), pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial RI menerapkan strategi komunikasi publik yang diwujudkan melalui keberadaan pendamping PKH. Seperti halnya artikel di atas yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan berjudul “Dedikasi Pendamping PKH : Menjembatani Akses Bantuan Sosial” yang

dipublikasikan pada 01 November 2024.¹⁵⁰ Artikel di atas memberikan ilustrasi konkret mengenai bagaimana strategi tersebut diterapkan di lapangan. Analisis terhadap isi artikel ini dilakukan sejalan dengan pendekatan teori *Service Accessibility* dari Denis McQuail.

Dalam ketersediaan layanan (*availability*), pemerintah melalui pendamping PKH, memastikan bahwa bantuan dan pendampingan tersedia secara berkelanjutan. Hal ini terlihat dari kesiapan pendamping seperti Ayu Lestari di Kecamatan Air Joman, yang segera merespons permasalahan KPM yang kehilangan kartu dan buku tabungan dengan langsung mendampingi proses penggantian ke bank. Respons cepat ini menunjukkan bahwa layanan tidak hanya disediakan secara formal, tetapi juga dijalankan secara aktif oleh pihak yang memahami kondisi riil masyarakat.

Kemudian, dari segi kemudahan akses layanan (*accessibility*), pendamping PKH mempermudah masyarakat dalam mengakses prosedur yang bagi sebagian kalangan dirasa rumit. Dalam kasus di Kecamatan Aek Ledong, Supiyan membantu seorang KPM yang tidak bisa mengambil bantuan akibat kerusakan kartu. Pendampingan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga menurunkan hambatan administratif yang sering

¹⁵⁰ <https://dinsos.asahankab.go.id/detailpost/dedikasi-pendamping-pkh-menjembatani-akses-bantuan-sosial>. Diakses pada tanggal 09 Maret 2025

kali menjadi kendala utama bagi masyarakat miskin. Dengan pendamping hadir secara langsung, proses menjadi lebih mudah dipahami dan dijangkau oleh mereka yang sebelumnya kesulitan.

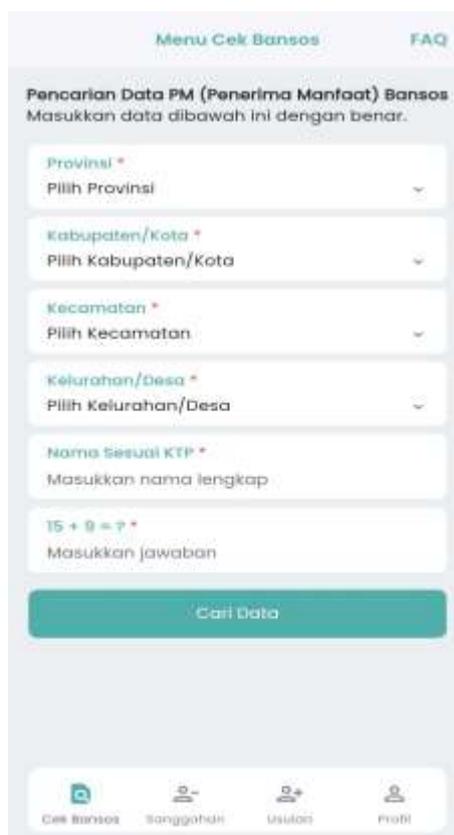
Dari artikel di atas peneliti juga melihat strategi komunikasi yang dijalankan pemerintah melalui pendamping PKH juga mencerminkan upaya untuk meringankan beban masyarakat (*affordability*). Proses pendampingan terhadap KPM dalam mengurus kartu yang rusak ataupun hilang dilakukan tanpa pungutan biaya. Bahkan, pertemuan dan bantuan dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, mengurangi potensi pengeluaran tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat tidak merasa terbebani dalam mengakses bantuan.

Dalam segi penerimaan sosial (*acceptability*), pendamping PKH tidak hanya hadir sebagai petugas, tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Mereka menunjukkan empati dan ketersediaan untuk mendampingi dengan sepenuh hati. Pendekatan yang menghargai kondisi sosial dan emosional masyarakat penerima manfaat membuat kehadiran pendamping dapat diterima dan bahkan dihargai. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya hadir secara struktural, tetapi juga secara sosial dan emosional di tengah masyarakat penerima manfaat.

Dengan penggunaan KKS dan juga adanya pendampingan dari pendamping PKH, kemudahan akses juga tergambar dari adanya aplikasi dan web Cek Bansos yang bisa kapan saja diakses oleh masyarakat penerima manfaat. Penggunaan aplikasi dan web Cek Bansos ini bisa memudahkan mereka untuk melihat status dalam program sosial terutama PKH. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk *screenshot* tampilan dari aplikasi dan web Cek Bansos

Gambar 4.12

Aplikasi dan Web Cek Bansos



Menu Cek Bansos FAQ

Pencarian Data PM (Penerima Manfaat) Bansos
Masukkan data dibawah ini dengan benar.

Provinsi *
Pilih Provinsi

Kabupaten/Kota *
Pilih Kabupaten/Kota

Kecamatan *
Pilih Kecamatan

Kelurahan/Desa *
Pilih Kelurahan/Desa

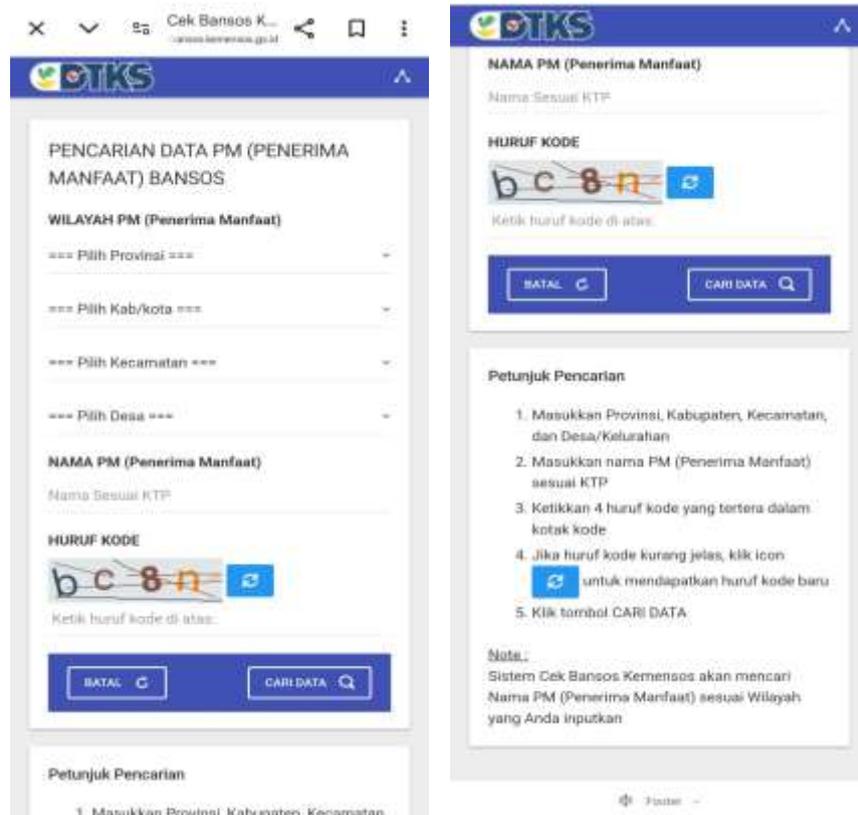
Nama Sesuai KTP *
Masukkan nama lengkap

15 + 9 = ? *
Masukkan jawaban

Cari Data

Cek Bansos Sanggahin Usulan Profil

Sumber foto : aplikasi Cek Bansos



Sumber foto : website Cek Bansos

Pemerintah telah mengembangkan layanan digital berbasis web dan aplikasi mobile dengan nama “Cek Bansos” seperti gambar 4.12 di atas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai status penerima bantuan sosial. Layanan ini merupakan bagian dari upaya strategis komunikasi publik untuk menjangkau khalayak luas secara efisien dan transparan.

Dari segi ketersediaan informasi (*availability*), peneliti melihat bahwasannya layanan informasi bantuan sosial yang disediakan oleh Kementerian Sosial RI melalui platform digital seperti situs resmi (<https://cekbansos.kemensos.go.id>) dan aplikasi

Cek Bansos menunjukkan informasi tersebut tersedia secara kontinu dan terdesentralisasi. Sistem ini tidak hanya aktif selama masa penyaluran bantuan, tetapi juga dapat diakses sepanjang waktu oleh masyarakat yang ingin melakukan pengecekan secara mandiri. Ketersediaan informasi ini merupakan bentuk penyediaan akses yang bersifat luas, real-time, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terkait kemudahan aksesnya (*accessibility*), antarmuka sistem yang ditampilkan dalam web dan aplikasi Cek Bansos, terlihat bahwa desain dari fitur yang digunakan bersifat sederhana, mudah dipahami, dan ramah pengguna (*user friendly*). Masyarakat hanya perlu mengisi informasi dasar seperti nama lengkap, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, disertai juga dengan verifikasi kode keamanan. Fitur ini meminimalkan kesalahan input data dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses informasi.

Selain itu, pemerintah juga menggunakan media sosial Instagram dan Facebook sebagai media informasi bagi masyarakat Indonesia terutama bagi penerima manfaat. Media sosial Instagram dan Facebook dalam hal kemudahan akses merupakan platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, menurut data dari *We Are Social & Meltwater* yang dapat diakses di databoks.katadata.co.id. Indonesia menjadi negara dengan pengguna Instagram terbanyak di dunia yang menempati urutan

keempat per Juli 2024, sedangkan pengguna Facebook di Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak di dunia per Juli 2023.¹⁵¹ Hal ini tentu menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia dalam memudahkan akses informasi terkait PKH. Selain itu, kesediaan informasi seperti ini dapat menjadi langkah strategis agar masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dapat mengakses informasi hanya dengan menggunakan perangkat ponsel.

Kemudian aspek keterjangkauan (*affordability*) juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan akses terhadap layanan publik. Dalam hal ini, seluruh layanan Cek Bansos yang disediakan oleh pemerintah dapat diakses secara gratis tanpa biaya administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi publik yang dilakukan bersifat inklusif dan tidak memberatkan masyarakat, khususnya mereka yang rentan secara ekonomi. Pemanfaatan platform berbasis digital juga mengurangi biaya operasional dan waktu jika harus dikeluarkan masyarakat dibandingkan jika harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

Terakhir, dilihat dari segi penerimaan sosial dan budaya (*acceptability*), pemerintah telah menerapkan penggunaan bahasa nasional (Bahasa Indonesia) dengan gaya bahasa yang komunikatif serta petunjuk yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Selain itu, proses verifikasi yang tidak terlalu kompleks

¹⁵¹ <https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2025

menunjukkan bahwa pemerintah mempertimbangkan aspek kemampuan literasi digital dan kenyamanan pengguna. Dengan kemudahan yang ada, layanan ini mampu menimbulkan respons positif dari masyarakat karena dianggap praktis, cepat, dan terpercaya.

b. Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Thailand Terkait Kemudahan Akses

Kemudahan akses terhadap layanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai strategi komunikasi pemerintah. Dalam konteks program kesejahteraan sosial, strategi komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk memahami strategi tersebut, analisis dilakukan dengan menggunakan teori *Service Accessibility* dari Denis McQuail, yang menekankan pada empat dimensi utama yaitu *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability*. Pendekatan ini dipilih guna menilai sejauh mana upaya komunikasi publik pemerintah Thailand mampu memfasilitasi keterhubungan antara negara dan masyarakat dalam kerangka distribusi layanan sosial.

Gambar 4.13
Tampilan Welfare Card



Sumber foto : ResearchGate

Gambar 4.13 di atas menampilkan bentuk atau tampilan dari *Welfare Card* yang merupakan kartu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand. Kartu ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 sebagai program bantuan sosial bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dari aspek *availability* atau ketersediaan informasi, isi kartu *Welfare Card* menunjukkan bahwa pemerintah Thailand berupaya menyampaikan informasi penting secara langsung dan terbuka. Hal ini tercermin dari kehadiran elemen-elemen seperti nama lengkap pemegang kartu, nomor identitas, tanggal lahir, serta nomor kartu yang tercetak dengan jelas. Selain itu, terdapat chip elektronik yang memperkuat fungsi kartu sebagai alat transaksi dan verifikasi digital. Kartu ini juga mencantumkan masa berlaku dan menampilkan logo resmi pemerintah dan bank negara (Krunghthai Bank), yang menegaskan legalitas dan otoritas kartu tersebut. Semua elemen ini mencerminkan komunikasi pemerintah dalam

menjamin ketersediaan informasi penting secara langsung kepada pengguna kartu tanpa perlu perantara tambahan.

Dari sudut pandang *accessibility* atau kemudahan akses, kartu ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dirancang sebagai alat untuk mempermudah akses pengguna ke berbagai layanan sosial. Chip elektronik dan teknologi PromptCard memungkinkan kartu digunakan secara langsung di mesin EDC dan ATM. Adanya barcode dan tempat untuk foto pemilik kartu memberikan kemudahan dalam proses identifikasi secara cepat. Ini menunjukkan bahwa isi kartu difungsikan sebagai media komunikasi yang memungkinkan tindakan langsung, sehingga pemilik kartu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga bisa mengakses manfaat secara mandiri dan efisien.

Selanjutnya, dari sisi *affordability* atau keterjangkauan, isi kartu *Welfare Card* menunjukkan strategi komunikasi yang mempertimbangkan efisiensi biaya bagi pemilik kartu. Multifungsi dalam satu kartu mengurangi keharusan membawa banyak dokumen atau membayar biaya tambahan untuk verifikasi. Teknologi PromptCard yang digunakan bersifat terbuka dan tidak menuntut pengguna membayar biaya transaksi tambahan pada layanan-layanan tertentu. Masa berlaku kartu yang panjang juga menandakan bahwa pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembaruan jangka pendek. Dengan demikian, isi kartu menyampaikan pesan bahwa akses terhadap layanan negara dapat

dilakukan secara gratis atau dengan biaya yang seminimal mungkin.

Terakhir dari segi *acceptability* atau penerimaan sosial, isi kartu Welfare Card menunjukkan upaya untuk menciptakan media yang secara visual dan simbolik dapat diterima oleh masyarakat luas. Adanya foto pemilik kartu, barcode, dan susunan informasi yang ringkas menjadikan kartu ini mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, kehadiran logo pemerintah dan lembaga keuangan nasional menambah rasa aman serta kepercayaan terhadap validitas kartu sebagai alat resmi. Dengan kata lain, desain isi kartu telah dirancang agar dapat diterima oleh pemiliknya, memperkuat efektivitasnya sebagai media komunikasi publik.

Selain penggunaan *Welfare Card* di atas, penerima bantuan juga bisa memakai aplikasi mobile seperti gambar berikut ini :

Gambar 4.14

Aplikasi Krungthai NEXT



Sumber foto : Aplikasi Krungthai NEXT di Google Play

Dalam era digital saat ini, pemerintah Thailand menunjukkan upaya konkret dalam mendekatkan layanan bantuan sosial kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penggunaan aplikasi Krungthai NEXT yang dikembangkan Krungthai Bank sebagai media utama dalam pelaksanaan program *Welfare Card*. Aplikasi ini menjadi jembatan antara pemerintah dan warga negara penerima manfaat, memberikan kemudahan akses informasi, transaksi, dan penggunaan bantuan secara digital.

Seperti gambar di 4.14 di atas, Krungthai NEXT dirancang bukan sekadar sebagai alat transaksi keuangan, melainkan sebagai platform layanan publik yang intuitif, efisien, dan mudah digunakan. Melalui satu aplikasi, penerima *Welfare Card* dapat memeriksa saldo bantuan, melakukan pembayaran, bahkan menarik uang tanpa kartu fisik. Kehadiran aplikasi ini memperlihatkan bagaimana strategi komunikasi publik di era digital diarahkan pada kemudahan akses yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Peneliti meninjau berdasarkan teori *Service Accessibility* yang dikemukakan oleh Denis McQuail, aplikasi Krungthai NEXT merepresentasikan penerapan empat dimensi utama terkait kemudahan akses. *Pertama*, dari aspek *availability* atau ketersediaan, aplikasi ini dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui berbagai platform digital seperti Google Play Store dan App Store. Krungthai NEXT hadir sebagai layanan yang selalu tersedia tanpa batas waktu, memungkinkan pengguna mengakses bantuan sosial kapan saja dan dari mana saja. Keberadaan aplikasi ini menggantikan ketergantungan pada prosedur manual dalam distribusi bantuan.

Kedua, pada aspek *accessibility*, Krungthai NEXT didesain dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Setiap fitur utama, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, isi ulang (*top up*), dan penarikan tunai tanpa kartu, ditampilkan dalam bentuk

ikon-ikon yang mudah dimengerti. Pengguna cukup melakukan beberapa sentuhan pada layar untuk menyelesaikan transaksi yang berkaitan dengan *Welfare Card*. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat luas tanpa memerlukan keahlian teknis yang kompleks. Dalam hal ini juga, pemerintah Thailand memudahkan akses masyarakatnya untuk mendapati informasi yang akurat dan terpercaya melalui platform media sosial terutama Facebook. Pemilihan platform Facebook sebagai media informasi dari pemerintah dikarenakan Thailand menjadi negara dengan pengguna Facebook terbanyak di dunia dengan urutan ketujuh per Juli 2023 berdasarkan data dari *databoks.katadata.co.id*.¹⁵²

Ketiga, dari segi *affordability* atau keterjangkauan, pengguna aplikasi ini tidak memerlukan biaya tambahan. Layanan-layanan tersedia, termasuk pengecekan saldo dan transaksi menggunakan dana bantuan, tidak dikenai biaya administrasi. Pendekatan ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi rendah, karena tidak ada beban finansial dalam mengakses hak mereka. Keterjangkauan ini menjadi bagian penting dari strategi komunikasi publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat penerima manfaat.

¹⁵²<https://databoks.katadata.co.id> . Diakses pada 24 Mei 2024

Terakhir, dari segi *acceptability* atau penerimaan, aplikasi Krungthai NEXT mampu membangun citra positif melalui desain visual yang menarik dan ramah pengguna. Misalnya dengan kehadiran karakter maskot yang ceria serta tata letak yang modern turut membangun kenyamanan dalam pengalaman pengguna. Selain itu, nama aplikasi dan slogannya, “Live Life to the NEXT”, yang mengandung pesan optimisme dan kemajuan, yang selaras dengan semangat program *Welfare Card* sebagai bentuk dukungan negara terhadap kesejahteraan warganya. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap aplikasi ini mencerminkan strategi komunikasi publik pemerintah Thailand dalam menciptakan layanan digital yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan untuk digunakan.

c. Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana strategi komunikasi publik antara pemerintah Indonesia dan Thailand dalam memberikan kemudahan akses terhadap program bantuan sosial. Perbandingan ini peneliti lakukan berdasar pada teori *Service Accessibility* dari DenisMcQuail yang mencakup empat indikator utama, yaitu *availabiliy* (ketersediaan), *accessibility* (kemudahan akses), *affordability* (keterjangkauan biaya), dan *acceptability* (penerimaan sosial-budaya).

1. *Availability* (Ketersediaan)

Di Indonesia, program BLT PKH disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan sistem perbankan nasional. Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, Kementerian Sosial menyediakan layanan “Cek Bansos”, yang dapat diakses melalui situs resmi *cekbansos.kemensos.go.id* maupun aplikasi mobile. Layanan ini tersedia selama 24 jam, memungkinkan masyarakat untuk melakukan verifikasi status bantuan kapan saja. Selain itu, informasi penyaluran BLT PKH juga secara aktif disebarluaskan oleh Kementerian Sosial RI dengan berbagai kanal informasi. Dengan adanya berbagai kanal informasi, masyarakat memiliki akses yang luas terhadap data bantuan sosial.

Sebaliknya, di Thailand, ketersediaan informasi diwujudkan melalui *Welfare Card* yang dirancang multifungsi. Kartu ini mencantumkan nama pemilik, nomor identitas, masa berlaku serta dilengkapi dengan logo resmi pemerintah dan chip PromptCard yang dapat digunakan untuk transaksi elektronik. Selain kartu fisik, Thailand juga menyediakan aplikasi Krungthai NEXT, yang dapat diunduh di Google Play Store dan App Store, memungkinkan pengguna mengakses saldo, histori transaksi, dan informasi bantuan secara digital.

Sejalan dengan penelitian Jerab yang menyatakan bahwa layanan berbasis digital yang tersedia 24 jam dapat memperluas

akses terhadap program bantuan sosial, terutama bagi mereka di wilayah terpencil.¹⁵³

2. *Accessibility* (Kemudahan Akses)

Kemudahan akses program BLT PKH di Indonesia didukung oleh kerja sama dengan Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, Dan BTN. Masyarakat penerima manfaat dapat mencairkan dana bantuan melalui ATM Himbara (KKS) atau langsung ke Kantor Pos, tergantung lokasi dan ketersediaan infrastruktur. Kartu KKS yang digunakan terintegrasi dengan sistem rekening bank sehingga dapat berfungsi layaknya kartu debit biasa. Kementerian Sosial RI juga menyusun panduan pencairan dana dalam bahasa Indonesia yang sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, pemerintah menugaskan pendamping sosial PKH untuk membantu langsung masyarakat dalam proses aktivasi, pencairan, hingga penggantian kartu yang rusak atau hilang, terutama di daerah terpencil.

Di Thailand, *Welfare Card* dilengkapi chip PromptCard yang memungkinkan pemilik kartu melakukan transaksi langsung di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) maupun ATM mitra. Selain kartu fisik, pemerintah menyediakan aplikasi Krungthai NEXT yang dirancang dengan tampilan yang sederhana, menggunakan ikon visual dan navigasi praktis

¹⁵³ Karel Jareb. (2024). *Digital Inclusion and Social Assistance in Developing Nations : A 24/7 Access Framework*. Journal of E-Government Services. Vol. 18. No.1. Hlm. 55-68

yang memudahkan bahkan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi digital.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Smith & Lee dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa layanan sosial yang memadukan akses fisik dan digital secara efektif dapat mengatasi hambatan geografis maupun literasi digital, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.¹⁵⁴

3. *Affordability* (Keterjangkauan)

Seluruh proses dalam program BLT PKH, mulai dari pendaftaran, pencairan, aktivasi kartu KKS, hingga pendampingan teknis, diberikan secara gratis oleh pemerintah. Tidak ada pungutan administrasi dalam proses pencairan dana, baik melalui ATM maupun di Kantor Pos. Dengan hadirnya pendamping sosial PKH juga secara aktif mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh oknum yang meminta bayaran atas layanan bantuan sosial.

Sementara itu, di Thailand, penggunaan *Welfare Card* dan aplikasi Krungthai NEXT tidak dikenakan biaya administrasi tambahan. Transaksi pembelian di merchant resmi ataupun pencairan tunai dapat dilakukan tanpa potongan. Selain itu, karena *Welfare Card* bersifat multifungsi, penerima tidak perlu membawa dokumen tambahan atau melakukan pembaruan berkala yang biasanya membutuhkan biaya.

¹⁵⁴ Laura Smith & Lee Hyun-Jin. (2023). *Blending Physical and Digital Access in Public Welfare Programs*. Public Policy Review. Vol. 27. No. 2. Hlm. 113-129

Sesuai dengan penelitian dari Commonwealth Fund yang menyebutkan bahwa biaya tambahan, walaupun kecil, dapat menjadi penghambat utama bagi keluarga berpenghasilan rendah dalam mengakses layanan publik, termasuk bantuan sosial. Oleh karena itu, strategi penghapusan biaya menjadi langkah penting dalam menjamin keadilan akses.¹⁵⁵

4. *Acceptability* (Penerimaan Sosial dan Budaya)

Dari sisi penerimaan sosial, Indonesia mengedepankan pendekatan kultural dalam komunikasi publik. Materi informasi mengenai BLT PKH disampaikan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami, serta disesuaikan dengan norma sosial setempat. Pendamping PKH dilatih untuk bersikap ramah, sabar, dan menghargai budaya lokal setiap interaksi dengan masyarakat, sehingga program lebih mudah diterima dan dipercaya.

Sementara Thailand memanfaatkan pendekatan visual dan simbolik dalam mendesain *Welfare Card*. Kartu tersebut memuat seperti foto penerima, barcode, logo resmi pemerintah, serta slogan dan maskot yang memberikan kesan positif terhadap program. Aplikasi Krungthai NEXT juga menampilkan tampilan yang ramah pengguna, dengan warna cerah dan ikon yang mencerminkan semangat pelayanan publik.

¹⁵⁵ Commonwealth Fund. (2023). *High Costs, Low Access : Barriers to Healthcare and Social Services Among Low-Income Families*. Washington DC : The Commonwealth Fund

Sejalan dengan penelitian dari Zhang dkk, yang menyatakan bahwa penggunaan komunikasi yang sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat lokal dapat meningkatkan penerimaan publik terhadap program bantuan, memperkuat rasa kepercayaan, dan mengurangi penentangan dari kelompok masyarakat tertentu.¹⁵⁶

Berikut peneliti sajikan analisis perbandingan dalam bentuk tabel yang praktis agar lebih mudah untuk memahami perbandingan diantara kedua negara :

Tabel 4.3

Analisis Perbandingan

No.	Indikator Perbandingan	Indonesia (BLT PKH)	Thailand (Welfare Card)
1.	<i>Availability</i>	Tersedia layanan Cek Bansos berbasis web dan aplikasi mobile resmi dari Kementerian Sosial RI yang dapat diakses 24/7. Informasi juga disebarkan melalui	Informasi penting seperti nama penerima, nomor ID, masa berlaku, dan logo pemerintah tercetak langsung pada kartu. Selain itu, aplikasi Krunthai

¹⁵⁶ Min Zhang, Liu Jing & Kim Soo-Jin. (2023). *Cultural Framing in Government Communication : Lessons from Asia-Pasific Welfare Programs*. Asian Journal of Public Communication. Vol. 31. No. 3. Hlm. 201-219

		<p>media sosial Kemensos RI dan situs resmi.</p>	<p>NEXT dapat diunduh melalui Play Store dan App Store, serta aktif selama 24 jam. Informasi juga disebarkan melalui media sosial dan situs resmi Kementerian Keuangan dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia.</p>
2.	<i>Accessibility</i>	<p>Dana bantuan dicairkan melalui ATM Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) atau Kantor Pos, menggunakan KKS. Panduan penggunaan disajikan dengan bahasa yang sederhana.</p>	<p><i>Welfare Card</i> dapat digunakan langsung untuk transaksi di mesin EDC dan ATM karena dilengkapi chip PromptCard. Dilengkapi juga dengan barcode, foto penerima, dan logo</p>

		<p>Pendamping PKH hadir di lapangan untuk membantu pencairan, penggantian kartu, atau verifikasi data.</p>	<p>resmi pemerintah. Aplikasi Krungthai NEXT juga memiliki tampilan yang ramah pengguna.</p>
3.	<i>Affordability</i>	<p>Seluruh proses mulai dari pendaftaran, verifikasi, pencairan dana, hingga pendampingan dilakukan tanpa biaya administrasi. Pendamping PKH juga tidak memungut biaya dalam membantu masyarakat menyelesaikan kendala terkait kartu atau data.</p>	<p>Seluruh fungsi pada Welfare Card dan aplikasi Krungthai NEXT bebas biaya transaksi tambahan. Kartu multifungsi mengurangi kebutuhan membawa dokumen tambahan dan tidak memerlukan biaya untuk pembaruan rutin.</p>
4.	<i>Acceptability</i>	<p>Komunikasi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami serta pendekatan melalui</p>	<p>Desain kartu dan aplikasi mencerminkan budaya lokal,</p>

		<p>pendamping yang memahami norma. Hal ini meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program.</p>	<p>termasuk foto penerima, maskot aplikasi, dan slogan positif seperti “<i>Live Life to the NEXT</i>”. Simbol-simbol ini meningkatkan rasa kepemilikan dan penerimaan masyarakat terhadap program.</p>
--	--	---	--

Sumber tabel : Diolah berdasarkan hasil penelitian

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara strategi komunikasi publik pemerintah Indonesia dalam program BLT PKH dan pemerintah Thailand dalam program *Welfare Card*, peneliti menyimpulkan bahwa kedua negara telah menerapkan prinsip *Service Accessibility* dalam memudahkan akses masyarakat terhadap bantuan sosial. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, baik Indonesia maupun Thailand menunjukkan efektivitas dalam menyediakan layanan yang mudah diakses, terjangkau, dan diterima oleh masyarakat.

Indonesia mengandalkan layanan digital seperti situs “Cek Bansos” dan aplikasi resmi yang dapat diakses 24 jam. Di sisi lain, Thailand menjamin ketersediaan informasi melalui kartu fisik yang

mencantumkan data penting penerima dan aplikasi Krungthai NEXT yang selalu aktif. Dari aspek aksesibilitas, Indonesia mengedepankan kombinasi jalur fisik yaitu melalui Himbara dan Kantor Pos serta dengan pendamping PKH sebagai fasilitator langsung di lapangan. Sedangkan Thailand mengintegrasikan teknologi digital melalui kartu dengan chip PromptCard dan aplikasi yang dirancang sederhana, memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk mengakses bantuan secara mandiri.

Kedua negara juga menjamin keterjangkauan layanan dengan tidak adanya biaya administrasi, baik dalam proses pencairan maupun penggunaan kartu atau aplikasi. Seluruh layanan diberikan secara gratis, termasuk pendampingan di Indonesia dan penggunaan aplikasi di Thailand, sehingga tidak menambah beban finansial bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi rentan. Dari segi penerimaan, pendekatan berbasis budaya lokal menjadi kekuatan masing-masing negara. Indonesia menggunakan bahasa yang komunikatif dan pendekatan empatik melalui pendamping PKH, sedangkan Thailand menguatkan penerimaan masyarakat melalui elemen visual seperti desain kartu, maskot aplikasi, dan juga slogan yang membangkitkan semangat.

Dengan demikian, strategi komunikasi akses yang diterapkan oleh kedua negara telah berjalan sesuai dengan indikator-indikator *Service Accessibility* dari McQuail, serta disesuaikan dengan karakter masyarakat, budaya lokal masing-

masing. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh bagaimana akses terhadap bantuan tersebut difasilitasi secara menyeluruh, efektif, dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai strategi komunikasi publik dalam konteks Bantuan Langsung Tunai (BLT), khususnya program PKH di Indonesia dan *Welfare Card* di Thailand, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Strategi komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program BLT PKH dan *Welfare Card* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Thailand secara umum mengacu pada prinsip-prinsip komunikasi satu arah sebagaimana dijelaskan dalam *Public Information Model* oleh Grunig dan Hunt. Di Indonesia, pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui situs resmi Kementerian Sosial RI, media sosial, dan peran dari pendamping PKH dalam menyosialisasikan program kepada penerima manfaat. Strategi ini menunjukkan upaya sistematis untuk menyampaikan informasi secara terbuka, akurat, dan berkelanjutan guna membentuk kepercayaan publik. Sementara itu, pemerintah Thailand menggunakan pendekatan komunikasi publik yang terpusat dan formal, dengan menyebarluaskan informasi terkait *Welfare Card* melalui situs resmi Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, dan media sosial. Strategi komunikasi ini bersifat satu arah dan menekankan pada keakuratan serta keteraturan penyampaian. Hal ini sesuai dengan

karakteristik *Public Information Model* dari Grunig dan Hunt, di mana komunikasi dilakukan secara informatif oleh lembaga pemerintahan guna menciptakan kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial yang dijalankan.

2. Strategi komunikasi publik dalam memfasilitasi kemudahan akses terhadap program bantuan menunjukkan implementasi prinsip-prinsip dalam teori *Service Accessibility* oleh Denis McQuail. Pemerintah Indonesia menggabungkan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat diakses melalui jaringan perbankan dan kantor pos serta ada nya peran dari pendamping PKH yang memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa akses terhadap bantuan dapat dijangkau oleh kelompok rentan sekalipun, termasuk di daerah terpencil. Sementara itu, pemerintah Thailand mengandalkan sistem *Welfare Card* (kartu kesejahteraan) berbasis chip yang terintegrasi, salah satu nya dengan aplikasi Krungthai NEXT serta jaringan toko mitra yang tersebar di seluruh wilayah. Masyarakat penerima bantuan dapat mengakses berbagai subsidi secara langsung melalui kartu tersebut tanpa proses administrasi yang rumit. Kedua negara menunjukkan perhatian terhadap aspek ketersediaan layanan, kemudahan prosedural, keterjangkauan biaya akses, serta penerimaan sosial dalam mengoptimalkan distribusi bantuan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, praktisi komunikasi publik, maupun peneliti selanjutnya, yaitu :

1. Pemerintah Indonesia dan Thailand diharapkan untuk terus mengembangkan strategi komunikasi publik yang berbasis pada prinsip transparansi, kredibilitas, dan konsistensi informasi. Penyampaian pesan mengenai program bantuan sosial hendaknya selalu mempertimbangkan konteks sosial, kultural, dan geografis masyarakat penerima manfaat.
2. Pemerintah perlu mengembangkan saluran komunikasi yang di dalamnya memungkinkan terjadi dialog atau umpan balik dua arah dari masyarakat, baik melalui media digital seperti fitur pengaduan daring, chatbot, maupun forum diskusi tatap muka di tingkat lokal. Hal ini penting untuk meningkatkan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap program yang dijalankan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara empiris tingkat efektivitas strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh masing-masing negara, serta dampaknya terhadap pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat terhadap program bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan., & Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Annisaulkhairi & Nauhfal Muharam Nurdin. (2023). Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Status Gizi Balita di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Jurnal Kesmas Andalas. Vol. 17. No. 2
- Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta
- Aryani, Dian. (2021). Model Komunikasi Pemerintah dalam Meningkatkan Trust Masyarakat di Era Digital. Jurnal Komunikasi Pemerintahan. Vol. 6. No. 2
- Avilya Putri, Zahra., Evi Priyanti. (2024). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan di Kelurahan Karawang Kulon. Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP). Vol. 5. No. 2
- Ayu Putri, Dinda., dan Yudhistira Hartono. (2023). Multi-channel Communication Strategy in Social Assistance Programs : A Study on PKH in Indonesia. Jurnal Komunikasi dan Masyarakat. Vol. 9. No. 2
- Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Gini dan Kemiskinan di Indonesia. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik. (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024. Berita Resmi Statistik. BPS
- Beaton, Cristopher., L Lontoh, & M Wai-Poi. (2017). Social Assistance and Subsidy Reforms in Thailand. ResearchGate
- Beaton, Cristopher., L Lontoh, & M Wai-Poi. (2020). Social Welfare Policies in Southeast Asia. ResearchGate
- Commonwealth Fund. (2023). High Costs, Low Access : Barries to Healthcare and Social Services Among Low-Income Families. Washington D.C : The Commonwealth Fund
- Datareportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-thailand>
- Danish Khan, Mohammad., Siti Nor Balkish Zakaria, dan Muhammad Saeed. (2021). Institutional Communication and Public Trust in Welfare Programs. Journal of Public Sector Communication. Vol. 5. No. 1
- Diermen, M Van. (2018). Digital Divide and Welfare Access in Thailand. Adelaide University

- Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. (2022). Pedoman Umum Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Jakarta : Kemensos RI
- D. Putnam, Robert. (2000). *Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community*. New York : Simon & Schuster
- Dramogir, Marius. (2021). *Public Service Media in the Digital Age*. CUE Press
- Durongkaverroj, Wannaphong. (2022). Can Cash Transfers Reduce Poverty and Food Insecurity ? Avidence in Thailand. *Journal of Asian Economics*. Vol. 82
- Dwi Kurniawan, Rachmat. (2021). Komunikasi Pemerintah dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*. Vol. 9. No.1
- Dwi Nanda, Erika. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Skripsi di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- E. Grunig, James., & Todd Hunt. (1984). *Managing Public Relations*. New York : Holt, Rinehart and Winston
- Fakultas Hukum UMSU. (2024). Daftar Kriteria Penerima Terbaru Program PKH 2024. <https://fahum.umsu.ac.id>
- Faqih, Ahmad., dan Nining Komariah. (2021). Peran Konsistensi Informasi dalam Program Bantuan Sosial Pemerintah. *Indonesian Journal of Government Communication*. Vol. 6. No.2
- Fisher, Caroline., & Glen Fuller. (2020). *Public Service Media and Inclusive Communication*. Media International Australia. Vol. 177. No. 1
- Holmemo, Cecile., Pablo Acosta, dan Rodrigo J Palacios. (2020). *Investing in People : Social Protection for Indonesia's 2045 Vision*. ResearchGate
- Israwati, Asti Ayu Febriana., dan Nella Adriani. (2023). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukamaju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Masyarakat Mandiri*. Vol. 7. No. 2
- Jareb, Karel. (2024). Digital Inclusion and Social Assistance in Developing Nations : A 24/7 Access Framework. *Journal of E-Government Services*. Vol. 18. No. 1
- J Moleong, Lexy. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Jose Canel, Maria., & Karen Sanders. (2010). *Government Communication : Cases and Challenges*. London : Bloomsbury Academic

- Kasali, Renald. (2003). Manajemen Public Relations : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Jakarta : UI Press
- Kementerian Keuangan Thailand. (2024). <https://mof.go.th>
- Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand. <https://www.m-society.go.th>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2020). Pedoman Komunikasi dan Publik untuk Pemerintah Daerah. Jakarta : Kominfo
- Kementerian Sosial RI. (2019). Petunjuk Teknis : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 03/LJS/01/2019 Tentang Petunjuk Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019
- Kemensos RI. (2020). Gerakan KPM Pegang KKS Sendiri. <https://kemensos.go.id>
- Kementerian Sosial RI. (2020). Laporan Tahunan Program Bantuan Langsung Tunai. Jakarta : Kementerian Sosial RI
- Kementerian Sosial RI. (2020). Laporan Tahunan Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta : Kementerian Sosial RI
- Kementerian Sosial RI. (2023). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jakarta : Kemensos RI
- Kementerian Sosial RI. (2023). Panduan Umum Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta : Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
- Kementerian Sosial RI. (2023). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2023. Jakarta : Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
- London, JD. (2018). Welfare Clientelism in Thailand. Dalam Welfare and Inequality in Marketizing East Asia. Springer
- M. Cutlip, Scott., Allen H. Center, dan Glen M. Broom. (2006). Effective Public Relations. 9th ed. New Jersey : Pearson Prentice
- McQuail, Denis. (2011). Teori Komunikasi Massa. Jakarta : Salemba Humanika
- Ministry of Finance Thailand. (2022). Welfare Card Registration Handbook
- M. Rogers, Everett. (2003). Diffusion of Innovations. 5th ed. New York : Free Press
- Nasution, Muhammad. (2013). Manajemen Komunikasi Publik. Jakarta : Rajawali Pers
- Noegroho, Agoeng., dan Tri Nugroho Adi. (2024). The Role of Companion Communication in the Cognitive Achievement of Family Members of the Indonesian Conditional Cash Transfer Program. Pakistan Journal of Life and Social Sciences

- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Office of National Economic and Social Development Council. (2018). *Thailand's State Welfare Card Project : Framework and Conditions*
- Phoothong, Bunyaporn., Anuch Nampinyo & Wiriya Boonmalert. (2023). *Creation of Marketing Strategies For Government Welfare Shops That Affects Purchasing Decisions In Pathum Thani Province, Thailand*. International Academic Multidisciplinary Research Conference In Seoul
- Prasetyo, Andri. (2021). *Kesenjangan Sosial di Negara Berkembang: Studi Kasus Thailand*. Jakarta : Penerbit Ilmu Ekonomi
- Puracan, Gelyn., Sandrine Chelsea Averyl Marinas, Tanabordee Jringtaisong, dan Pattaweeapol Tearphetdee. (2024). *Traversing Poverty Alleviation Initiatives : A Comparative Analysis of the Welfare Card System in Thailand and Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) in the Philippines*. Graduate Review of Political Science and Public Administration Journal. Vol. 3. No. 1
- Putra, Robby Aditya, Mochamad Aris Yusuf, and Maulida Fitri. *Dakwah Communication : An Alternative Way For Children Caused By Broken Home*. Jurnal KOMUNIKA. Vol. 6. No. 1
- Putra, Robby Aditya, et al. (2024). *Training Model Development : Transforming a Conservative Da'i to a Moderate by Leveraging Digital Tools*. Ishlah : Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Vol. 6. No.1
- Putra, Robby Aditya, Exsan Adde, and Maulida Fitri. (2023). *MEDIA DAKWAH TIKTOK UNTUK GENERASI Z*. Ath-Thariq : Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol. 7. No. 1
- Prima Soejachmoen, Maria. (2016). *Financial Inclusion in Indonesia : Moving Towards a Digital Payment System*. Springer
- Rahmawati, Fitri. (2020). *Komunikasi Publik Efektif*. Jakarta : Pustaka Indonesia
- Rakhmat, Jalaluddin. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rodaskarya
- Rattawong, Pimsiri., Tinnapat Saelim & Thanaporn Jirasatienpong. (2023). *Digital Governance and Trust in Welfare Systems : Evidence from Thailand*. Asian Journal of Public Affairs. Vol. 25. No.1
- Raza, Hafiz., dan Priya Goyal. (2022). *E-Government Platforms and Citizens' Trust in Social Assistance*. International Journal of E-Government Studies. Vol. 4. No. 3
- SJ Sumarto, Hetifah. (2016). *Inovasi Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

- Singh, Rahul., Siriphong Limsombunchai, dan K.P. Chan. (2023). Digital Data Systems and Equity in Social Welfare : Evidence from Thailand. Southeast Asia Public Administration Review. Vol. 7. No. 1
- Smith, Laura., & Lee Hyun-Jin. (2023). Blending Physical and Digital Access in Public Welfare Programs. Public Policy Review. Vol. 27. No. 2
- Srirathanaphin, Phuwana. (2019). Sosial Welfare Policies in Thailand : Analisis of the Welfare Card Scheme. Jurnal Asian Social Policy. Vol. 21
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Ahmad. (2019). Analisis Program Bantuan Sosial di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Suharto, Edi. (2018). Development of Social Welfare in Indonesia : The Rise of Conditional Cash Transfer. Routledge Handbook of Sustainable Development in Asia
- Suparno. (2020). Komunikasi dan Masyarakat Digital. Jakarta : Gramedia
- Surakhmad, Winarno. (1994). Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, dan Teknik. Bandung : Tarsito
- Suryahadi, Asep., Amriyani Yumna, Uus Ruswandi Raya. (2010). Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Program in Indonesia. SMERU Research Institute
- Thaiger. (2024). Finance Ministry Unveils 2025 State Welfare Card For Low-Income Boots. <https://thethaiger.com>
- Thai Health Promotion Foundation. (2018). The Thai Welfare Card : Is it Really Inclusive Growth ?
- Thoha, Miftah. (2012). Dimensi - Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Uchjana Effendy, Onong. (2003). Ilmu Komunikasi, Teori, dan Praktek. Bandung : Remaja Rosdakarya
- UNICEF Thailand. (2022). Formative Evaluation of the State Welfare Card Policy in Thailand
- Wiryanto. (2005). Komunikasi Publik : Teori dan Praktik. Jakarta : Prenada Media Group
- World Bank. Tailand Economic Monitor, Unlucking Thre Growth Potential Of Secondary Cities. (2024, July). World Bank
- World Bank. (2012). Indonesia Social Assistance Public Expenditure Review. Washington D.C : World Bank Publications

- World Bank. (2016). *Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia*. Washington D.C : World Bank Publications
- World Bank. (2020). *The Road to Recovery in Thailand*
- World Bank. (2024). *Thailand Economic Monitor, Unlocking the Growth Potential of Secondary Cities*
- Yvanka, Vika., Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti. (2023). Analisis Komparasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Padang. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*. Vol. 7. No. 2
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Gabungan*. Jakarta : Kencana
- Zhang, Min., Liu Jing & Kim Soo-Jin. (2023). Cultural Framing in Government Communication : Lessons from Asia-Pacific Welfare Programs. *Asian Journal of Public Communication*. Vol. 31. No. 2

L

A

M

P

I

R

A

N



Berita Terbaru



3.130 postingan

752RB pengikut

157 mengikuti

Kementerian Sosial RI
Organisasi Pemerintah
Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia | Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Indonesia
www.kemensos.go.id/ dan 1 lainnya
Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia

Ikuti kemensosri
Dikuti oleh maimuunnnnn, arli_4497, dan 2 lainnya

Mengikuti Kirim Pesan Telepon



Kementerian Sosial RI

196 rb pengikut • 42 mengikuti

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Indonesia

Mengikuti Kirim pesan

Postingan Tentang Foto Lainnya

Detail

- Halaman - Organisasi Pemerintah
- kemensosri dan 4 tautan lainnya
- Lihat Info Kementerian

Postingan Kementerian Sosial RI



m-society.go.th/home

what do you want?...

e-Mail 1300

MSDHS Ministry of Social Development and Human Security

มีทุกปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พ.ม.
แจ้งปัญหาสังคม/ขอรับสวัสดิการ

ติดตามสถานการณ์รับบริการ

เด็กและเยาวชน

mof.go.th

Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan

NO GIFT POLICE
งดของขวัญ และของกำนัล

Siaran pers Lihat semua >

Edisi No. 67/2025 Indeks Sentimen Ekonomi Regional (Indeks Sentimen Ekonomi) Hubungi kami

Edisi No. 66/2568 Departemen



กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

147 rb pengikut • 5 mengikuti

© สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

Mengikuti Kirim pesan

Postingan Tentang Foto Video Lainnya

Detail

Halaman · Organisasi Pemerintah

mof.go.th

92% merekomendasikan (400 Ulasan)

Lihat Info กระทรวงการคลัง

Postingan กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Nomor 639 Tahun 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0700/In.34.2/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam tanggal 11 Juli 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Menunjuk Saudara :
1. Dr. Robby Aditya Putra, MA. 19921223 201801 1 002
2. Pajran Kamil, M.Kom.I. 2115058102
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- N a m a : Lola Anggraeni
- N I M : 21521022
- Judul Skripsi : Analisis Komunikasi Publik Dalam Konteks BLT : Studi Komparasi Antara Indonesia Dan Thailand
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 05 September 2024



- Tembusan
1. Bendahara IAIN Curup;
 2. Kasubbag FUAD IAIN Curup;
 3. Dosen Pembimbing I dan II;
 4. Prodi yang Bersangkutan/
 5. Layanan Akademik
 6. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan. Dr. AK Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp. (0732) 21010-7003044
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-mail. -

Nomor : // /In.34/FU/PP.00.9/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : Proposal dan Instrumen
Perihal : **Surat Keterangan Izin Penelitian
(Studi Pustaka)**

16 Januari 2025

Dengan ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini benar melakukan penelitian, atas nama:

Nama : Lola Anggraeni
NIM : 21521022
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Analisis Komunikasi Publik dalam Konteks BLI : Studi Kasus
Komparasi Antara Indonesia (PKH) dan Thailand (Welfare Card)
Waktu Penelitian : 16 Januari 2025 s.d 16 April 2025
Jenis Penelitian : Library Research
Tempat Penelitian : -

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16 Januari 2025
Dekan



Dr. Fakhruddin, M.Pd.I
NIP 19750112 200604 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)

Jl. Dr. A.K. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp: (0732) 21010-21759 Fax: 21759

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

NOMOR : 059 /In.34/FU.1/PP.00.9/06/2025

Admin turnitin program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan *similarity* terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

NAMA : Lola Anggraeni
NIM : 21521022
JUDUL : Analisis Komunikasi Publik Dalam Konteks BLT Studi Komparasi Antara Indonesia Dan Thailand

Dengan tingkat kesamaan sebesar 17. %

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 02 Juni 2024

Ketua Prodi KPI,



[Handwritten Signature]
Dr. Robby Aditya Putra, M.A
NIP. 199212232018011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Cahri No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Lola Anggraeni
NIM	21521022
PROGRAM STUDI	Komunikasi Dan Pengajaran Islam
FAKULTAS	Wahiduddin Adab dan Dakwah
DOSEN PEMBIMBING I	Dr. Robby Aditya Putra, M.A
DOSEN PEMBIMBING II	Pajun Kamil, M.kom I
JUDUL SKRIPSI	Analisis Komunikasi publik Dalam Konteks BR : Studi Komparasi Antara Indonesia dan Thailand
MULAI BIMBINGAN	11 November 2024
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	11/11	Bab 1 : Bagian latar belakang dan rumusan masalah Bab 4 : Penambahan landasan teori terkait komunikasi publik	
2.	21/11	Penambahan Materi / data PKH dan welfare card Perjelat terkait sumber data primer, buat tabel perbandingan	
3.	29/11	menbuat daftar pertanyaaan yg. wawancara Indikator perbandingan	
4.	03/12	Revisi Bab 1 dan 2 : penambahan pengisian paragraf 5. Mulai msa memikirkan tentang bab 4	
5.	16/01	Acc sk penelitian, lanjut bab 4	
6.	17/02	Bab 4 lanjutkan	
7.	15/04	Revisi bab 4	
8.	29/05	Revisi bab 4, Perbaiki data nya, Perbaiki typo	
9.	16/06	Acc sidang skripsi	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Robby Aditya putra, M.A
NIP. 199212232018011002

CURUP 11 November 2024

PEMBIMBING II,

NIP. 2115058102

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Lola Angraeni
NIM	2121013
PROGRAM STUDI	Komunikasi dan Penyiaran Islam
FAKULTAS	Ushuluddin, Adab dan Dakwah
PEMBIMBING I	Dr. Robby Aditya Putra, M.A
PEMBIMBING II	Pagun Kamil, M.Kom.
JUDUL SKRIPSI	Analisis Komunikasi Publik Dalam Konteks RBT Studi Komparasi Antara Indonesia dan Thailand
MULAI BIMBINGAN	18 November 2024
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	10/11/2024	Bab 4. Tambahkan penjelasan terkait Strategi Komunikasi Publik. Pahami lagi materi tentang sumber data	
2.	12/01/2025	Acc Bab 1-3	
3.	17/2/2025	Lanjutan Bab 4. tambahkan kaitan dgn Islam	
4.	14/04/2025	Revisi bab 4	
5.	28/05/2025	Lengkapi bagian data yang kurang	
6.	06/06/2025	Bab 4 dan bab 5	
7.	10/06/2025	Bab 5	
8.	11/06/2025	Perbaiki typo	
9.	12/06/2025	Acc Sidang Skripsi	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 18 November 2024

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. Robby Aditya Putra, M.A
NIP. 199212232013 011002

NIP. 211658102

BIODATA PENULIS



Penulis ini bernama Lola Anggraeni. Penulis lahir di Tanjung Alam pada tanggal 24 Maret 2003. Lahir dari pasangan bernama Damsi dan Kustiati, penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 04 Ujan Mas pada tahun 2009, kemudian dilanjutkan ke MTs Negeri 01 Kepahiang pada tahun 2015. Kemudian penulis menempuh pendidikan di MAN Rejang Lebong pada tahun 2018. Hingga pada akhirnya penulis bisa menempuh pendidikan di IAIN Curup pada tahun 2021 di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, khususnya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik di lingkungan kampus.

Dengan keberanian dan rasa tanggung jawab yang tinggi, penulis terus berusaha supaya bisa berkembang, hingga akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir bernama skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan sebuah kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang teramat besar atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Analisis Komunikasi Publik dalam Konteks BLT : Studi Komparasi Antara Indonesia dan Thailand”

